

**MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA BPBD KABUPATEN MAGELANG
DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh

SUNNORA MEILISA KAHARJONO

14321069


**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

SKRIPSI
MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA BPBD KABUPATEN MAGELANG
DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI

Disusun Oleh
SUNNORA MEILISA KAHARJONO
14321069

Telah di setujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk disajikan dan dipertahankan
dihadapan tim penguji skripsi




Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA
NIDN: 0516087901

SKRIPSI
MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA BPBD KABUPATEN MAGELANG
DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI

Disusun Oleh
Sunnora Meilisa Kaharjono
14321069

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 07 JUN 2018

Dosen Penguji :

1. Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA
NIDN. 0516087901
2. Mutia Dewi, S.Sos., M.I.Kom
NIDN. 0520028302



Muzayin
Mutia Dewi

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA

NIDN: 0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunnora Meilisa Kaharjono
No. Mahasiswa : 14321069
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang
dalam Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Merapi

Melalui surat ini, menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan melanggar etika dalam bentuk apapun, seperti plagiasi, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang di junjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya plagiasi atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta , 13 Juli 2018

Yang menyatakan,



Sunnora Meilisa Kaharjono

14321069

SURAT BUKTI MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. Soekarno-Hatta NO. 7A. TELP. 0293 789182 FAX. 0293 788080
KOTA MUNGKID 56511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/140/46/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RATNA YULIANTY, SH.MH
NIP : 19680730 199703 2 003
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina IV/A
Jabatan : Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Magelang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SUNNORA MEILISA KAHARJONO
Pekerjaan : Mahasiswa, UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Deme No. 115/117 Rt 005 Rw 003 Kel. Cibangkong
Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Magelang mulai tanggal 15 Oktober s.d 31 Desember 2017 dengan judul : **"MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA BPBD KABUPATEN MAGELANG DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA ERUPSI MERAPI"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kota Mungkid, 5 April 2018
A.t.d. KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sekretariat,

RATNA YULIANTY, SH. MH
Pembina
NIP. 19680730 199703 2 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang dalam Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Merapi**. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan Kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Dalam melaksanakan penelitian hingga pada tahap penyelesaian, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah mendengar dan menjawab doa saya ketika saya sedang senang maupun sedih, serta memberikan kesehatan, kemudahan, dan segalanya tidak bisa disampaikan dalam kata-kata.
2. **Kepada kedua orang tua saya, Alm Harjono dan Ibu Eka Djuharningsih**, yang selalu memberikan doa kepada anak-anaknya di setiap sujudnya, memberikan dukungan moril dan materil baik dalam pembuatan skripsi maupun kehidupan sehari-hari. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rizeki yang melimpah dan kebahagiaan lahir batin. Amin
3. **Kepada Eyang Uti (Djuminten) dan Eyang Kakung (Subiharno)**, yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan semua cerita tentang kehidupan saya, serta memberikan dukungan moril dan materil. Semoga mereka diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat melihat cucunya wisuda, menikah, dan punya anak seperti yang selama ini mereka inginkan. Amin
4. **Kepada adik saya Sony Monthana Ramadhan Kaharjono**, yang selalu memberikan semangat, cinta kasih dan menghadirkan arti kata “berbagi”. Semoga dia dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Amin
5. **Kepada bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos. MA**. Selaku kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi terimakasih telah membimbing saya dengan sabar dan tulus,

memberikan kritik dan saran selama pembuatan skripsi. Semoga kebaikan beliau di balas oleh Allah SWT, Semoga beliau diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin

6. **Kepada Ibu Mutia Dewi S.Sos., M.I.Kom.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih atas arahan dan dukungan selama masa perkuliahan saya. Semoga beliau diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin
7. **Seluruh staff Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,** terimakasih telah membantu saya dalam urusan perkuliahan, surat-menyerat perizinan, dan lain sebagainya. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin
8. **Kepada seluruh pimpinan dan staff BPBD Magelang yakni Pak Gunawan, Pak Mhd, Pak Didik, Pak Fajar, Mba Rahma, Ibu Erni dan lain sebagainya.** terimakasih karena sudah memberikan kelancaran selama proses pengambilan data. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin
9. **M Hafiedz Mahfoed Triawan,** terimakasih karena telah membantu memberikan semangat dan motivasi setiap harinya selama proses mengerjakan skripsi hingga selesai. Semoga kebbaikannya mendapat balasan dari Allah Swt dan semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin
10. **Para sahabat saya,** M Hafiedz Triawan, Nadila Anindita, Nisrina, Nita Amanah, Saputra Dilingga, Tiara Indah, Putrimdiri, Andara Okta, Aditya Laras, Pipit B Vanesa, Raeda Sadrina, Kumala Sakti Wibowo, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas saran, dukungan, dan canda tawa yang telah kita bangun selama ini.
11. **Sahabat saya di Bandung,** Nursanti Widya A, Harti Handayani, Irma Qori, Wulan P, Laa Roy Bafi, Rizki Januari, Eko Saputro, Violita Gema, Ratih Dwi P, Desi Devianty, dan yang lainnya selama saya berada di Bandung. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin
12. **Teman seperjuangan saya “Pak Muzayin Squad”,** Andara Okta, Ken Swari, Gandis Nira, Pipit B Vanesa, Pritha RP, Puji Lestari, Sanik Ismata, Sarah Rahma, Nadila Anindita, Jamal A, Sulkhan. Terimakasih telah mendukung satu sama lain, dan saling menunggu ketika bimbingan. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin

13. **Teman-teman Lem FPSB 2016/2017** terimakasih atas pengalaman yang luar biasa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebagaiaan lahir dan batin. Amin
14. **Teman-teman KKN Angkatan 55**, Angelia Monica, Restu Tiyana, Ganis Dhenanda, Marshela, Abdul Rahman Wahab, Aris Setiawan, Rizki Nanda, Rizki Arif F, dan teman lainnya. Terimakasih atas cerita, canda tawa, dan kebahagiaan yang telah kita lalui. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin
15. **Teman-teman Ilmu Komunikasi 2014**, terimakasih karena sudah mendukung satu sama lain. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebagaiaan lahir dan batin. Amin
16. **Serta pihak lainnya**, yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebagaiaan lahir dan batin. Amin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Jika ada kritik dan saran, penulis sangat menghargainya. Di sisi lain penulis sangat mengharapkan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi seluruh kalangan yang membutuhkan.

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Sunnora Meilisa Kaharjono

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN BUKTI MELAKUKAN PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	xv
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka	5
1.5.1 Penelitian Terdahulu.....	5
1.5.2 Kerangka Teori	12
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Pendekatan Penelitian.....	19
1.6.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	20
1.6.3 Pemilihan Narasumber	20
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.5 Teknik Analisis Data	23
BAB II GAMBARAN UMUM.....	26
2.1 Sejarah Erupsi Gunung Merapi 2010	26
2.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Magelang.....	30
BAB III TEMUAN PENELITIAN.....	34

3.1 Identifikasi Masalah Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi	34
3.2 Perencanaan Dan Program Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi	38
A. Desa Bersaudara (Sister Village)	38
B. Desa Tangguh Bencana (Destana)	43
3.2 Implementasi Dan Komunikasi Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi	44
A. Apel Siaga	44
B. Simulasi	45
C. Pelatihan	49
D. Simulasi (Gladi Lapangan)	52
E. Simulasi (Gladi Posko)	56
3.2 Evaluasi Program Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi	59
BAB IV PEMBAHASAN	63
4.1 Model Komunikasi Bencana Erupsi Merapi Masa Normal	63
4.2 Pola Komunikasi Struktur Rantai Dan Struktur Roda Masa Normal	68
4.3 Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Masa Tanggap Darurat	74
4.4 Pola Komunikasi Struktur “Y” Masa Tanggap Darurat	87
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Keterbatasan Penelitian	96
5.3 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Tabel Narasumber	21
Bagan 1.2 Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman (1992)	23
Bagan 2.1 Struktur Organisasi BPBD Magelang	33
Bagan 3.1 Rumus Manajemen Bencana	36
Bagan 3.2 Tabel Daftar Pasangan Desa <i>Sister Village</i>	39
Bagan 3.3 Model Komunikasi Bencana BPBD Keadaan Normal	65
Bagan 3.4 Model Komunikasi Bencana BPBD Keadaan Darurat	77
Bagan 4.1 Pola Komunikasi Struktur Rantai (<i>chain</i>)	84
Bagan 4.2 Pola Komunikasi Struktur Roda (<i>wheel</i>).....	86
Bagan 4.3 Pola Komunikasi Struktur “Y”	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pelatihan Sistem Informasi dan Komunikasi Tanggap Darurat	52
Gambar 3.2 Spanduk Simulasi Gladi Posko dan Gladi Lapang	56
Gambar 3.3 Proses Evakuasi dari Desa Kalibening menuju Desa Tanjung dan Desa Adikarto	58
Gambar 3.4 Suasana Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Desa Adikarto Saat Gladi lapang	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	99
Lampiran 2 Dokumentasi	111
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	113

ABSTRAK
14321069

Sunnora Meilisa Kaharjono. 14321069. Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang dalam Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Merapi. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2018

Gunung Merapi yang terletak di perbatasan empat Kabupaten yakni Kabupaten Sleman, Provinsi D I Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, merupakan Gunung teraktif di Indonesia. Pada tahun 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi besar dalam kurun waktu 140 tahun terakhir. Dampak yang ditimbulkan bencana erupsi gunung merapi banyak menelan korban jiwa, hingga infrastruktur yang hancur karena awan panas. Penelitian ini berfokus pada Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang dalam Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Merapi.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan : Bagaimana strategi mitigasi bencana Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menghadapi ancaman bencana Erupsi Merapi? Bagaimana Pemerintah Magelang mengkomunikasikan strategi mitigasi bencana tersebut kepada masyarakat dan stakeholders terkait? Serta pola komunikasi apa yang di gunakan BPBD Magelang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil narasumber yakni Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Magelang, Kepala Seksi Pencegahan, Kepala Seksi Kedaruratan, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), OPRB Desa Kalibening Kec. Dukun, OPRB Desa Tanjung dan Adikarto Kec. Muntilan.

Penelitian ini menemukan beberapa hal penting yakni, pertama BPBD Magelang menggunakan strategi mitigasi bencana berupa desa bersaudara (*sister village*) dan desa tangguh bencana (Destana). Kedua cara BPBD Magelang menyampaikan segala jenis informasi kebencanaan dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan, simulasi dan apel siaga. Ketiga dari cara penyampaian informasi tersebut, penulis menemukan model komunikasi bencana pada saat normal menggunakan arus komunikasi secara struktural dan non struktural. Sedangkan model komunikasi bencana pada saat darurat menggunakan arus komunikasi non struktural. Keempat pola komunikasi yang BPBD Magelang disaat keadaan normal menggunakan pola komunikasi struktur rantai (*chain*) dan pola komunikasi struktur roda (*wheel*). Sedangkan pola komunikasi disaat keadaan darurat BPBD Magelang menggunakan pola komunikasi struktur “Y”. Dalam pola komunikasi memiliki posisi sentral yang dianggap sebagai pemimpin. Posisi sentral pola komunikasi rantai (*chain*) dan pola komunikasi roda (*wheel*), adalah BPBD Kabupaten Magelang. Sedangkan posisi sentral pola komunikasi struktur “Y” adalah BPPTKG Yogyakarta.

Kata Kunci : Komunikasi Bencana, Pola Komunikasi, Pemerintah, Gunung Merapi

ABSTRACT
14321069

Sunnora Meilisa Kaharjono. 14321069. Disaster Communications Management BPBDs Magelang in Disaster Risk Reduction eruption of Mount Merapi. Bachelor Thesis. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Studies, Islamic University of Indonesia. 2018

Mount Merapi, located on the border of four districts namely Sleman District, Yogyakarta Province. Magelang, Klaten and Boyolali district in Central Java province, is the most active mountain in Indonesia. In 2010 the big eruption of Mount Merapi experienced within the last 140 years. The impact of the eruption of Mount Merapi many casualties, until the infrastructure destroyed by the heat clouds. This study focuses on Disaster Communications Management BPBDs Magelang District in Disaster Risk Reduction eruption of Mount Merapi.

Based on the conceptual framework, this study was about to answer the question: How does disaster mitigation strategies Magelang District Government in facing the threat of Merapi eruption disaster? How Magelang Government disaster mitigation strategies to communicate to the public and relevant stakeholders? And patterns of communication is used BPBDs Magelang? To answer these questions, researchers used a qualitative descriptive method by collecting data through semi-structured interviews, observation, and documentation. This study takes a resource that is the Head of Prevention and Preparedness BPBDs Magelang, Prevention Section Chief, Section Chief of Emergency, Chairman of the Indonesian Community Radio Network (JRKI), OPRB Kalibening village district. Shamans, OPRB Tanjung and Adikarto district. Muntilan.

This study found some important things, first BPBDs Magelang using disaster mitigation strategies in the form of village siblings(sistervillage)and village disaster resilient (Destana). Both ways BPBDs Magelang convey all kinds of disaster information by conducting socialization, training, simulation and muster. The third of the way to deliver information, the authors find a model of disaster communications when using the normal flow of communication in structural and non-structural. The model of disaster communications during emergencies using non-structural communication flow. Fourth BPBDs communication patterns Magelang when normal use patterns of communication chain structure and the structure of the communication pattern wheel. Meanwhile, when an emergency communication patterns BPBDs Magelang using communication patterns structure "Y". In the communication pattern has a central position which is regarded as the leader. The central position of the communication pattern chain and communication patterns wheel, is BPBDs Magelang. While the central position of the structure of communication patterns "Y" is BPPTKG Yogyakarta.

Keywords: Disaster Communication, Communication Patterns, Government, Mount Merapi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negeri rawan bencana. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia yakni banjir yang terjadi setiap tahun, sebut saja Ibu Kota Indonesia (Jakarta). Setiap tahun di musim hujan masyarakat Jakarta sudah terbiasa dengan air yang menggenangi jalan. Bencana tersebut terjadi akibat adanya faktor manusia itu sendiri dimana gedung-gedung pencakar langit yang menghalangi jalannya air hujan, sampah di sungai, dan pemukiman dekat bantaran sungai perlu diperbaiki. Selain itu bencana yang sering terjadi adalah tanah longsor yang diakibatkan oleh hujan lebat dalam waktu yang lama setelah kemarau, struktur tanah yang kurang tebal, erosi tanah, getaran tambahan yang disebabkan mesin kendaraan, maupun arus lalu lintas, dan terdapatnya beban tambahan dari pemukiman di sekitar lereng yang memicu terjadinya tanah longsor. Kedua bencana tersebut sering terjadi karena ulah manusia itu sendiri.

Selain itu, terdapat bencana yang diakibatkan oleh faktor alam yakni tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Bencana tsunami terbesar di Indonesia terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam yang telah meluluhlantakan infrastruktur, korban jiwa, dan kerugian lainnya. Belum kering air mata Indonesia akibat bencana, ditahun 2006 gempa bumi terjadi di Yogyakarta, tahun 2010 terjadi erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta, dan pada tahun 2014 Gunung Kelud memuntahkan lahar panas dan hujan abu yang dampaknya hingga Jawa Barat.

Indonesia yang dikenal dengan negara rawan bencana, disebabkan oleh adanya cincin api yang sering disebut dengan *ring of fire*, dimana sebagian besar gunung api terletak pada posisi melingkar mengelilingi Indonesia. Adanya rangkaian pegunungan yang membentang dari pulau satu ke pulau lainnya yakni dari Sumatera hingga ke bagian Timur, dari Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Dengan posisi geografis yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia yakni Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, menjadikan Indonesia terancam oleh letusan gunung api dan gempa vulkanik.¹

¹Fendri Usmayati, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo dalam Mitigasi Bencana Tahun 2010". (Skripsi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah ,Yogyakarta, 2012) Hal.1.

Lingkaran cincin api dapat menjadi siklus yang tidak pernah berhenti. Dibalik keindahan Indonesia yang eksotik, menyimpan potensi bencana besar setiap tahunnya. Gempa bumi dan letusan gunung berapi dapat sewaktu-waktu terjadi tanpa diduga. Dengan potensi bencana sebesar itu sudah seharusnya mempersiapkan mental masyarakat dan peran teknologi untuk mendeteksi dini, mengantisipasi dan mengurangi efek bencana yang terjadi. Dengan gunung api sebanyak itu perlu adanya kesiapsiagaan dari pemerintah daerah. Untuk meminimalisir terjadinya bencana besar, perlu adanya strategi khusus didukung dari sumber daya manusia maupun teknologi yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit.

Penelitian ini fokus membahas komunikasi bencana di kawasan Gunung Merapi. Gunung Merapi dikenal sebagai gunung api teraktif di dunia. Karakteristik erupsinya bersifat aktif permanen, yaitu guguran kubah lava atau lava pijar, membentuk aliran piroklastika (awan panas) atau ‘nuee ardentes’ yang dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutan “wedhus gembel”. Peristiwa tersebut dapat saja terjadi setiap saat, baik yang dipicu oleh tekanan dari dalam pipa kepundannya ataupun akibat gaya gravitasi yang bekerja pada kubah lava yang berada dalam posisi tidak stabil (pada dasar kawah lama yang miring).² Gunung tersebut berpotensi kembali erupsi di tahun-tahun mendatang dan berdampak besar bagi daerah yang mengelilingi Gunung Merapi, serta berpengaruh bagi kelangsungan hidup warga sekitar lereng Gunung Merapi.

Tercatat dalam Pusat Survey Geologi menyatakan bahwa “sedikitnya Gunung Merapi telah erupsi sebanyak enam (6) kali yakni tahun 1587, 1672, 1768, 1822, 1849, dan 1872 dan aktifitas Gunung Merapi kembali erupsi pada 26 Oktober 2010”. Dalam kasus ini peran pemerintah sangat penting dalam memberikan keamanan pada masyarakat berupa kesiapsiagaan saat terjadinya bencana yang akan datang kembali, karena seharusnya ketika sebuah daerah pernah mengalami peristiwa bencana peran masyarakat termasuk pemerintah sudah lebih siap dalam segi mental, fisik dan teknologi. Proses tersebut termasuk ke dalam mitigasi bencana. Mitigasi bencana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan (King, 2007).

²Indyo Pramoto, “Klasifikasi Gunung Aktif di Indonesia : Studi Kasus dari Beberapa Letusan Gunung Berapi dalam Sejarah”. *Jurnal Geologi Indonesia*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2006) Hal. 209-227.

Mitigasi disebut juga pencegahan atau pengurangan resiko dan dianggap sebagai landasan manajemen bencana (Federal Emergency Management Agency/ FEMA, 2006).³

Penanganan bencana membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam membantu korban, mendorong berbagai golongan masyarakat ikut adil dalam memberikan bantuan berupa fisik dan non fisik. Pemerintah mempunyai bagian khusus untuk menangani penanggulangan bencana yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dibentuknya badan khusus adalah semata-mata untuk mendukung Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Namun penanganan tersebut tidaklah mudah, perlu adanya strategi penyebaran informasi yang tepat, karena itu berhubungan dengan keselamatan seluruh masyarakat sekitar Gunung Merapi. Dalam penelitian ini instansi yang dipilih adalah Pemerintah Kabupaten Magelang, Sesuai dengan lokasi penelitian yaitu Kabupaten Magelang. Dipilihnya kabupaten tersebut karena memiliki letak geografis yang berdekatan dengan Gunung Merapi serta, memiliki pemukiman penduduk yang berada 15 km dibawah kaki Gunung Merapi. Selain itu kabupaten tersebut juga terkena dampak besar dari erupsi Merapi delapan tahun yang lalu. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada pemerintah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pembentukan BPBD Kabupaten Magelang diawali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah. Peraturan yang mendasari adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang.⁴ Bila dilihat dari struktur organisasi, bagian khusus yang menangani mitigasi bencana berada di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dimana salah satunya berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada masa bencana.

Penelitian ini berfokus pada strategi mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang, tidak hanya itu penulis juga berfokus pada pola komunikasi yang digunakan oleh BPBD. Hal ini menjadi penting diteliti mengingat perlunya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman besar yang nantinya akan berdampak pada lingkungan, infrastruktur, dan perekonomian lokal. Dalam hal ini sebagian masyarakat yang terletak di lereng Merapi dan berjarak sangat dekat dengan puncak merapi menganggap hal itu bukan

³ Bevaola Kusumasari, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. (Yogyakarta: Gava Media 2014), hal. 27.

⁴ "Tugas Pokok dan Fungsi". <http://bpbd.magelangkab.go.id/v2/home/detail/tupoksi/95> (Diakses 30 Mei 2017).

ancaman melainkan sebagai berkah dan pasrah dengan adanya aktifitas Merapi itu sendiri. Namun tetap saja pengurangan resiko bencana merupakan suatu kebutuhan penting dan mendesak yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah, agar peran Pemerintah dan masyarakat lokal dapat memahami bahaya dari Erupsi Merapi. Perlunya kerjasama dengan stakeholder diperlukan untuk mendukung strategi mitigasi bencana, sehingga pada saatnya ancaman tersebut tiba pemerintah sudah lebih siap dan dapat meminimalisir ancaman tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bencana alam merupakan suatu kejadian yang tidak bisa dihindari siapapun. Jika mendengar kata bencana alam, hal yang pertama dilakukan adalah menyelamatkan diri sendiri. Di mata masyarakat, bencana alam merupakan momok menakutkan terutama di kawasan yang rentan terkena bencana seperti yang dialami oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2010 silam yang terkena dampak erupsi Merapi. Peristiwa yang begitu hebat tersebut telah banyak memakan korban jiwa, ternak mati, dan pemukiman warga yang rata diselimuti abu vulkanik. Duka dirasakan tidak hanya bagi masyarakat sekitar, namun Indonesia pun merasakan duka, terlebih lagi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali.

"Merapi sampai saat ini belum ada trend kenaikan aktivitas vulkanik, "ungkap Agung Nandaka, Kepala BPPTKG Yogyakarta".⁵ Media tersebut juga menambahkan terkait siklus merapi dapat mengalami beberapa perubahan yakni dua hingga tujuh tahun, siklus Merapi dapat berubah pasca letusan tahun lalu. Didukung oleh pernyataan Agus Budi Santoso, Kasi Merapi BPPTKG Yogyakarta menyatakan bahwa, "Kita sedang menunggu gejala siklus berikutnya yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda,".⁶ Namun dibalik itu semua, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menghadapi peristiwa bencana erupsi Merapi mendatang dengan lebih siap secara keseluruhan. Pertanyaan umum yang hendak penulis pertimbangkan adalah: Bagaimana strategi mitigasi bencana BPBD Magelang dalam menghadapi ancaman bencana Erupsi Merapi? Bagaimana BPBD Magelang mengkomunikasikan strategi mitigasi bencana tersebut kepada masyarakat dan stakeholders terkait? Serta pola komunikasi apa yang di gunakan BPBD Magelang?

⁵ Hamim Tohari. Siklus Erupsi Gunung Merapi Bisa Berubah. <http://jogja.tribunnews.com/2016/10/26/siklus-erupsi-gunung-merapi-bisa-berubah> (Diakses 30 Mei 2017).

⁶ *Ibid.*,

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Magelang dalam mekampanyekan tanggap bencana.
2. Menganalisis strategi BPBD Kabupaten Magelang dalam mengkomunikasikan strategi mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar dan stakeholder.
3. Menganalisis lebih dalam pola komunikasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Magelang selama mengkomunikasikan strategi penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik atau tema mengenai mitigasi bencana dan komunikasi bencana.

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan dalam penanganan resiko bencana khususnya yang terjadi di sekitar wilayah Kabupaten Magelang yang akan menghadapi tugas dan tantangan mendatang yang semakin berat.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi BPBD Magelang untuk meningkatkan strategi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait judul penelitian Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi. Tidak hanya itu penulis juga membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

Penelitian pertama dilakukan oleh Krisna Megantari tahun 2013, dengan judul “Pengelolaan Komunikasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pemerintah Kabupaten Sleman”. Dalam penelitian tersebut Megantari menjelaskan pengelolaan komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Sleman dengan menggunakan metode studi kasus. Menurutnya studi kasus yang diambil unik karena meneliti pada tahap pra bencana oleh PEMKAB Sleman paska terjadi erupsi merapi tahun 2010. Selain itu Megantari menggunakan kualitatif deskriptif sebagai pendekatan yakni mengolah data yang ada mengenai bahasan pengelolaan komunikasi bencana oleh BPBD Sleman hingga kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa “sistem pengelolaan BPBD yakni Sistem Informasi Kebencanaan Desa (SIKAD) telah dilakukan, namun pemanfaatan situs Sleman Disaster Information Network (SDIN) PEMKAB Sleman terbukti kurang efektif, kemudian dari segi kesiapsiagaan mengenai penyusunan rencana kontijensi masih kurang rapih dalam pengkoordinasiannya”.⁷

Perbedaan penelitian Megantari dengan penulis terletak pada tema penelitian, Megantari mengambil fokus penelitian mengenai sistem pengelolaan dari lembaga pemerintah daerah yakni informasi publik mitigasi bencana milik BPBD Sleman pada tahap pra bencana yang akan datang dan hanya menjelaskan bentuk-bentuk pengelolaan dari lembaga pemerintah daerah dan menilai kinerja dari lembaga tersebut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Raysa Relegia Anggiani, tahun 2016, dengan judul penelitian “Evaluasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi di Kawasan Wisata Lava Tour Merapi Kabupaten Sleman”. Dalam penelitian tersebut salah satu fokus penelitian Anggiani yakni mengupas upaya mitigasi bencana baik secara struktural maupun non struktural di kawasan wisata yang rawan bencana letusan Gunung Merapi (*lava tour*) di Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut menggunakan dua metode penelitian yakni kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi lapangan serta analisis data dan sample yang dipilih secara purposive sampling yakni perwakilan pemerintah, penyedia jasa lava tour dan masyarakat lokal. Dari penelitian tersebut Relegia menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan kawasan Lava Tour Merapi ini belum memenuhi kriteria ideal mitigasi bencana di kawasan wisata yang rawan bencana.⁸ Perbedaan penelitian Anggiani dan penulis pertama terdapat pada tahap fokus

⁷ Krisna Megantari, “Pengelolaan Komunikasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Sleman”, (Thesis, Fakultas Ilmu Budaya dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013), Hal 6.

⁸ Raysa Relegia Anggiani, “Evaluasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi di Kawasan Wisata Lava Tour Merapi Kabupaten Sleman” (Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016), Hal. 175.

penelitian. Dalam penelitian Anggiani mengungkap tingkat kesesuaian pelaksanaan mitigasi bencana yang dilakukan lava tour dengan kriteria mitigasi bencana terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesesuaian antara objek wisata dan kriteria mitigasi bencana.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mochtar Hidayat, tahun 2013, dengan judul penelitian “Mitigasi Bencana Berdasarkan Kepercayaan Lokal (Studi Kasus Kepercayaan Lokal Dusun Stabelan dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi tahun 2010)”. Dalam penelitian ini Hidayat memfokuskan pada upaya kepercayaan lokal Dusun Stabelan dalam mitigasi bencana erupsi merapi tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif dengan populasi seluruh warga Dusun Stabelan dan menggunakan warga yang mengetahui secara pasti sejarah tentang makam leluhur mereka Mbah Bagor. Bayan Kriman adalah tokoh masyarakat yang mewarisi jabatan sebagai bayan. Hidayat menarik kesimpulan bahwa masyarakat daerah tersebut selama ini melakukan ritual keseharian yang berkaitan dengan penghuni gaib Gunung Merapi agar mereka bisa menjaga keseimbangan antara alam, manusia dan alam gaib gunung Merapi.⁹ Perbedaan penelitian Hidayat dengan penulis terletak pada sudut pandang fokus penelitian. Hidayat memfokuskan sudut pandang penelitiannya pada mitigasi bencana kepercayaan masyarakat lokal Dusun Stabelan yang mengungkap banyak mitologi tradisional.

Penelitian keempat Intan Fatmasari, tahun 2015, dengan judul “Strategi Perencanaan Partisipasi Masyarakat Untuk Mitigasi Bencana Tsunami di Pesisir Pacitan Jawa Timur (Kasus Kelurahan Ploso dan Kelurahan Sidoharjo)”. Dalam penelitian tersebut Fatmasari berfokus pada pengaruh tingkat partisipasi masyarakat untuk mitigasi bencana tsunami di daerah pesisir Pacitan Jawa Timur. Selain itu Fatmasari menggunakan metode survey untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat melalui kuisisioner dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yakni merumuskan strategi perencanaan partisipasi yang kemudian dikaji secara deskriptif analitik kualitatif. Populasi penelitian berada di Kelurahan Ploso dan Kelurahan Sidoharjo serta mengambil teknik random sampling yakni memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk menjadi sampel. Kemudian penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya perbedaan tingkat partisipasi pada kondisi sosial, ekonomi, karakteristik wilayah, dan karakteristik masyarakat dengan tujuan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Indikator konsep dan kebijakan yang

⁹ Mochtar Hidayat, “Mitigasi Bencana Berdasarkan Kepercayaan Lokal (Studi Kasus Kepercayaan Lokal Dusun Stabelan dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi tahun 2010)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013), Hal. 70.

dilakukan dengan sistem pengelolaan terpusat menjadikan pengelolaan wilayah pesisir dan mitigasi bencana dapat berjalan lancar dan beriringan.¹⁰ Perbedaan penelitian Fatmasari dengan penulis ini terletak pada fokus penelitian. Fatmasari mengungkapkan sudut pandang masyarakat untuk mengukur tingkat partisipasi terhadap mitigasi bencana tsunami yang dilakukan masyarakat sekitar.

Penelitian kelima dilakukan oleh Puji Lestari, Eko Teguh Paripurno, Sari Bahagiarti Kusumayudha, dan Berlian Ramadhaniyanto, tahun 2015, dengan judul “Komunikasi Lingkungan untuk Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Sinabung”. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Focus Grup Discussions (FGD) dengan mengundang peserta dari berbagai lembaga yakni Dinas Kominfo, Kesbanglinmas, Camat, Kepala Desa, dan anggota komunitas peduli bencana. Selain itu fokus dalam penelitian tersebut membahas tentang model komunikasi lingkungan yang akan dipakai oleh lembaga setempat untuk menghadapi peristiwa yang sama. Kemudian diambil kesimpulan tentang model komunikasi lingkungan untuk mendukung sistem peringatan dini dari berbagai lembaga. Perbedaan penelitian Lestari dan penulis terletak pada fokus penelitian, dimana Lestari mengungkapkan model komunikasi lingkungan baru yang berangkat dari teori organisasi untuk meninjau lebih jauh untuk mendukung sistem peringatan dini yakni mitigasi bencana. Model komunikasi lingkungan yang dibuat semata-mata untuk membantu pemerintah daerah sekitar. Dari hasil penelitian tersebut Lestari mengungkapkan bahwa terdapat dua siklus manajemen komunikasi bencana yakni manajemen risiko dan manajemen krisis.

Penelitian keenam dilakukan oleh Indyah Hayu Iriyanti, tahun 2015, dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif Tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”. Dalam penelitian tersebut Iriyanti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball*. Selain itu penelitian Iriyanti berfokus pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana gunung api Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Dari penelitian tersebut Iriyanti menyimpulkan bahwa terdapat tiga hal implementasi yakni berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014, SOP dan *Mapping* Penanggulangan Bencana Gunung Api Kelud 2014 oleh Kecamatan Ngancar. Perbedaan penelitian Iriyanti dengan penulis terletak pada fokus

¹⁰ Intan Fatmasari, “Strategi Perencanaan Partisipasi Masyarakat Untuk Mitigasi Bencana Tsunami di Pesisir Pacitan Jawa Timur (Kasus Kelurahan Ploso dan Kelurahan Sidoharjo)” (Tesis, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015), Hal. 87.

penelitian. Penelitian Iriyanti befokus pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana sebuah lembaga. Iriyanti menggunakan disposisi sikap dan komitmen dari implementator untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dinyatakan oleh George Edward III. Dari hasil penelitian tersebut diungkapkan bahwa hasil implementasi kebijakan antara pelaksana dan penerima dikatakan berhasil karena menggunakan proses komunikasi yang efektif.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Titan Roskusumah, tahun 2013, dengan judul penelitian “Komunikasi Mitigasi Bencana oleh Badan Geologi KESDM di Gunung Api Merapi Prov. D. I. Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut Roskusumah menggunakan metode penelitian interaksionisme simbolik untuk membantu mengungkap fokus penelitian yakni bagaimana Badan Geologi KESDM dan masyarakat sekitar Gunung Merapi memaknai simbol bencana yang ada, diproses dalam pikiran (*mind*) yang mendorong diri (*self*) untuk melakukan interaksi melalui masyarakat.¹¹ Perbedaan penelitian Roskusumah dengan penulis terletak pada fokus riset dan teori yang digunakan oleh keduanya. Roskusumah mengambil fokus riset pada interaksi simbolik untuk mengungkap makna simbolik yang berada pada masyarakat sekitar lereng gunung berkaitan dengan unsur kepercayaan lokal, yang selanjutnya akan dipakai oleh Badan Geologi KESDM untuk melakukan sosialisasi tanggap bencana.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Tedi Setiadi, tahun 2015 dengan judul penelitian “Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Tanah Longsor, Mitigasi dan Manajemen Bencana di Kabupaten Banjarnegara”. Dalam penelitiannya Triadi menggunakan metode penelitian analisis kebutuhan sistem yang dimana proses pengambilan datanya diambil dari wawancara Bappeda Kab Banjarnegara. Fokus penelitian yang diambil oleh Triadi adalah membuat alat untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam membantu proses manajemen bencana dan mitigasi. Perbedaan penelitian Triadi dengan penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian Triadi berfokus pada Sistem Informasi Geografi (SIG) yang merupakan alat untuk mengelola input manajemen, proses dan output, yang dapat membantu proses mitigasi bencana dan manajemen bencana oleh pemerintah daerah.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Lisette Martine Braman, Maarten Krispijn Van Aalst, Simon J. Mason, Pablo Suarez, Youcef Ait-Chellouche and Arame Tall, tahun

¹¹. Roskusumah Titan, “Komunikasi Mitigasi Bencana Oleh Badan Geologi KESDM Di Gunung Api Merapi Prov. D. I. Yogyakarta” Jurnal lembaga Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, No. 1, Vol. 1 (Juni, 2013), hal. 63

2012, dengan judul “Climate Forecasts In Disaster Management: Red Cross Flood Operations In West Africa, 2008”. Penelitian tersebut berlokasi di Afrika Barat, dimana pada tahun 2007 mengalami banjir terparah sepanjang sejarah seperti yang dikatakan Martine dalam penelitiannya bahwa “*West Africa suffered the worst flooding in decades in 2007. More than 300 lives were lost and more than 800,000 people were affected as the floods destroyed crops*”.¹² Dalam penelitiannya Martine menggunakan wawancara pihak manajer dari International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) sebagai teknik pengambilan data. Selain itu penelitian Martine berfokus pada strategi IFRC dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir mendatang. Perbedaan penelitian Martine dan penulis terletak pada fokus riset. Penelitian Martine berfokus untuk mengungkap strategi IFRC dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir saja, dimana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peran kepemimpinan menjadi hal penting dalam mewujudkan manajemen bencana di daerah tersebut.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Victoria Basolo University of California, Irvine Laura J. Steinberg Southern Methodist University, Raymond J. Burby University of North Carolina at Chapel Hill, Joyce Levine Florida Atlantic University, Ana Maria Cruz European Commission, Joint Research Centre, Chihyen Huang Feng Chia University. Tahun 2008, dengan judul “The Effects of Confidence in Government and Information on Perceived and Actual Preparedness for Disasters”. Dalam penelitian tersebut Basolo mengangkat kasus bencana gempa bumi di Los Angeles dan bencana badai di Metropolitan New Orleans. Metode yang digunakan Basolo merupakan metode penelitian kuantitatif dengan mengambil informan yakni penduduk rumah tangga daerah sekitar Los Angeles dan New Orleans. Fokus penelitian yang Basolo ambil yakni kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan badai yang dialami pelaku rumah tangga di Los Angeles dan New Orleans. Perbedaan penelitian Basolo dengan penulis terletak pada fokus penelitian. Basolo memfokuskan penelitiannya pada persiapan apa saja dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh masyarakat di Los Angeles dan New Orleans. Dimana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa para rumah tangga mempercayai pemerintah sepenuhnya dalam mengelola kesiapsiagaan bencana yang presentasinya lebih tinggi dibandingkan kesiapsiagaan rumah tangga sendiri dalam menghadapi bencana alam.

Penelitian kesebelas dilakukan oleh Stacy L. Peerbolte & Matthew Lloyd Collins, tahun 2012, dengan judul “Disaster Management and The Critical Thinking Skills of Local

¹² Braman, Lisette Martine Braman, et.,al. “*Climate Forecasts in Disaster Management: Red Cross Flood Operations in West Africa, 2008,*” Journal Compilation, Volume. 37. (2013). p. 144-164.

Emergency Managers: Correlations With Age, Gender, Education, and Years In Occupation”. Penelitian Peerbolte dan Collins meneliti proses atau cara berpikir seorang manajer dari beberapa instansi seperti pemerintah dan lainnya dalam memberikan kesiapsiagaan bencana alam. Mereka gunakan alat bernama “Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal Short Form (WGCTA-S)” yang berfungsi untuk mengukur kemampuan berpikir kritis seseorang, meliputi (a) inferensi, (b) pengakuan asumsi, (c) deduksi, (d) interpretasi, dan (e) evaluasi argumen. Melalui e-mail atau telepon, sebanyak 70 informan dari 7 daerah menjadi sample penelitian tersebut. Perbedaan penelitian Peerbolte dan Collins dengan penulis terletak pada fokus penelitian. Peerbolte dan Collins memfokuskan penelitian pada cara berpikir seorang manajer dalam mengelola manajemen bencana, yang dimana mereka simpulkan bahwa *“baccalaureate education or higher helped to prepare individuals to think critically and that this strong foundation of cognitive skills would likely strengthen over time with practice-based experience”*.¹³

Penelitian keduabelas dilakukan oleh Sumaiya Sadeka, Mohd Suhaimi Mohamad, Mohammad Imam Hasan Reza, Jamiah Manap, dan Md. Sujahangir Kabir Sarkar, tahun 2015, dengan judul “Social Capital and Disaster Preparedness: Conceptual Framework and Linkage”. Dalam penelitian ini, fokus penelitian sudah sangat jelas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Sadeka memfokuskan penelitiannya dari sudut pandang psikiologi yang dimana mereka memberikan solusi yakni suatu metode atau konsep untuk membantu pemerintah dan LSM mengelola bencana. Dengan menggunakan konsep “*Social Capital*”. Konsep ini artinya *“social capital as “features of social organisation such as norms, networks and trust that facilitate cooperation and coordination for mutual benefit”. Fukuyama has analyzed the link between trust, social capital and national economic success. He defined social capital as “the ability”*.¹⁴

Banyaknya peluang penelitian mengenai mitigasi bencana dari berbagai bidang jurusan membuat sejumlah penulis terkadang meneliti dengan topik yang sama namun beda objek, bila dilihat dengan seksama sebenarnya sangat banyak peluang keunikan yang dapat diteliti dari topik mitigasi bencana, namun tidak banyak yang mengetahui keunikan peluang penelitian ini. Dari banyaknya hasil pencarian kata kunci yang sama yakni pada tahap pra bencana, dapat dilihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang

¹³ Stacy L Peerbolte & Matthew Lloyd Collins. “Disaster management and the critical thinking skills of local emergency managers: correlations with age, gender, education, and years in occupation”. *Journal Compilation*, Volume. 37. (2013), p. 48-60.

¹⁴. Sumaya Sadeka, et., al, “Social Capital and Disaster Preparedness: Conceptual Framework and Linkage” *Journal of The Social Science Researches*, Vol. 3 (2015), hal. 39-40.

akan penulis lakukan. Ada perbedaan yang sangat mencolok yakni terletak pada tahap fokus penelitian. sepuluh dari dua belas penelitian terdahulu hanya sampai pada tahap menjelaskan dan mengungkapkan kegiatan / strategi / upaya yang dilakukan baik dilihat dari sudut pandang lembaga pemerintahan, tempat wisata, ataupun dari masyarakat itu sendiri yang dilanjutkan pada tahap hasil yang mengungkapkan keberhasilan atau tidaknya strategi tersebut.

Hal ini berbeda dengan penulis, yang terlebih dahulu mengungkap strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Daerah yakni BPBD Magelang, selanjutnya akan mengungkap cara mereka menyampaikan informasi strategi mitigasi bencana kepada target. Pada tahap ini lah yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni, penulis akan menganalisis dan mengungkap keselarasan semua proses strategi mitigasi bencana dengan pola komunikasi yang digunakan.

Menurut penulis, perlunya menganalisis pada tahap mitigasi bencana merupakan suatu tolak ukur keberhasilan dalam sebuah manajemen komunikasi bencana, karena mitigasi merupakan tahap awal dalam sebuah tahapan manajemen bencana. Kemudian dipilihnya objek BPBD Magelang, untuk menelaah lebih dalam pemerintah daerah dalam menghadapi sebuah krisis. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru karena belum ada yang meneliti lebih dalam cara berpikir pemimpin dalam membuat keputusan strategi bencana yang disebut sebagai krisis.

1.5.2 Kerangka Teori

A. Bencana dan Mitigasi Bencana

Bencana merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari siapapun. Definisi bencana yang sering dipakai oleh ilmuan adalah definisi “bencana” menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) dan The United Nations (1992) yang mengatakan bahwa “bencana adalah suatu gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang berupa kerugian manusia, material, atau lingkungan yang luas melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak dan harus mereka hadapi menggunakan sumber daya yang ada pada mereka”.¹⁵ Bencana dapat terjadi akibat faktor alam, faktor manusia dan faktor hibrida. Bencana karena faktor alam disebut juga ‘tindakan tuhan’ atau ‘*act of God*’, bencana karena faktor manusia disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan bencana

¹⁵. Bevaola Kusumasari, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. (Yogyakarta: Gavamedia 2014) hal. 3

hibrida yakni bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia seperti penyakit yang menyebar di masyarakat atau virus yang menyebar di masyarakat.

Bicara mengenai bencana sepertinya tidak akan pernah kehabisan topik bahasan. Pasalnya bencana dapat terjadi di setiap belahan dunia, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1988 hingga pertengahan 2003 jumlah bencana di Indonesia mencapai 647 bencana meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan angin topan dengan jumlah korban jiwa yang sangat fantastis.¹⁶ Tidak heran bila pemerintah wajib mempunyai strategi untuk menghadapi bencana untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana itu sendiri. Penelitian ini memfokuskan kepada tahap mitigasi bencana, karena mitigasi bencana merupakan sebuah fondasi dalam membangun sebuah strategi, serta menyempurnakan proses tahapan manajemen bencana. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada konsep komunikasi bencana.

Membahas mitigasi bencana, sebenarnya tidak luput dari pandangan proses manajemen. Pasalnya mitigasi bencana sendiri merupakan salah satu dari bagian proses tahapan manajemen bencana. Seperti yang dijelaskan oleh Kusumasari bahwa “manajemen bencana moderen terdiri dari empat aktifitas yakni mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan.”¹⁷ Adapun pendapat yang sama, University of Wisconsin mendefinisikan manajemen bencana sebagai “the range of activities designed to maintain control over disaster and emergency situation and to provide a framework for helping at-risk persons to avoid or recover from the impact of disaster”.¹⁸ Definisi tersebut menjelaskan bahwa manajemen bencana merupakan rangkaian kegiatan darurat yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana dan mempersiapkan rencana dilakukan untuk menghindari atau mengatasi bencana. Jadi dapat dikatakan bahwa mitigasi bencana merupakan satu bagian yang sifatnya berkesinambungan dengan bagian lainnya yang terdapat pada tahapan manajemen bencana. Posisi mitigasi bencana pada tahapan manajemen bencana terletak pada posisi “pra bencana”. Sedangkan ketika membicarakan mengenai mitigasi bencana tentu saja tidak luput dari proses lainnya.

Mitigasi bencana sendiri didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan yang dilakukan dari awal untuk mengurangi atau meminilalkan dampak dari suatu peristiwa

¹⁶ Prof. Dr. Dr. Anies, M.Kes, PKK. Negara Sejuta Bencana: Identifikasi, Analisis, & Solusi Mengatasi Bencana dengan Manajemen Kebencanaan. (Yogyakarta: Ar-ruz -Media) hal.15

¹⁷ Bevaola Kusumasari, *Op.Cit.*, hal. 21

¹⁸ Prof. Dr. Dr. Anies, M.Kes, PKK. Negara Sejuta Bencana: Identifikasi, Analisis, & Solusi Mengatasi Bencana dengan Manajemen Kebencanaan. (Yogyakarta: Ar-ruz Media) hal.162

alam terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan”.¹⁹ Adapun definisi lain mengenai mitigasi bencana yakni “serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, terkait pembangunan fisik serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana” (PP Nomor 21 Tahun 2008).²⁰ Tidak hanya itu definisi lain serupa mengatakan bahwa mitigasi bencana adalah “tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi yang bertujuan untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan”.²¹ Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana merupakan landasan dari manajemen bencana berupa rangkaian dari strategi tindakan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh adanya suatu bencana yang memiliki sifat pencegahan sebelum kejadian.

Terdapat dua jenis mitigasi bencana yakni mitigasi bencana struktural dan mitigasi bencana non struktural. Mitigasi bencana struktural di definisikan sebagai usaha pengurangan resiko bencana berupa pembangunan atau perubahan lingkungan fisik. Mitigasi bencana struktural berwujud seperti benda-benda di sekitar lingkungan yang membutuhkan rancangan atau perhitungan seperti membangun tempat tinggal masyarakat, tempat tinggal, modifikasi infrastruktur, penanggulangan infrastruktur untuk keselamatan hidup dan lainnya. Dilakukannya mitigasi struktural adalah untuk membantu seluruh kerusakan infrastruktur.

Sedangkan mitigasi bencana nonstruktural didefinisikan sebagai upaya pengurangan resiko bencana berupa modifikasi proses perilaku manusia atau alam tanpa membutuhkan rancangan atau perhitungan.²² Mitigasi bencana non struktural dilakukan untuk memulihkan rasa trauma atau rasa takut atas terjadinya peristiwa besar, pasalnya masyarakat yang terkena bencana secara tidak langsung akan kehilangan rasa percaya diri, mengalami ketakutan, kehilangan keluarga dan sanak saudara, kehilangan tempat tinggal. Mitigasi bencana non struktural hadir untuk membantu menghibur korban bencana dan memulihkan rasa trauma akibat adanya bencana alam dengan berbagai cara seperti program pendidikan, membangun kesadaran masyarakat, serta pengendalian lingkungan.²³ Kedua jenis mitigasi bencana tersebut dilakukan untuk membantu menyempurnakan dan mendukung proses mitigasi bencana secara keseluruhan, karenanya kedua jenis mitigasi bencana sangat penting dalam membangun fondasi dari tahap manajemen bencana, sebab

¹⁹ *Ibid.*, hal. 168

²⁰ *Ibid.*, hal. 174

²¹ Bevaola Kusumasari, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. (Yogyakarta: Gavamedia 2014) hal 22.

²² *Ibid.*, hal. 23

²³ *Ibid.*,

pengelolaan bencana lebih mengutamakan upaya konkrit penyelamatan kemanusiaan. Oleh karenanya mitigasi bencana diharuskan berjalan dengan baik dan jika tidak, maka cara-cara atau strategi pelaksanaannya bisa saja justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap guncangan kemanusiaan baru terlebih lagi kepada masyarakat yang sedang dirundung sedih atau menderita trauma.

Dalam hal ini terdapat aktor yang berperan dalam pembentukan proses mitigasi bencana, yakni pemerintah. Seperti yang telah penulis sebutkan di awal bahwa posisi pemerintah disini sebagai regulator. Artinya pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap bencana meskipun bukan pemerintah yang menyebabkan bencana, secara gamblang tanggung jawab yang dimaksud adalah strategi penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana dan paska bencana, berupa perbaikan infrastruktur, pemulihan trauma, pengendalian lingkungan dan lainnya.

Seperti yang tercantum dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah Indonesia memiliki badan khusus yang menangani bencana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peran pemerintah daerah menurut Kusumasari adalah bahwa “Pemerintah daerah merupakan tingkat pemerintah yang paling dekat dengan konstituen/pemilih dan terlibat dalam penyediaan berbagai layanan yang memengaruhi kehidupan penduduk yang berada di wilayah kekuasaan secara hukum, melalui lembaga-lembaga yang disebut otoritas lokal”.²⁴ Dari pengertian tersebut sudah sangat jelas bahwa pemerintah daerah khususnya BPBD adalah tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, artinya lembaga tersebut secara khusus yang melayani masyarakat korban bencana, pemerintah daerah tidak hanya diposisikan sebagai regulator tetapi juga berperan sebagai penyedia layanan pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

B. Manajemen Komunikasi Bencana

Manajemen komunikasi bencana merupakan sebuah konsep yang didalamnya terdiri dari pengertian manajemen, komunikasi, dan bencana. Manajemen komunikasi bencana yang akan dibahas yakni pengaturan penanggulangan masalah bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, pendonor, dan lembaga swadaya masyarakat.²⁵ Dalam konsep tersebut, Lestari menjelaskan keterkaitan yang berkesinambungan antara manajemen dan komunikasi. Pasalnya di setiap kegiatan

²⁴ *Ibid.*, Hal. 58.

²⁵ Eko Harry Susanto, et.al., *Komunikasi Bencana. Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: ASPIKOM, 2011), Hal. 88

yang dilakukan manusia tidak luput dari proses komunikasi yakni proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, individu ke individu lain, dari individu ke kelompok, dari kelompok ke kelompok, dan dari kelompok ke individu secara timbal balik.²⁶

Begitu juga di dalam proses manajemen yang merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi. Adapun definisi lain mengenai manajemen yang dikemukakan oleh Cutlip & Centre yang menjelaskan bahwa proses manajemen terdapat empat tahap yakni *defining public problem, planning and programming, taking action and communication*, dan *evaluating the program*. Tahapan tersebut menunjukkan langkah-langkah bagaimana suatu organisasi pemerintah dapat menangani isu-isu yang berkembang.²⁷ Tahap Pertama *defining public problem* yakni mendefinisikan masalah. Dalam tahap ini, semua isu-isu yang berkembang atau permasalahan yang sedang terjadi diidentifikasi. Fakta-fakta tersebut berguna untuk membantu memecahkan masalah. Dalam kasus ini terjadinya bencana alam berupa Erupsi Gunung Merapi merupakan masalah besar yang akan dihadapi oleh suatu daerah khususnya bagi empat kabupaten yakni Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten Jawa Tengah untuk menangani masalah besar seperti ini perlu adanya kerjasama dari pihak lain.

Tahap ke dua *planning and programming* yakni perencanaan dan pemrograman. Menurut Cutlip & Centre perencanaan yang dimaksud adalah perincian secara teratur dan berurutan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pemrograman yang dimaksud adalah perincian waktu mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁸ Dalam hal ini peran suatu organisasi sangatlah penting untuk menentukan sebuah perencanaan dan pemrograman atau yang biasa disebut dengan strategi yang matang. Strategi tersebut dapat dimulai dari menentukan target sasaran, media yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan apa yang akan disampaikan dan siapa yang akan menyampaikan pesan tersebut. Untuk mendukung sebuah strategi, suatu organisasi perlu memiliki pengalaman dalam menangani suatu masalah besar, karena dengan berangkat dari pengalaman tersebut organisasi dapat menangani suatu masalah dengan lebih mudah.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Poppy Rulliana dan Ririh Dwiantari, “Strategi Public Relations Hotel Dalam Membentuk Citra Objek Wisata”. Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume.2, Nomor. 4 Januari (2015), Hlm 255-271.

²⁸ *Ibid.*,

Tahap ke tiga *takking action and communication* yakni mengambil tindakan dan komunikasi. Cutlip & Centre mengemukakan bahwa suatu organisasi dalam hal ini harus dapat melakukan “*acting responsively and reponsibly*” artinya suatu organisasi mau mendengarkan keinginan publik dan bertanggungjawab terhadap publik yang diwakilinya sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan.²⁹ Pada tahap ini suatu organisasi harus menentukan tindakan apa yang paling tepat diimplementasikan pada target sasaran. Dan bagaimana cara penyampaian pesan yang tepat pada target agar informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh target sasaran.

Tahap ke empat *evaluating the program* artinya mengevaluasi program. Cutlip & Centre mengemukakan bahwa tahap ini dilakukan, untuk mengukur keberhasilan kegiatan dari semua program yang telah disusun.³⁰ Pada tahap ini juga berguna untuk menilai mana kegiatan yang akan dilakukan lagi pada rencana berikutnya dan mana kegiatan yang tidak akan dilakukan pada rencana berikutnya. Selain itu evaluasi program juga berguna untuk merencanakan program lainnya yang mungkin sangat berpengaruh untuk mencapai target sasaran.

Di setiap kegiatan tersebut tentunya melibatkan proses komunikasi, tidak ada kegiatan yang tidak menggunakan proses komunikasi baik itu berupa simbol, makna, dan lainnya. Kedua penggabungan konsep tersebut bertujuan agar penanganan korban bencana berjalan dengan efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dari strategi yang telah dibuat berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan efisien yakni tugas yang telah dibuat kedalam sebuah strategi dijalankan dengan terorganisir, sesuai dengan rencana. Jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen komunikasi bencana adalah adanya kepemimpinan yang proaktif, mempunyai sense of crisis dan tidak melupakan birokrasi yang ada serta didasari adanya hubungan antara manusia yang baik.³¹

Peran komunikasi didalam manajemen komunikasi bencana sangatlah penting untuk mendukung tahapan manajemen agar tetap optimal dan berjalan dengan baik. Komunikasi dalam manajemen, artinya komunikasi yang disampaikan dan diterima oleh masyarakat menjadi dasar pelaksanaan tindakan tertentu.³² Hal itu didukung oleh pernyataan Haddow dan Haddow yang mengatakan bahwa, “Komunikasi bencana merupakan arus perencanaan dan pengendalian informasi yang disampaikan sebelum,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*, Hal. 89

³² *Ibid.*, Hal. 91

selama, dan setelah terjadi bencana”.³³ Haddow dan Haddow juga menjelaskan untuk membangun komunikasi bencana yang efektif dibutuhkan adanya transparansi, peningkatan kredibilitas, kepercayaan, dan keandalan dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah maupun media perlu dirangkul agar informasi yang diberikan berjalan dengan efektif.³⁴

Terdapat sebuah gambaran atau konsep yang di cetuskan Lestari bahwa “hal yang paling utama dalam sebuah konsep komunikasi bencana adalah sebuah proses kepemimpinan”.³⁵ Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang top manajer dalam menghadapi suatu krisis, karena bencana merupakan sebuah krisis. Seorang pemimpin seharusnya bisa lebih siap dan sigap untuk menghadapi bencana, menggunakan cara mereka berpikir logis dan tepat dalam menghadapi suatu krisis. Untuk itu seorang pemimpin harus mempunyai sikap proaktif, birokratif yakni kecepatan pemerintah dalam mengembangkan informasi, *serta sense of crisis* yakni rasa tanggung jawab dan simpati terhadap suatu krisis.

Dalam kepemimpinan suatu krisis terdapat komponen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, yakni kedaruratan bencana, infrastruktur, dan sumber daya yang ada. Letari menjelaskan bahwa, kedaruratan bencana termasuk ke dalam tolak ukur pengalaman seorang pemimpin dalam menghadapi bencana, intensitas seorang pemimpin dalam menghadapi bencana sebelumnya, dan mengetahui berbagai jenis bencana dan cara penanggulangannya³⁶. Kemudian Lestari menjelaskan bahwa, infrastruktur ke dalam tolak ukur ketersediaan sarana komunikasi yang memadai, distribusi informasi yang cepat terus menerus, serta sarana transportasi bagi peristiwa pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.³⁷

Sedangkan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada Lestari mengatakannya sebagai tolak ukur ketersediaan tenaga kerja dalam menghadapi situasi darurat, serta keadaan keuangan dalam membantu proses berjalannya rencana. Ketiga komponen tersebutlah yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin dalam menghadapi peristiwa krisis.³⁸ Agar bagaimana seorang pemimpin dapat mengkombinasikan ketiga komponen secara bersamaan namun tetap terarah dan tepat dalam kemampuan berpikirnya dan

³³ George D. Haddow dan Kim S. Haddow, *Disaster Communications Changing Media World* (United States of America: Elseiver Inc., 2009) Hal. xviii

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Eko Harry Susanto, et.al., *Op.Cit.*, Hal. 89

³⁶ *Ibid.*, Hal. 90

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

mengambil keputusan yang dibentuknya kedalam sebuah strategi. Aktor dalam komunikasi bencana yakni Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Magelang yang berperan untuk mengawasi kinerja serta merumuskan kebijakan. Serta Kepala Bagian Mitigasi Bencana yang merumuskan strategi mitigasi bencana, selain itu terdapat juga masyarakat sekitar yang terkena dampak.

C. Pola Komunikasi

Pada teori sebelumnya, terdapat keterkaitan satu sama lain antara teori mitigasi bencana dan teori manajemen komunikasi bencana. Mitigasi bencana dikatakan sebagai upaya pengurangan resiko bencana, dalam sebuah kegiatan pengurangan resiko bencana tentu membutuhkan proses manajemen. Terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Proses manajemen tersebut tidak luput dari proses komunikasi yakni proses menyampaikan pesan, yang menjadi arus pengendalian informasi yang disampaikan sebelum, selama dan sesudah bencana. Arus informasi tersebut membentuk sebuah jaringan komunikasi. Yang dimaksud dengan jaringan komunikasi menurut Devito adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lainnya, saluran tersebut dapat berupa benda atau subjek.³⁹

Jaringan komunikasi ini dipandang sebagai pola yang tetap, dan diformalkan oleh sebuah organisasi, kelompok, instansi sebagai sebuah sarana komunikasi. Devito menjelaskan pola komunikasi termasuk kedalam bentuk struktur dan penerapan secara nyata dalam sebuah kelompok, organisasi, atau instansi.⁴⁰ Pola komunikasi tersebut dibagi menjadi lima struktur, pertama, struktur lingkaran Devito menyatakan bahwa, struktur lingkaran tidak memiliki pemimpin. Mereka memiliki wewenang dan kekuatan untuk mempengaruhi kelompoknya, serta sesama anggota lainnya dapat berkomunikasi namun hanya pada dua orang lain di sisinya.⁴¹ Dari pernyataan tersebut didalam pola komunikasi struktur lingkaran tidak ada sistem komando yang memusatkan pada satu orang, namun semua anggota dapat saling berinteraksi pada dua orang lain di sisinya. Kedua, struktur roda Devito menjelaskan bahwa memiliki struktur yang jelas, yakni yang diposisi pusat. Pernyataan tersebut menjelaskan adanya sistem kepemimpinan yang hanya terfokus disatu titik atau disatu orang saja. Dengan kata lain setiap anggota hanya berkomunikasi dengan

³⁹. Joseph A Devito. Komunikasi Antar Manusia Kuliah Dasar. *Terj*, Agus Maulana. (Vol.5 Jakarta: Professional books 1997) hal.382

⁴⁰. *Ibid.*,

⁴¹. *Ibid.*, hal. 383

satu pemimpin, jika anggota lain ingin berkomunikasi dengan anggota lainnya maka pesan disampaikan harus melalui pemimpin tersebut.⁴²

Ketiga, struktur “Y” menurut Devito, struktur “Y” lebih tersentralisasi dibandingkan dengan pola lainnya, karena struktur “Y” memiliki dua pemimpin. Pemimpin pertama adalah seorang pemimpin yang jelas dan posisinya berada dipusat. Pemimpin kedua seolah berperan sebagai *back up* pemimpin pertama, karena pemimpin kedua ini dapat menerima pesan dari pemimpin pertama maupun anggota.⁴³ Keempat, struktur rantai menurut Devito, struktur rantai hampir sama dengan struktur lingkaran, namun struktur rantai memiliki ujung yang terputus. Sehingga orang yang berada paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Struktur rantai juga memiliki sistem kepemimpinan yang terpusat yakni orang yang berada ditengah.⁴⁴ Kelima, struktur semua saluran menurut Devito, struktur semua saluran hampir sama dengan struktur lingkaran, namun struktur semua saluran lebih fleksibel dalam menyampaikan pesan, karena dari satu orang ke orang lainnya dapat berkomunikasi tanpa terhalang oleh seorang pemimpin.⁴⁵

Selain pola komunikasi Devito menjelaskan arus komunikasi, yakni arus komunikasi ke atas dan arus komunikasi ke bawah. Arus komunikasi ke atas menurut Devito adalah pesan yang dikirim dari tingkat hirearki paling bawah menuju tingkat hirearki paling atas. Arus komunikasi ini baik untuk membuat bawahannya merasa dari bagian perusahaan atau organisasi. Namun biasanya arus komunikasi ke atas membuat bawahan enggan untuk mengirim pesan negatif pada atasannya sehingga, pesan yang disampaikan tidak sampai kepada atasan.⁴⁶ Sedangkan komunikasi ke bawah menurut Devito adalah, pesan yang dikirim dari tingkat hirearki yang lebih tinggi menuju tingkat hirearki yang paling rendah. Hal itu baik dalam memotivasi semangat kerja bawahan untuk lebih giat dalam bekerja. Namun, sering kali atasan kurang memahami bagaimana cara pesan yang mereka berikan dapat dipahami oleh bawahan.⁴⁷ Oleh karena itu, penulis memilih teori-teori tersebut karena satu sama lain memiliki keterkaitan, sehingga dapat membantu penulis dalam penarikan kesimpulan.

⁴² *.Ibid.,*

⁴³ *Ibid.,*

⁴⁴ *Ibid.,*

⁴⁵ *Ibid., hal. 348*

⁴⁶ *Ibid., hal. 385*

⁴⁷ *Ibid., hal. 386-387*

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif sebagai pendekatan. Bila membicarakan mengenai pendekatan kualitatif terdapat banyak definisi, namun penulis hanya mengambil tiga definisi penelitian kualitatif. Pertama, Krirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁴⁸ Definisi tersebut dengan jelas mengatakan penelitian kualitatif bergantung dari pengamatan pada manusia sebagai subjeknya.

Ke dua, (Denzin dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁹ Ketiga, menurut (Jane Richie) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁵⁰ Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh manusia sebagai subjek, misalnya dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti, yang disajikan dalam bentuk kata-kata deskripsi dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang ada.

1.6.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 74 Kota Mungkid, Magelang, Jawa Tengah.

1.6.3 Pemilihan Narasumber

Untuk gambaran narasumber, penulis membagi dua kelompok narasumber yakni BPBD dan pihak lain yang berarti stakeholder. BPDB yang diteliti yakni BPBD Magelang, sedangkan stakeholder yang diwawancarai adalah masyarakat sekitar gunung Merapi yakni Desa Kalibening Kecamatan Dukun, Desa Adikarto dan Desa Tanjung Kecamatan

⁴⁸ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya 2015). Hal. 5

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hal.6

Muntilan, Serta Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI). Alasan penulis memilih narasumber diatas, karena dianggap relevan dengan penelitian ini dan diharapkan narasumber tersebut dapat membantu dan mempermudah proses pengambilan data.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi Semi Partisipatif

Observasi dilakukan pada saat acara simulasi dan pelatihan berlangsung di kantor BPBD Magelang, pada tanggal 16-18 November 2017. Peserta yang hadir berjumlah 30-50 orang, berasal dari tiga desa yakni Desa Kalibening Kec. Dukun, Desa Tanjung Kec. Muntilan dan Desa Adikarto Kec. Muntilan yang tergabung dalam OPRB. Selama observasi, penulis mengikuti setiap kegiatan untuk mengamati kemampuan peserta dalam menerima ilmu, baik berupa pengetahuan maupun berupa simulasi kegiatan. Penulis memilih memalukan observasi adalah untuk mendukung data wawancara, serta memperkuat data secara realita. Proses pengamatan ini diketahui secara terbuka oleh warga desa dan BPBD Maglang untuk memudahkan penulis mendapatkan segala jenis informasi.

B. Wawancara Semi Terstruktur

Penulis melakukan wawancara secara terbuka dimana subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dari tujuan diwawancarai, namun tetap terstruktur. Artinya, dalam proses wawancara penulislah yang memegang kendali dalam menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Seperti yang telah penulis lakukan pada saat pengambilan data, wawancara dilakukan secara *indepth interview* atau wawancara mendalam dengan narasumber untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Penulis membagi pertanyaan menjadi tiga sub judul yakni pertanyaan mengenai mitigasi bencana, pertanyaan mengenai cara mengkomunikasikan mitigasi bencana, dan pertanyaan mengenai tanggap darurat.

Tabel 1.1 Narasumber Penelitian

No	Nama	Instansi	Waktu Wawancara
1.	Ir. Gunawan Iman Suroso, M.M.	BPBD Magelang	26 Oktober 2017 13.30 WIB
2	Mhd Muzamil, S.K.M.	BPBD Magelang	26 Oktober 2017 11.25 WIB

3	Didik Wahyu Nugroho, S.T	BPBD Magelang	4 November 2017 13.36 WIB
4	Ibu Ati	OPRB Desa Adikarto	18 November 2017 13.22 WIB
5	Bapak Alam	OPRB Desa Adikarto	17 November 2017 10.19 WIB
6	Bapak Suwarno	OPRB Desa Kalibening	17 November 2017 13.11 WIB
7	Ibu Yuli	OPRB Desa Kalibening	17 November 2017 09.22 WIB
8	Ibu Kodir	OPRB Desa Tanjung	17 November 2017 10.55 WIB
9	Ibu Ani	OPRB Desa Tanjung	17 November 2017 08.44 WIB
10	Sinam M Sutarno	Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI)	16 Februari 2018 16.12 WIB

C. Dokumen Pendukung

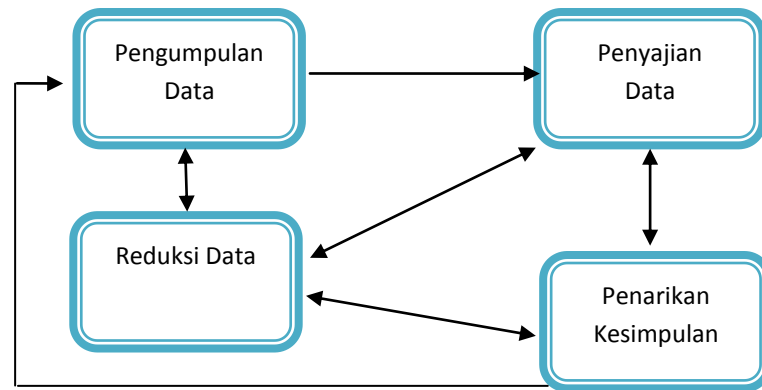
Penulis mengumpulakan dokumen pendukung secara acak, dimana sumber informasi ini penulis ambil dari mana saja. Dokumen pendukung yang penulis dapatkan selama proses pengambilan data diantaranya: Pertama, foto kegiatan diambil pada saat penulis melakukan observasi lapangan. Kedua, rekaman wawancara diambil pada saat penulis melakukan wawancara kepada narasumber. Ketiga, berkas presentasi sosialisasi, simulasi dan pelatihan dalam bentuk *power point*. Dan keempat sumber tertulis yang didapatkan dari *website* resmi BPBD Magelang.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Taylor (1975:79) mengatakan bahwa analisis data merupakan, “proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja”.⁵¹ Artinya, analisis data merupakan proses pengelompokan dan pengelolaan data berupa foto, catatan, dokumen dan lainnya. Bertujuan untuk menemukan

⁵¹ *Ibid.*, Hal.280

hipotesis kerja, agar dapat menarik kesimpulan dari sebuah penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman biasanya disebut sebagai model interaktif. Model ini memiliki tiga tahapan yakni (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman menggambarkan model interaktif sebagai berikut.



Bagan 1.2 Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman (1992)

A. Reduksi Data

Penulis memilih dan memilah semua data yang telah peneliti peroleh berdasarkan kebutuhan penulis. Peneliti memilah dengan cara menggolongkan data yang dibutuhkan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah peneliti buat sebelumnya, serta membuang data yang tidak dibutuhkan. Dengan reduksi data membuat peneliti jadi lebih mudah dalam penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

B. Penyajian Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, penulis memaparkan data tersebut kedalam bentuk narasi dan bagan untuk memudahkan pembaca dalam menerjemahkan informasi. Pada tahap penyajian data penulis harus teliti dan mencermati data yang telah digolongkan agar yakin bahwa semua informasi dapat dipaparkan atau disajikan dengan baik. Proses ini dapat memudahkan penulis menemukan kesimpulan data.

C. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan tahap reduksi data dan penyajian data, maka penulis dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian ini. Diharapkan dengan adanya

kesimpulan ini pembaca dapat memahami inti dari penelitian yang menjadi temuan baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya.

BAB II

DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. Sejarah Erupsi Gunung Merapi 2010

Pada bab ini penulis akan menceritakan kembali secara singkat peristiwa terjadinya erupsi merapi 2010. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan empat Kabupaten yakni Kabupaten Sleman, Provinsi D I Yogyakarta. Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali Provnsi Jawa Tengah. Gunung Merapi yang merupakan Gunung teraktif di Indonesia ini pada tahun 2010 mengalami erupsi besar dalam kurun waktu 140 tahun terakhir yang berlangsung selama 11 hari antara 26 Oktober hingga 5 November. Gunung Merapi memiliki empat tingkatan status yakni aktif normal, waspada, siaga dan awas.

Adapun deskripsi mengenai tingkatan status merapi. Aktif normal, pada tingkatan ini aktivitas Gunung Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian erupsi. Waspada, pada tingkatan ini aktivitas Gunung Merapi tidak selalu diikuti aktivitas lanjut mengarah pada erupsi, tetapi dapat kembali pada keadaan normal. Siaga, pada tingkatan ini aktivitas Gunung Merapi baik secara instrumental maupun visual semakin jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas G.Merapi dapat diikuti oleh erupsi. Awas, tingkatan ini terlihat bahwa secara instrumental maupun visual cenderung menunjukkan fase yang sedang memasuki erupsi utama.⁵²

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan yang dilakukan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Kegunungapian Geologi (BPPTKG) Yogyakarta yang dirilis pada 21 Oktober disampaikan melalui *web esdm.go.id* yakni sebagai berikut:

“Pada tanggal 20 September 2010 status aktivitas merapi di naikkan dari aktif normal (level I) menjadi waspada (level II). Oleh karena itu adanya peningkatan jumlah gempa multiphase tercatat rata-rata sebanyak 38 kali/hari dan gempa vulkanik 11 kali/hari. Pada akhir september 2010 aktivitas kegempaan cenderung meningkat. Rata-rata gempaMP (multiphase) terjadi 38 kali/hari, VA (gempa vulkanik dalam) 5 kali/hari, dan VB (gempa vulkanik dangkal) 4 kali/hari, serta guguran 4 kali/hari”.⁵³

⁵² Niswanta., Erupsi Gunung Api Merapi 2010 Pemantauan, Penanggulangan dan Peran Masyarakat. “Manajemen Komunikasi Waktu Penunjang Keberhasilan Mitigasi Bencana G.Merapi”. (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) Hal. 83

⁵³ *Ibid.* Hal. 84

Pada saat informasi tersebut di keluarkan oleh PVMBG daerah yang berada pada radius 10 kilometer dari puncak Gunung Merapi dinyatakan sebagai daerah yang berbahaya untuk dihuni oleh karena itu direkomendasikan kepada warga desa untuk mengosongkan desa dan tempat tinggalnya.

*“Pada awal bulan Oktober 2010 aktivitas kegempaan semakin meningkat, rata-rata gempa MP 150 kali/hari, VA 4 kali/hari, VB 13 kali/hari, serta guguran 29 kali/hari. Pada tanggal 17 Oktober 2010 jumlah gempa vulkanik terjadi sebanyak 58 kali/hari (VA=15 kali dan VB=41 kali). Tanggal 20 Oktober 2010 seismisitas meningkat semakin tajam yakni terjadi gempa MP sebanyak 479 kali, gempa vulkanik (VA/VB) terjadi 39 kali dan gempa guguran 85 kali. Pada tanggal 21 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB status G. Merapi dinaikkan menjadi siaga (level III)”*⁵⁴.

Pada saat itu berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh PVMBG sektor utara dan barat Gunung Merapi tidak terjadi perubahan deformasi yang signifikan. Perubahan deformasi yang signifikan mengindikasikan pada sektor selatan Gunung Merapi merupakan daerah yang lebih rawan dibandingkan dengan sektor lainnya.

*“Pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul 06.00 WIB Kepala PVMBG Badan Geologi Menaikan status aktivitas Merapi menjadi awas (level IV). Sehari setelah dinaikkan status menjadi awas, 26 Oktober 2010 pukul 17.02 WIB Gunung Merapi mengeluarkan awan panas selama 9 menit, yang dilanjutkan hingga pukul 18.54 WIB diikuti oleh tidak kurang dari 7 kali awan panas dengan durasi waktu masing-masing antara 2 – 33 menit. Disamping itu juga terdengar adanya suara gemuruh dari pos pengamatan G. Merapi Jarakah dan Selo pada pukul 18.00-18.45 WIB. Disusul suara dentuman sebanyak 3 kali yang terjadi pada pukul 18.10, 18.15 dan pukul 18.25 WIB”*⁵⁵.

Erupsi terjadi pada saat malam hari sehingga membuat seluruh pos pengamatan tidak dapat mengamati secara jelas mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian dilaporkan mengenai hujan kerikil dan hujan abu terutama di daerah Barat Daya Merapi pada pukul 19.00 WIB.

*“Pada tanggal 1 November 2010 Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas. Aktivitas Gunung Merapi terus mengalami peningkatan sehingga pada tanggal 3 November 2010 Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas secara beruntun. Tidak berhenti disitu, pada tanggal 4 November 2010 pada pukul 22.30 WIB dilaporkan adanya guncangan gempa lokal yang sudah terjadi puluhan kali di sekitar kawasan Gunung Merapi”*⁵⁶.

Pada tanggal 5 November 2010 yakni hari Jumat sekitar pukul 00.00 WIB terdengar gemuruh hebat dari puncak Merapi yang mengguncangkan wilayah sekitar

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* Hal.85

gunung api tersebut. tidak lebih dari 5 menit setelah itu sirine tanda bahaya berbunyi bersahut-sahutan di seluruh wilayah Kecamatan Cangkringan yang berjarak antar 15-17 km dari pusat erupsi. Pukul 01.30 WIB, hujan kerikil terjadi hingga kawasan kota Yogyakarta diantaranya Taman siswa, Sorosutan, hingga Bantul. Pukul 02.30 WIB kota Yogyakarta dipenuhi abu vulkanik yang mengakibatkan gelap gulita dan minimnya jarak pandang. Pada pukul 05.59 WIB adanya laporan banyaknya korban jiwa mencapai 40 orang, puluhan lainnya mengalami luka bakar.⁵⁷

Hal itu dibenarkan oleh Habibi relawan Jalin Merapi, bahwa yang terjadi pada saat Merapi mengalami puncak letusannya. Dari awalnya kondisi kontras antara kota Yogyakarta dan daerah lereng Merapi mendadak DIY, Klaten di timur, Muntilan di barat dan Boyolali di utara. Bahkan Depok, Bogor dan Bandung Jawa Barat merasakan dampak letusan erupsi Merapi. Abu vulkanik dirasakan oleh daerah yang terkena hembusan angin yang membawa material merapi. Hari itu semua orang baru menyadari bahwa mereka benar-benar dalam situasi bencana yang tidak main-main. Warga yang mengungsi pada hari itu jumlahnya mencapai lebih dari 120.000 dengan pola yang tersebar.⁵⁸

Jumlah pengungsi yang terus bertambah membuat sejumlah pos pengungsian yang tersebar di berbagai tempat seperti di stadion sepak bola, gedung olah raga, gedung pemerintah dan fasilitas publik lainnya penuh. Namun, jumlah pengungsi lebih banyak tersebar di rumah-rumah warga di berbagai wilayah hingga kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Begitupun dengan Jawa Tengah pengungsi dikabarkan tersebar hingga Kabupaten Semarang dan Temanggung. Sejak saat itu menurut Habibi, penanganan distribusi bantuan menjadi krusial terutama terkait dengan keefektifan dan tingkat jangkauan yang tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan.⁵⁹

Relawan lain membenarkan situasi kontras yang terjadi pada tempat pengungsian di Stadion Maguwoharjo, Nazaruddin menuturkan banyak mendengar keluhan dari pengungsi. Salah satunya cerita mengenai nenek Harti yang mengantri hingga tiga kali berharap mendapatkan jarik atau kain batik bawahan, namun nenek tersebut harus gigit jari karena terhalang oleh faktor usia dan peraturan yang membuat pengungsi bingung. Menelusuri lebih lanjut ternyata pengungsi yang mendapat bantuan di sayap utara lebih makmur dibandingkan sayap selatan yang mendapatkan lebih sedikit bantuan. Hal itu

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Muzayn Nazaruddin, *et.al. Jurnalisme Warga, Radio Republik dan Pemberitaan Bencana*. Rev.ed. (Yogyakarta: Komunikasi UII, 2011). Hal 15-16.

⁵⁹ *Ibid.* Hal.16-17

disebabkan oleh adanya prosedur yang berbelit-belit, sehingga antara sayap utara dan selatan mengalami “kecemburuan sosial” terhadap penerimaan bantuan.⁶⁰

Tidak hanya itu keluhan yang dialami penyintas nampaknya sepele, namun bagi individu tertentu itu sangat penting. Seperti kakek berumur 87 tahun yang rindu dengan “rokok linting”. Rokok tembakau yang beliau linting sendiri dengan baret dan kertas rokok yang sulit ditemukan ketika berada di tempat pengungsian. Hal sepele tersebut pasti akan luput dari pemberi bantuan karena pemberi bantuan biasanya hanya memberikan bahan pokok atau umum. Semakin lama mereka tinggal maka, kebutuhan penyintas terus bertambah. Sehari, dua hari, tiga hari penyintas menerima bila hanya mendapatkan kebutuhan primer, namun ketika sudah mencapai seminggu, dua minggu dan seterusnya mereka pasti akan mencari kebutuhan sekunder untuk kepuasan pribadi.⁶¹

Keluhan lain dirasakan oleh Mbah Karto, salah seorang warga Wukirsari yang merasakan kejenuhan yang dialami selama mengungsi. Beliau merasa bosan tinggal di tempat pengungsian, beliau mersa lebih nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Rasa bosan itu hadir karena beliau merasa tidak nyaman dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan orang-orang baru. Tidak hanya itu, penyintas yang mayoritas petani terbiasa dengan bercocok tanam harus kehilangan pekerjaan pokok mereka karena lahan yang rusak akibat abu vulkanik yang meluluh lantakan perkebunan mereka. Untung saja pada saat itu Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Jalin Merapi dan Radio Republik Indonesia (RRI) menggelar pertunjukan “Wayang Tingklung” dihadiri oleh dalang Ki Mardi Kenci yang membawakan lakon Begawan Kilat Begana. Sehingga pertunjukan itu berhasil menghibur penyintas yang sedang bosan pada saat itu.⁶²

Itu hanya sebagian kecil permasalahan di tempat evakuasi publik, hal berbeda di rasakan oleh penyintas yang mengungsi di rumah warga di berbagai kota. Salah satunya Ninik kedatangan 37 saudaranya dari Suruh, Serumbung, Magelang. Ninik warga Muntilan justru hanya sekali mendapatkan bantuan pada awal pengungsian, hari selanjutnya ia tidak mendapatkan bantuan lagi. Akhirnya, penyintas yang menginap di rumah Ninik berinisiatif kembali ke rumahnya masing-masing untuk membawa bahan makanan yang mereka punya

⁶⁰ *Ibid.* Hal. 67-68

⁶¹ *Ibid.* Hal. 69-70

⁶² *Ibid.* Hal. 127-129

seperti singkong, beras dan sebagainya. Ternyata menurut penyintas ada rasa “pakewuh” atau segan, merasa tidak enak, merasa tidak nyaman khawatir merepotkan tuan rumah.⁶³

2.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang

Pada tahun 2010 saat terjadinya bencana besar yakni erupsi Gunung Merapi, BPBD Magelang belum terbentuk. Seperti yang dijelaskan oleh Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD. Pada saat itu badan pemerintah yang menangani bencana yakni Penanggulangan Bencana (PB) menjadi satu dengan Badan Kesatuan Bangsa (KESBANG) yang pada saat itu disebut sebagai KESBANG dan PB yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana. Badan itu bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah dan menangani penanggulangan bencana. Di struktur organisasi, bagian khusus yang menangani bencana dipegang oleh seorang kepala seksi.

“Ketika itu terjadi pengungsian yang kurang teratur BPBD juga belum terbentuk masih jadi satu sama KESBANGPOL yaitu KESBANG dan PB penanggulanganbencananya seorang kepala seksi”(Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Ketika terjadi bencana erupsi Gunung Merapi seorang Kepala Seksi Penanggulangan Bencana untuk memberikan komando kepada dinas lain untuk meminta bantuan menangani bencana mengalami kesulitan karena terhalang garis komando. Seorang Kepala Seksi Penanggulangan Bencana tidak bisa secara langsung memerintah dinas lain karena posisinya KESBANG dan PB sejajar dengan SKPD lainnya. Adanya kendala pada sistem koordinasi membuat sistem pengungsian pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi menjadi tidak teratur.

“sehingga kemampuan untuk mengkordinasikan. Kepala seksi kok merintah DPU ini dibeginikan ya kepala PU nya kan gak mungkin. Terus ke Dinas Sosial, kepala seksi kok, ya gak berani.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Sehingga berkaca dari pengalaman menangani bencana erupsi Gunung Merapi, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 2011, setingkat dengan Sekretaris Daerah. Dimana pada saat terjadinya bencana BPBD dapat mengkoordinasikan kepala dinas lainnya untuk membantu menangani bencana di daerah tersebut. BPBD memiliki unsur komando karena Kepala BPBD adalah Sekretaris Daerah yang menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang secara *ex-officio* (jabatan

⁶³ *Ibid.* Hal, 71

pada lembaga tertentu karena memiliki wewenang dari lembaga lain). Sekretaris Daerah ini berada dibawah tanggungjawab Bupati

“Maka dari itu dibentuklah BPBD setingkat Sekda, kepala BPBD adalah pak Sekda ex-officio, makanya disini diserahkan Kalaksa (Kepala Pelaksana BPBD) kepala BPBDnya ex official pak Sekda dalam arti bahwa Kepala BPBD mempunyai kemampuan mengkoordinasikan kepala-kepala dinas yang lain.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Adapun pengertian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang adalah badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, serta mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.⁶⁴ BPBD Magelang sebagai badan pemerintah yang secara teknis bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, yang terjun secara langsung ke lapangan setelah memperoleh rekomendasi dari unsur pengarah kebencanaan. Adapun tugas BPBD Magelang yakni sebagai berikut.

1. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
3. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi BPBD Magelang yakni sebagai berikut;

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatann penanggulangan bencana serta terencana, terpadu dan menyeluruh.⁶⁵

⁶⁴ “Tugas Pokok dan Fungsi”. <http://bpbd.magelangkab.go.id/v2/home/detail/tupoksi/95> (Diakses 6 Maret 2018)

⁶⁵ *Ibid.*

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki visi yaitu Mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang tangguh dalam menghadapi bencana demi terciptanya kondisi yang semakin sejahtera, maju dan amanah (SEMANAH). Sedangkan misi BPBD Magelang yakni sebagai berikut:

1. Mengembangkan tata kelola dan memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Membangun kerjasama dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan penanggulangan bencana.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara profesional, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Meningkatkan upaya-upaya penaggulangan bencana baik pada kondisi sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana.
5. Melindungi masyarakat dan aset-aset yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang dari ancaman bencana.⁶⁶

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dimulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Unsur Pelaksana yaitu Edy Susanto, Sekretaris yaitu Ratna Yulianty, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu Gunawan Iman Suroso, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu Supranowo, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu Jayadi Imam Nugroho.

⁶⁶ “Visi dan Misi”. <http://bpbd.magelangkab.go.id/v2/home/detail/visi-misi/102> (Diakses 30 Mei 2017)



Bagan 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Magelang
(sumber: Website resmi BPBD Magelang <http://bpbk.magelangkab.go.id/v2/>
Diakses tanggal 30 Mei 2017)

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan temuan penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dari tanggal 20 Oktober 2017 hingga tanggal 18 November 2017. Observasi dilakukan pada saat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BPBD Magelang. Sedangkan wawancara dilakukan di sela-sela kegiatan. Kegiatan observasi dilakukan sesuai jadwal acara yang telah ditentukan oleh BPBD Magelang, sedangkan wawancara dilakukan dengan jadwal yang ditentukan oleh narasumber. Penulis akan membaginya kedalam empat tahap sesuai dengan teori manajemen komunikasi. tahap pertama yakni mendefinisikan masalah (*defining public problem*), penulis akan memaparkan permasalahan yang terjadi pada tahap pra bencana dan saat bencana. Tahap ke dua yakni perencanaan dan program (*planning and programming*), penulis akan menjelaskan perencanaan strategi yang telah dibuat oleh BPBD Magelang untuk menanggulangi bencana Erupsi Merapi. Tahap ke tiga yakni implementasi (*taking action and communication*), penulis akan memaparkan program-program atau tindakan yang selama ini telah dilakukan BPBD Magelang. Tahap ke empat yakni evaluasi program (*evaluating the program*), penulis akan menilai program-program BPBD Magelang yang tergabung kedalam strategi pra bencana dan tanggap darurat.

3.1. Situasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi BPBD Magelang

Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Magelang melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Berkaca dari pengalaman 2010, dimana pada saat menangani bencana erupsi Gunung Merapi terjadi kesemrawutan yang menyebabkan banyak korban jiwa. Penyebab adanya kesemrawutan karena besarnya ancaman Gunung Merapi, akibat dari besarnya ancaman Gunung Merapi yang pada mulanya diperkirakan semburan awan panas hanya sampai pada sektor barat dan barat daya Kabupaten Magelang, sehingga hanya 4 desa yang dievakuasi berjumlah 8-12 ribu jiwa. Namun ketika tanggal 4 November malam hari, awan panas sudah sampai melebihi 20 km di sektor selatan membuat warga desa berlarian menyelamatkan diri, sehingga jumlah penyintas bertambah menjadi 89 ribu jiwa. Seperti yang dikatakan oleh Didik mengenai pengalaman 2010.

“terjadi kesemrawutan 1. Besarnya ancaman. 2. Karena ancamannya membesar maka warga yang harus dievakuasi itu juga berlipat jadi kalau kita evakuasi 4 desa

saja itu di angka 8000an yg 4 desa ini tidak semua dusun masuk, hanya beberapa dusun yang paling terancam, terutama yang dipinggir alur-alur sungai itu angka 8-12 ribu, tapi begitu terjadi erupsi malam tanggal 4 November itu hampir awan panas udah mencapai 15 km lebih di sektor selatan, otomatis tadinya tidak terancam mereka akan menyingkir bahkan lebih dari jarak 20 kilo itu banyak yang ngungsi, nah itulah banyak terjadi kesemrawutan disitu sehingga puncak pengungsi itu mencapai angka 89 ribu.” (Wawancara Didik, 4 November 2017)

Berangkat dari pengalaman tersebut BPBD Magelang telah menyiapkan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana yakni mitigasi bencana. Jenis pengurangan resiko bencana dibagi menjadi dua yakni mitigasi bencana secara fisik dan mitigasi bencana non fisik. Mitigasi bencana secara fisik atau yang akrab disebut sebagai mitigasi struktural merupakan usaha pengurangan resiko bencana berbentuk fisik, berwujud bangunan permanen yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti yang didefinisikan oleh Kusumasari (2014) “mitigasi struktural merupakan usaha pengurangan resiko bencana yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan lingkungan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang”.⁶⁷ Seperti informan bernama Gunawan selaku Ketua Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Magelang yang menyebutkan adanya mitigasi bencana erupsi Merapi berbentuk fisik yakni pembuatan dam-dam pengendali lahar yang berfungsi untuk memperlambat laju lahar untuk mencapai kepemukiman warga. Seperti yang dikatakan Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang.

“Mitigasi itu ada dua yakni mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Di contohkan mitigasi struktural secara fisik itu dam-dam pengendali lahar-lahar hujan. Balai-balai sabuk dam itu dibuat untuk menahan lahar melaju ke pemukiman maksudnya untuk memperlambat, juga menjadi kantong-kantong lahar”. (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Beberapa mitigasi struktural juga dilakukan terhadap bencana lain misalkan saja bencana longsor. BPBD Magelang membuat sistem peringatan dini *Early Warning System* (EWS), saat ini telah digunakan lima unit di lima desa daerah rawan longsor, salah satunya di Desa Margosoyo Kecamatan Salaman Magelang. Alat tersebut berfungsi ketika curah hujan sangat deras melebihi 2ml per detik sirine akan berbunyi memberi peringatan kepada warga di sekitar untuk menjauhi tempat tersebut.

“Strukturalnya apa? Kita ada early warning system (EWS) sistem peringatan dini. Tapi baru 5 desa 5 unit, bentuknya seperangkat alat penyelamatan sebelum longsor terjadi, jadi itu ada ekstenso meter, tild meter, hydro meter dan sirine dan alat

⁶⁷ Bevaola Kusumasari, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. (Yogyakarta: Gava Media 2014), hal. 23.

monitor. Itu ketika hujan turun dengan deras lebih dari 2ml perdetik sangat deras sirine akan bunyi (waspada curah hujan tinggi), ketika terjadi rekahan lebih dai 7 cm, 10, 20 bunyi tapi belum jatuh tanah itu (siaga ungsikan kaum rentan), itu bagi balita ibu hamil dan lansia sudah diungsikan, dan ketika bel yang ke 3 bunyi (awas longsor! Kosongkan pemukiman terdekat) itu udah ada yang jatuh”. (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Pelaksanaan mitigasi struktural atau pembangunan fisik yang berkaitan dengan bencana gunung api tidak diperdalam BPBD Magelang, mengingat ada yang lebih berwenang dan berpotensi dalam membangun sebuah perencanaan bangunan fisik, serta banyaknya bencana alam yang sama-sama memerlukan anggaran mitigasi struktural. BPBD mempercayakan pembangunan tersebut kepada Dinas Pekerja Umum (DPU), selain itu anggaran yang diterima oleh BPBD untuk mitigasi struktural tidak mencukupi untuk dilakukan oleh BPBD sendiri, jadi anggaran mitigasi struktural diserahkan kepada Dinas Pekerja Umum. Tidak begitu saja lepas tangan, BPBD tetap mengawasi ketika ada pembangunan fisik yang berkaitan dengan mitigasi struktural.

“Karena kita punya anggaran fisik sebenarnya tapi mitigasi struktural pelaksana harus DPU kita uangnya serahkan DPU untuk bangun fisiknya.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Mitigasi bencana non fisik atau yang akrab disebut sebagai mitigasi non struktural merupakan mitigasi yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki manusia berupa ilmu pengetahuan, cara tersebut dipakai agar manusia mampu menyesuaikan diri dengan alam pada saat terjadi bencana. Umumnya langkah meningkatkan kapasitas manusia dengan cara memberikan pelatihan, menumbuhkan kesadaran masyarakat, modifikasi perilaku dan pengenalan lingkungan. Seperti yang didefinisikan oleh Kusumasari (2014) mitigasi non struktural merupakan pengurangan kemungkinan atau konsekuensi risiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang.⁶⁸

Mitigasi bencana non fisik dilakukan pemerintah daerah yakni BPBD Magelang untuk memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu. Berangkat dari rumus manajemen bencana yakni risiko sama dengan bahaya dikali kerentanan dibagi kapasitas. Risiko diartikan sebagai dampak yang diterima masyarakat ketika terjadi bencana. sedangkan bahaya merupakan fenomena alam yang berubah menjadi bencana, berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia.

⁶⁸. *Ibid.*, Hal. 23.

Kerentanan merupakan keadaan yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana.

Sedangkan kapasitas adalah bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Jika pemerintah meningkatkan kapasitas (masyarakat) dengan cara memberikan pelatihan, ilmu pengetahuan mengenai cara menghadapi terjadinya bencana, maka tingkat risiko akan berkurang dan jika kapasitas meningkat artinya masyarakat dapat mengatasi sendiri risiko yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh informan mengenai rumus manajemen bencana.

“Resiko sama dengan bahaya dikali kerentanan dibagi kapasitas. Sehingga untuk menghindari resiko tingkatkan kapasitas. Ibarat 2 adalah 10 bagi 5 nah 5 nya ditingkatkan menjadi 10 resikonya tidak 2 lagi tapi jadi 1. Nah mengurangi resiko jadi tingkatkan kapasitas. Siapa kapasitasnya? Masyarakat. Dengan mereka diberi pemahaman dengan mereka kita latih, kapasitasnya meningkat sehingga ketika menghadapi bahaya mereka siap”. (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

$$\text{Resiko} = \frac{\text{Bahaya} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Bagan 3.1 Rumus Manajemen Bencana

Berawal dari rumus tersebut BPBD mulai mendorong masyarakat untuk lebih berpotensi, agar setidaknya masyarakat dapat menolong dirinya sendiri dari bencana. perlunya sinergi antara masyarakat dan pemerintah membuat pemerintah sadar bahwa perlunya peningkatan kapasitas berupa apel siaga, pelatihan, sosialisasi, dan simulasi yang dilakukan secara berkala agar masyarakat selalu memingat apa yang sudah disampaikan meskipun daya ingat setiap manusia berbeda-beda, setidaknya masyarakat mengetahui cara menghadapi bencana minimal untuk diri sendiri dan keluarga. Oleh karena itu tidak heran bila mitigasi non struktural sangat ditekankan oleh BPBD Magelang.

“Contoh yang non struktural kita menjelaskan kebencanaan dalam bentuk sosialisasi penyampaian informasi, kemudian kita laksanakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan penanggulangan bencana, kita libatkan PMI, tapi bentuknya pelatihannya itu. Simulasi juga non struktural. apel, gladi, ya itu juga mitigasi non struktural” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Sedangkan pada tanggap darurat, dengan adanya pengalaman 2010 itu untuk menanggulangi bencana erupsi Gunung Merapi mendatang pada saat tanggap darurat menggunakan rencana kontijensi. Rencana kontijensi tersebut adalah konsep *sister village* yang dipakai ketika bencana erupsi Merapi terjadi lagi. Dalam kondisi tanggap darurat konsep *sister village* bukan lagi dipakai dalam sebuah latihan, tetapi dipakai dalam keadaan benar-benar terjadi bencana. Jadi, apa yang sudah masyarakat dapatkan selama

pra bencana diterapkan pada waktu yang tidak dapat dipastikan yakni pada saat Gunung Merapi Meletus. Jadi apa yang dilakukan pada tahap pra bencana sangat berkaitan dengan kondisi tanggap darurat.

3.2. Perencanaan dan Program Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi BPBD Magelang

A. Sister Village (Desa Bersaudara)

Sister village atau desa bersaudara merupakan sebuah konsep mitigasi bencana yang dirancang oleh BPBD Magelang. Inti konsep *sister village* adalah lari menyelamatkan diri ke tempat tujuan yang sudah disediakan. Seperti yang telah dilakukan oleh Desa Kalibening Kecamatan Dukun, bersaudara dengan Desa Adikarto dan Desa Tanjung Kecamatan Muntilan. Dapat disebutkan bahwa *sister village* merupakan perjanjian antara 2 desa atau lebih yang dimana salah satu dari desa tersebut bersedia dijadikan tempat mengungsi sementara bagi warga yang terkena dampak bencana erupsi merapi.

Terbentuknya konsep ini diawali dengan terjadinya bencana erupsi Merapi pada tahun 1930-1931 hingga pada tahun 1960, konon katanya, banyak warga dari wilayah Serumbung, mengungsi ke wilayah Salaman. Pengungsian tersebut tidak seperti saat ini adanya Tempat Evakuasi Akhir (TEA) di berbagai wilayah yang dinyatakan aman. Dahulu para pengungsi tidak mengungsi di satu tempat seperti gedung, tetapi mereka mengungsi di rumah penduduk, sebagai balas budi pengungsi bersedia membantu tuan rumah untuk bercocok tanam agar hasilnya dapat dinikmati bersama.

Selain itu, pengalaman 2010 mengenai bencana erupsi Merapi, BPBD yang pada tahun tersebut belum terbentuk, masih menjadi Kesbang dan PB, mengalami banyak hambatan pada saat menangani erupsi merapi tahun 2010 karena terhambatnya kekuasaan untuk mengkoordinasikan ke dinas-dinas yang lain. Waktu itu, proses evakuasi masyarakat terjadi kekacauan dengan berpindah sebanyak 3 kali hingga 7 kali ke tempat pengungsian dan sampai disana pun dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Proses evakuasi tanpa perencanaan yang jelas baik, dari jalur yang dilalui maupun tempat yang dituju, yang terpenting bagi mereka adalah menjauh sejauh-jauhnya dari bencana.⁶⁹

Berawal dari pengalaman masyarakat, lalu timbulah sebuah ide untuk meneruskan konsep tersebut yang sudah dimatangkan. Sejak 2011 *sister village* dibentuk, saat ini sudah

⁶⁹ Joko Sudibyo, "Erupsi Gunung Merapi 2010 : sister village Sebuah Konsep Penanganan Bencana Terintergrasi." (Bandung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) Hal 178.

11 pasang desa yang bersaudara, target BPBD Magelang adalah 20 pasang desa yang berpasangan, 1 diantaranya Desa Tlogolele Kecamatan Selo, Boyolali berpasangan dengan Desa Mertoyudan, dan Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Diantara semua pasangan desa, yang telah menerima *treatment* berupa gladi posko dan gladi lapang dari BPBD hingga saat ini sebanyak 4 pasang, salah satunya Desa Kalibening Kec. Dukun berpasangan dengan Desa Adikarto dan Desa Tanjung Kec. Muntilan yang baru saja melaksanakan simulasi pada bulan November tahun 2017 lalu. Seperti yang dikatakan Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang

“Selama ada BPBD sejak 2011 jadi begitu beberapa program bersaudara dengan 41 desa yang sudah di fasilitasi sudah 11 pasang masih kurang 8 pasang yang sudah di gladi baru 4 pasang.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Ada pendapat lain mengenai *sister village* yang dikemukakan oleh Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) yakni Sinam M Sutarno. *Sister village* merupakan sebuah kritik dari sistem pengungsian berbasis barak pada saat erupsi Merapi di tahun 2010 yang memunculkan koordinasi yang rumit, kurangnya sarana dan prasarana yang menjadikan penyintas tidak nyaman. Oleh karena itu hadirnya *sister village* untuk memperbaiki sistem pengungsian berbasis barak. Dengan tidak semua menempatkan penyintas di tempat pengungsian namun juga menempatkan penyintas di rumah warga, karena secara psikologis penyintas merasakan berada pada setting rumah sendiri yang akan menimbulkan persepsi bahwa mereka tidak mengungsi tetapi hanya menginap sementara.

“sister village itu adalah sebuah kritik atau perbaikan dari sistem pengungsian yang berbasis barak, tenda atau apa dalam satu lokasi. karena darurat banyak yang tidak siap, misalnya yang paling sering dibutuhkan yang pertama adalah air, yang kedua ini adalah MCK ini kan menjadi problem yang sering muncul problem berikutnya adalah tempat tidur misalnya atau kemudian sistem koordinasinya juga rumit banget banyak orang dalam satu lokasi itu yang menjadi sistem koordinasinya menjadi tidak baik. Ini kan pembelajaran dari beberapa warga yang dia tidak mengungsi ke pengungsian berbasis barak atau tempat publik lainnya, tapi dia lebih memilih ke rumah warga k erumah saudaranya, secara psikologis lebih baik karena dia merasa tidak mengungsi tapi menginap dalam situasi settingnya juga rumah biasa rumah saudara tidak berhadapan dengan banyak orang yang bernasib sama.” (Wawancara Sinam, 18 Februari 2017)

Selain itu hal yang terpenting dari konsep *sister village* adalah kesepakatan antara dua desa atau lebih yang berbentuk MoU. MoU digunakan sebagai dasar desa membuat kebijakan tingkat desa untuk mengerahkan sumber daya dalam rangka menjalankan

program desa saudara.⁷⁰ MoU tersebut bersifat selamanya jadi meskipun kepala desa terus berganti, namun kerjasama tersebut tetap berjalan. Selain membentuk kesepakatan, desa KRB tiga juga memiliki keleluasan dalam memilih desa pasangannya. Sehingga dapat memudahkan membuat kesepakatan karena terlebih dulu memiliki kedekatan emosional sebelum terjadinya pertemuan formal antara desa bersaudara. Selain itu dokumen MoU dapat juga digunakan sebagai pemangku kebijakan kebencanaan untuk mensupport desa saudara yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Magelang. Seperti yang dikatakan Mhd. Muzamil selaku Kasi Pencegahan.

“Salah satu dari sister vilage juga kesepakatan dulu yaitu MoU, sepakat gak desa sini. Karena yang paling berat itu yang menyanggah bukan yang disanggah.” (Wawancara Muzamil, 26 Oktober 2017)

Setelah proses kesepakatan tertulis selesai selanjutnya desa bersaudara dipertemukan dalam sebuah kegiatan formal seperti simulasi. Hal itu penting dilakukan agar keduanya tidak hanya mengenal antar kepala desa saja, namun juga warganya harus mengenal satu sama lain. Karena bagaimanapun juga mereka akan tinggal sementara di desa saudaranya dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Pertemuan antar desa dilakukan untuk menyamakan persepsi antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam rangka mendapatkan respon positif mesyarakat terhadap peringatan dini yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“jadi paska MoU kita latih 5 hari tamanagung. Anjongsana diterima gak? Ditamanagung betul-betul diterima. Yang MoU kan kades lha warganya menerima gak?” (Wawancara Muzamil, 26 Oktober 2017)

Tabel 3.2. Daftar Pasangan Desa Sister Village

Kecamatan	No	Desa KRB III	Desa Tujuan Pengungsian (Desa Saudara)
Sawangan	1	Wonolelo (6882)	Desa Banyuroto Kec. Sawangan, Ds Pogalan Kec Pakis
	2	Kapuhan (3406)	Desa Mangunsari, Kec. Sawangan
	3	Ketep (2368)	Desa Podosuko, Wulunggunung Kec. Sawangan dan Desa Ketundan, Kec. Pakis
Dukun	4	Sengi (4368)	Desa Butuh, Tirtosari, Jati Kec Sawangan, Desa Treko dan Senden Kec Mungkid

⁷⁰ Mart Widyanto, “Erupsi Gunung Merapi 2010 : sister village / desa bersaudara penanggulangan bencana lewat persaudaraan desa.” (Bandung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) Hal 190.

	5	Sewukan (2473)	Desa Ambartawang , Mungkid dan Rambeanak Kec. Mungkid
	6	Paten (3073)	Desa Gondang, Bumirejo dan Paremono Kec. Mungkid Desa Banyurojo dan Mertoyudan Kec Mertoyudan
	7	Krinjing (1372)	Desa Deyangan, Kec. Mertoyudan
	8	Kalibening (2591)	Desa Adikarto, dan Tanjung Kec. Muntilan
	9	Sumber (3612)	Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan
	10	Ngargomulyo (2491)	Desa Tamanagung, Kec. Muntilan
	11	Keningar (595)	Desa Ngrajek Kec. Mungkid
Srumbung	12	Kaliurang (2486)	Desa Jamuskauman, Ds. Pakunden dan Ds. Bligo Kec. Ngluwar
	13	Kemiren (1195)	Desa Salam Kec. Salam
	14	Ngablak (2396)	Desa Kradenan , Kadiluwih, Somoketro dan Tirto Kec. Salam
	15	Nglumut (784)	Dusun Sucen Kec. Salam
	16	Tegalrandu (2193)	Desa Bringin, Pabelan Kec Mungkid dan Wanurejo Kec Borobudur
	17	Mranggen (4360)	Desa Gunungpring dan Sokorini, Kec. Muntilan
	18	Ngargosoko (2205)	Desa Gulon Kec. Salam
	19	Srumbung (3817)	Desa Baturono dan Tersangede Kec. Salam
Selo, Boyolali	20	Tlogolele (2529)	Desa Mertoyudan,dan Sumberejo Kec. Mertoyudan

Adapun manfaat *sister village* yaitu memiliki kepastian mengenai tempat pengungsian agar masyarakat tidak kebingungan mencari tempat pengungsian. Mengurangi kepanikan dan kekacauan dalam proses evakuasi maupun saat pengungsian. Serta memudahkan pelayanan mengungsi dengan ikatan persaudaraan yang dibangun oleh

desa yang bersangkutan. Untuk mendukung konsep *sister village* BPBD Magelang melengkapi dengan memberdayakan teknologi dan jasa.

Dalam hal teknologi BPBD Magelang melengkapi *sister village* dengan sistem informasi desa atau yang akrab disebut sebagai *website* desa pada saat bencana berfungsi sebagai pelayanan informasi atau data penduduk agar memudahkan saat proses evakuasi ataupun pengungsian. Selain itu mempersingkat waktu dalam mendata ulang warga desa pengungsi sehingga memudahkan dalam menyusun kebutuhan dan menyalurkan bantuan bagi korban bencana. Saat ini desa yang sudah menggunakan sistem informasi desa yakni 4 desa KRB dan 7 Desa Penyangga. salah satunya Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun sebagai desa KRB, dan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan sebagai desa penyangga yang sudah menggunakan sistem informasi desa.

“Sekarang berapa balitanya, berapa lansianya, sumber daya yang dimiliki berapa? Truknya punya berapa, pick up punya berapa, ambulans punya berapa. Sehingga kita tinggal, pak ambulan kurang 1 truk kurang 2. Sangat cepat dengan komputer kan tinggal hapus saja. Makanya perubahan penduduk itu sekarang pake SID.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Selain itu, BPBD membentuk Organisasi Pengurangan Resiko Bencana (OPRB). OPRB merupakan relawan desa yang terdiri dari beberapa warga desa berfungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana erupsi Merapi. Umumnya organisasi tersebut beranggotakan 30 hingga 50 orang yang terdiri dari berbagai macam pekerjaan yakni petani, ibu rumah tangga, perangkat desa, dan pemuda desa. Selain itu OPRB juga terdapat di setiap desa kawasan rawan bencana, namun hanya kawasan rawan bencana tiga yang ditekankan untuk membentuk relawan desa. Tidak hanya semata-mata dibentuk, wakil-wakil desa tersebut akan dilatih dan diberi ilmu bagaimana cara menangani bencana erupsi Merapi. Diharapkan organisasi desa tersebutlah yang nanti pertama kali menolong desanya ketika mendapat perintah dari pemerintah daerah, seperti yang dikemukakan oleh Didik selaku Kasi Bidang Kedaruratan.

“Peningkatan kapasitas contohnya adalah sosialisasi kepada masyarakat terus pembentukan organisasi lembaga rawan bencana dimasing-masing desa (OPRB), termasuk sampai ke desa saudara.” (Wawancara Didik, 4 November 2017)

Terbentuknya OPRB pun diawali dengan adanya kerjasama antara BPPTKG dengan BPBD pada tahun 2012 yang pada saat itu melakukan program wajib latih yang di peruntukkan kepada seluruh desa Kondisi Rawan Bencana di Kabupaten Magelang hasilnya berupa organisasi penanggulangan bencana erupsi merapi atau yang saat ini disebut sebagai (OPRB).

“Jadi kita awali di 2012 itu BPPTKG bekerjasama dengan BPBD melakukan wajib latih penanggulangan bencana erupsi merapi itu untuk seluruh desa di KRB merapi, mereka outputnya adalah mereka punya organisasi desa untuk penanggulangan erupsi Merapi”. (Wawancara Didik, 4 November 2017)

B. Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Setelah terbentuknya konsep *sister village*, BPBD mencoba menyempurnakan konsep tersebut dengan mengadakan program-program pendukung *sister village* yang tergabung didalam Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana merupakan program yang dikembangkan oleh pemerintah ditujukan untuk desa / kelurahan yang berada di kawasan rawan bencana agar memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam menanggapi potensi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Program ini bersifat wajib mengingat adanya Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.⁷¹

Program destana terdiri dari 4 macam yakni apel siaga, pelatihan, sosialisasi, dan simulasi. Prrogram-program tersebut bertujuan untuk memperkenalkan satu sama lain desa bersaudara (*sister village*) agar keduanya memiliki kedekatan emosional sehingga pada saat terjadi bencana erupsi Merapi mereka sudah tidak canggung lagi untuk bertemu. Selain itu juga BPBD memastikan bahwa kedua desa sama-sama menerima satu sama lain. Seperti yang diungkapkan oleh Gunawan.

“Itu kan baru kadesnya, diketahui camatnya, pertemuan warganya kita fasilitasi 5 hari dengan konsumsi dengan uang transport, mereka datang mendata, anjungsana bener-bener diterima apa tidak.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Apel siaga merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh BPBD Magelang setiap tahunnya. Kegiatan tersebut berupa upacara yang dihadiri dari berbagai pihak, dilaksanakannya apel siaga adalah untuk menilai kesiapan setiap sektor dalam upaya menanggulangi bencana Erupsi Merapi. Selain apel siaga BPBD Magelang juga mengadakan pelatihan setiap satu tahun sekali. Pelatihan berfungsi untuk melatih target pada keadaan tanggap darurat agar target lebih mandiri untuk membantu desanya ketika bencana Erupsi Gunung Merapi.

Sosialisasi, kegiatan yang dilakukan satu tahun sekali ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan BPBD Magelang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan mengenai bencana yang terjadi di suatu desa atau kawasan

⁷¹ “Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”. <https://bnpb.go.id/rencana-strategis.html#g=1&slide=0> (Diakses, 09 Januari 2018).

tersebut. Kegiatan terakhir merupakan simulasi yang terbagi menjadi dua yaitu gladi posko dan gladi lapangan. Gladi posko merupakan praktik kegiatan simulasi manajemen evakuasi yang dilakukan di dalam ruangan. Sedangkan gladi lapangan merupakan praktik kegiatan evakuasi berdasarkan konsep *sister village*. Kegiatan simulasi dilakukan setahun sekali kepada setiap pasangan desa saudara yang bertujuan untuk melatih kesiapan dari setiap desa.

3.3. Implementasi Dan Komunikasi Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi BPBD Magelang

A. Apel Siaga

Selain pemerintah, BPBD juga bekerjasama dengan stakeholder non pemerintah yakni para relawan. Saat ini sudah 5000 relawan yang tercatat telah bekerjasama dengan BPBD dalam penanggulangan bencana seperti Komunitas Relawan Buruh Merapi, Kompas, Orari Peduli Merapi, Linang Sayang, Garuda Menoreh dan lain sebagainya. Selain itu relawan desa yang tergabung dalam OPRB juga termasuk kedalam 5000 relawan. Tidak banyak yang dibutuhkan relawan hanya eksistensi mereka yang diakui oleh pemerintah, untuk itu BPBD memfasilitasi dengan mengadakan apel siaga. Seperti yang dikatakan Didik selaku kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Magelang.

“Yang diminta juga tidak banyak hanya eksistensi mereka yaitu keberadaan mereka diakui ya kita libatkan di kegiatan-kegiatan, mereka malah menyatakan terimakasih sekali.” (Wawancara Didik, 4 November 2017)

Apel Siaga yang diadakan setiap 1 tahun sekali ini merupakan upacara persiapan yang dihadiri oleh lembaga pemerintah dan relawan yang berperan sebagai stakeholder untuk meninjau lebih jauh kesiapan dari mulai peralatan kebencanaan hingga bahan makanan. Peserta yang tergabung dalam apel siaga terdiri dari pemerintah yakni 10 sektor kebencanaan, relawan, dan Polres Kabupaten Magelang. Masing-masing instansi akan menampilkan potensinya kepada komandan upacara (Bupati), seperti BPBD dengan truk dapur umumnya dan tenda pleton, Dinas Kesehatan dengan mobil ambulans beserta para medisnya, dan Polres dengan mobil theison dan trail-trailnya. Seperti yang dikatakan Gunawan:

“Apel siaga bencana 2016 yang lalu BPBD truknya tampilkan, mobilnya tampilkan Dinas kesehatan ambulan juga para medisnya. Pemadam kebakaran armada. polres truk mobil theison dan trail-trailnya, semua sektor itu menampilkan apa yang dimiliki. Kita punya tenda pleton tenda regu dsb. Nah ini menjadi 1 kesatuan

yang pak Bupati lapor apel siaga siap dan pasukan siap diperiksa tet reret tet teret. Setahun sekali biasanya di agustus karena di oktober ini merapi ulang tahun 26 oktober itu artinya dibulan agustus kan sudah siap.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Tidak hanya pemerintah yang dapat menampilkan potensinya, para relawan juga tidak kalah dengan pemerintah setempat, dengan baju khasnya masing-masing kelompok relawan menampilkan potensi berupa ambulans dari komunitas atau desa. Seperti Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang yang memiliki ambulans desa yang siap membantu warganya ketika dalam keadaan normal ataupun darurat dengan menggratiskan antar jemput bagi warga desanya. Tujuan diadakannya apel siaga untuk membangun sinergi antara pemerintah dan relawan dalam upaya meningkatkan keterampilan relawan, serta perkayaan informasi mengenai penanggulangan bencana.

“Relawan yang ada menjadi pasukan yang terdiri dari baju keberasannya. Ada relawan yang sudah punya ambulans sendiri ketika kondisi aman ada warganya yang sakit jemput bolak balik dianter ke rumah sakit tanpa biaya, dia yang ke rumah sakit punya mobilnya drivernya BBM ambulans gratis itu relawan di Desa Kalibening Kecamatan Dukun.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Kegiatan ini juga menjadi ajang persiapan mitigasi bencana bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang, berawal dari keinginan relawan agar keberadaannya dapat diakui oleh pemerintah, BPBD mengikut sertakan dalam setiap kegiatan mitigasi bencana. Tidak hanya apel siaga yang menjadi kegiatan mitigasi bencana, namun juga ada pelatihan untuk warga Kawasan Rawan Bencana, sosialisasi dan simulasi.

“Jadi relawan hampir 5000, KSB, Linang Sayang, Peduli Merapi, Pasak Merapi, Tagana, TRC, jadi namanya sesuai. Tim Reaksi Cepat (TRC) Peduli Merapi, Pasak Merapi, Kompas dsb.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

B. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan metode penyampaian informasi dari satu orang kepada kelompok atau dari kelompok kepada kelompok, agar audiens yang dituju dapat mengetahui strategi, rencana atau kebijakan tertentu. Bentuk sosialisasi yang disampaikan BPBD mengenai bencana erupsi gunung Merapi sangat berkaitan dengan informasi terkait aktivitas Gunung Merapi dan *sister village*. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat atau target mengetahui program mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi yang telah disiapkan. Seperti yang dikatakan oleh Mhd. Muzamil, *“Dengan adanya sosialisasi mereka di kandani, ben mudeng.” (Wawancara Muzamil, 26 Oktober 2017)*

Terdapat tiga kelompok sosialisasi yakni sosialisasi berbasis perangkat desa, sosialisasi berbasis perempuan, dan sosialisasi berbasis guru. Sosialisasi ini hanya khusus untuk warga desa kawasan rawan bencana saja. Sama seperti pelatihan, alasan sosialisasi lebih cenderung berbasis perempuan, karena lebih mudah disampaikan kepada perempuan lainnya, dari pada sosialisasi berbasis laki-laki yang sepertinya tidak tertarik dengan materi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Gunawan mengenai sosialisasi:

“Kumpulan di balai desa ada pak Gun dari bencana. mereka cerita ini itu ini itu. Tembak perempuan, kalo bapaknya wah sambil merokok yang diomongin bisnis yang diomongin pekerjaan, tapi kalo ibu-ibu rumah tangga ketika PKK caranya suka begitu berdandan berhias kemana? Kumpulan di balai desa. Sambil cerita keluar semua itu”. (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Perbedaan dengan pelatihan, sosialisasi dilakukan oleh BPBD sendiri karena sangat berkaitan dengan konsep *sister village* yang nantinya akan berkelanjutan. Pada saat sosialisasi bencana erupsi Merapi, pesan yang disampaikan oleh BPBD Magelang terdapat 3 hal yakni tanda, penyebab, dan cara mengantisipasi. Tidak hanya bencana erupsi gunung Merapi saja, namun semua bencana alam memiliki prinsip yang sama dalam mensosialisasikan yakni tanda, penyebab, dan cara mengantisipasi. Seperti yang dijelaskan oleh Mhd. Muzamil

“Saya prinsip 3 itu saja tidak usah ngomong terlalu banyak sek dijak ngomong ndak sebel. Jadi prinsip 3 saja, 1 tanda-tandanya, 2 penyebabnya, dan 3 cara mengantisipasi.” (Wawancara Muzamil, 26 Oktober 2017)

Beliau juga menyampaikan bahwa ketika menjelaskan bencana erupsi Merapi, beliau membaginya ke dalam jenis bencana erupsi Merapi. Hal itu dilakukan agar masyarakat semakin paham terhadap bencana yang tidak dapat dipastikan kapan datangnya ini. Seperti bencana erupsi Gunung Merapi yang biasanya diawali dengan gempa bumi, beliau menyampaikan kepada warga bahwa bila terjadi gempa bumi dan masyarakat merasakan guncangannya pertama kali yang dilakukan adalah melindungi kepala, bukan lari. Karena saat posisi bumi sedang bergoncang mustahil bila manusia lari karena dapat mengakibatkan pusing lalu terjatuh. Pada saat gempa bumi sebaiknya berlindung di bawah meja untuk melindungi kepala dari jatuhnya benda-benda di atap rumah.

“Kembali ke masalah gempa bumi nek saya bicara lempengan mungkin ngerti nek jelasin ke masyarakat, lempengan ki opo. Jadi bahasa kasarnya ya itu terjadi karena kuasa yang diatas, tapi ketika cara menghindari bagaimana? Nomer 1 melindungi kepala bisa masuk kolong bisa masuk meja, pakai helm tidak salah juga, kita lebih mengutamakan lindungi kepala.” (Wawancara Muzamil, 26 Oktober 2017)

Setelah terjadi gempa bumi, pada umumnya gunung berapi memuntahkan material-material di dalam perut bumi berupa krikil, lahar, atau pun wedus gembel yang setelah itu diikuti hujan abu vulkanik. Warga di kawasan rawan bencana (KRB) 1 harus sudah mengosongkan tempat desanya yakni dengan lari menuju tempat yang aman. Tidak sembarang lari, namun mereka lari ke tempat yang sudah disediakan yakni ke desa saudaranya.

“Ketika bentuknya awan panas sekarang panjenengan nalar wae, nek awan panas itu kan didahulukan oleh wedus gembel mungkin itu ancumannya bisa debu, bisa kerikil panas dan itu pun jaraknya ada, ketika sudah di KRB 1 mungkin aman salah satunya ya lari tadi. Cuma seperti itu didukung oleh tingkat kemampuan, tingkat keterampilan, tingkat pengetahuan. Dengan adanya sosialisasi mereka di kandani, ben mudeng.” (Wawancara Muzamil, 26 Oktober 2017)

Selama gunung masih mengeluarkan material vulkanik berupa hujan abu dan diikuti dengan hujan yang mengakibatkan terbawanya material-material bumi oleh air hujan. Saat itulah disebut sebagai banjir lahar hujan beliau menyampaikan bila terjadi banjir lahar hujan masyarakat dilarang mendekati aliran sungai yang terhubung langsung dengan gunung berapi, dengan bentuk kegiatan apapun. Karena dapat mengakibatkan terseret atau terbawa aliran sungai.

“Ketika arahnya itu banjir lahar dingin itu juga didukung oleh hujan dulu. Ketika kita bicara erupsi misalnya banjir lahar dingin jelaskan disitu ancumannya air apa yang harus dihindari ya panjenengan jangan jalan di tepi aliran sungai, harus jauh dari bibir sungai. Kegiatan juga bahkan aktifitaspun tidak boleh di dekat situ.” (Wawancara Muzamil, 26 Oktober 2017)

Untuk menyampaikan pesan pada saat sosialisasi BPBD Magelang menggunakan alat bantu berupa *OHP LCD* dan *power point* untuk mempermudah penyampaian pesan. Cara penyampaian pesan pun sedikit berbeda, yakni dengan menggunakan bahasa daerah dan menggunakan kosa kata yang mudah dimengerti bukan dengan bahasa ilmiah. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat mengerti apa yang disampaikan oleh BPBD. Seperti yang dikatakan oleh Muzamil:

“Kalo kita sosialisasi ya kita paling sering ya pake alat, ohp lcd pake ppt tapi kita menjelaskan ya sejelas-jelasnya namanya juga sama masyarakat kan. Kadang yang namanya ini apasih kita harus menjelaskan itu. Memang dikegiatan itu yang khusus kita ada poster, baliho ajakan himbauan, tapi ketika sosialisasi yang saya alami tidak ada alat yang lain. Kecuali yang dituju gak punya LCD laptop ya terpaksa bawa”. (Wawancara Muzamil, 26 Oktober 2017)

Cara lain sosialisasi adalah dengan membentuk *forum group discussions* (FGD). Dipilihnya metode *Forum Group Discussion* (FGD) karena BPBD meyakini lewat diskusi

mereka akan mendapat banyak cerita, saran dan solusi untuk dikembangkan lebih lanjut. Biasanya untuk sekali sosialisasi menggunakan metode FGD BPBD mengundang 20-25 orang dari pihak masyarakat yang terdiri dari perangkat desa, ibu-ibu PKK, dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membangun komunikasi dua arah antara BPBD dan masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih terbuka memberikan saran kepada BPBD.

“Yah memang setiap tahun kita melaksanakan kerjaan 30 kali atau kita adakan sosialisasi, bentuknya FGD, bentuknya penyampaian informasi dan diskusi.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Selain itu, BPBD juga pernah melakukan sosialisasi menggunakan media lain seperti poster, baliho, leaflet dan sebagainya. Jika bentuknya poster biasanya dibagikan ke sekolah-sekolah, jika bentuknya baliho BPBD memasanginya di setiap kecamatan yang isinya menjelaskan resiko terjadinya bencana dan cara menghadapi bencana tersebut. Namun itu semua tergantung di perencanaan awal yang sudah ditetapkan. Untuk tahun 2017 BPBD menggunakan metode FGD sebagai media sosialisasi. Tidak hanya semata-mata mengundang warga untuk mendengarkan materi saja, namun BPBD juga memberikan konsumsi dan uang transportasi kepada warga yang datang.

“Semua terjadi di perencanaan awal, poster kita bagi ke sekolah-sekolah, dalam bentuk baliho ada di kecamatan sana ada kenali bahayanya dan resikonya itu gambar Bupati ada. Jadi tahun ini modelnya FGD kita undang narasumber desa menghadirkan peserta 20 orang nanti sound system dari kita materi bantuan konsumsi dan transport.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Sosialisasi dilakukan satu tahun sekali terhadap tiap desa, biasanya dilaksanakan di kantor BPBD atau pun di desa kawasan rawan bencana. Sosialisasi merupakan langkah awal untuk memulai strategi mitigasi bencana erupsi Merapi. Kendala yang dialami selama sosialisasi adalah ketika sosialisasi di desa terdampak mereka sangat antusias. Namun ketika sosialisasi di tempat yang tidak pernah terkena bencana mereka terlihat menyepelkan pemerintah, seperti tidak aktif bertanya, bahkan ada yang tertidur pada saat sosialisasi berlangsung. Solusi yang dilakukan BPBD adalah menyesuaikan waktu yang diinginkan oleh warga desa, serta memberikan uang transportasi kepada warga.

“Dicantumkan pengganti transport dan konsumsi 50k / 75k. Kalo ada itu yang datang komplit. Menyesuaikan keinginannya selesai jam kantor, atau hari minggu atau jam 3 sore.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Dari pernyataan diatas mencerminkan bahwa masyarakat termotivasi untuk mengikuti kegiatan karena adanya imbalan atau uang transportasi yang diberikan BPBD Magelang. Seharusnya masyarakat memotivasi diri mengikuti kegiatan tersebut

berdasarkan keinginannya untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan pada imbalan yang didapat setelah mengikuti kegiatan. Kebiasaan menggunakan cara cepat yakni memberi imbalan pada setiap kegiatan, secara tidak langsung melatih masyarakat termotivasi menghadiri kegiatan karena uang bukan karena kesadaran diri.

C. Pelatihan

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa strategi mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi tidak hanya apel siaga dan sosialisasi, namun terdapat juga pelatihan. Pelatihan merupakan upaya untuk mengajarkan masyarakat tentang bencana seperti apa yang akan terjadi dan apa saja yang dapat mereka lakukan ketika bencana terjadi.⁷² Tujuan diadakannya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dari segi pengetahuan dan kemampuan. Seperti yang dikatakan Gunawan:

“Artinya dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat, petugas-petugas yang ada di daerah rawan perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan pelatihan-pelatihan itu.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Sejak 2011 BPBD Magelang telah melaksanakan pelatihan bagi masyarakat agar mereka dapat mandiri dalam menghadapi bencana. Biasanya BPBD melaksanakan pelatihan di desa atau di kantor BPBD, dengan memberdayakan perempuan, perangkat desa, relawan dan masyarakat yang diadakan rutin setiap tahunnya. Namun di setiap tahun tersebut tidak semua golongan yang dilatih, jadi hanya 1 kelompok misalkan berbasis perempuan saja, kemudian di tahun berikutnya berbasis perangkat desa, berbasis relawan, hingga berbasis guru.

“Terus kita lakukan pelatihan penanggulangan bencana itu tadi berbasis Guru, berbasis perempuan, berbasis perangkat, berbasis masyarakat setiap tahun rutin kita lakukan sejak 2011.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Dalam menyampaikan informasi BPBD memilih perempuan sebagai subjek pelatihan karena perempuan khususnya ibu-ibu yang cenderung akan menceritakan kembali materi yang sudah disampaikan BPBD, meskipun tidak semua materi disampaikan ibu-ibu. Seperti yang di jelaskan oleh Gunawan, alasan memilih perempuan sebagai subjek karena setelah pelatihan, perempuan akan menceritakan kembali pada perempuan lainnya pada saat mereka sedang berkumpul bersama.

⁷² Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan bencana 2012. “Pedoman Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana”. Hal. 9

“Tetapi kita tembak perempuan, kenapa? Karena di saat dia sambil nyuci sambil cerita, ‘kemarin kumpulan di balai desa apa ya? Tentang bencana, apa ya? Kalo ada gempa lindungi kepala, kalo ada gempa hindari kaca-kaca, kalo ada gempa berlindung dibawa meja.’ Kan sambil cerita sambil nyuci itu kena.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Salah satu contoh dari pelatihan adalah pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD). Fungsi pelatihan tersebut adalah ketika bencana erupsi Gunung Merapi terjadi, warga di sekitar yang memiliki kemampuan dan pengetahuan medis segera memberikan pertolongan pertama pada korban bencana sebelum ditangani lebih lanjut oleh dokter setempat. Seperti yang dikatakan Gunawan, mereka akan lebih sabar, teliti dan lembut, ketika yang menangani korban adalah perempuan, untuk itu materi pelatihan disesuaikan dengan kelompok masyarakat.

“Bagaimana PPGD gawat darurat. Yang luka ibu-ibu tapi yang merban bapak-bapak kan bahaya, dan lebih telaten, bungkusnya rapih, hati-hati. Kalo yang cidera perempuan juga kan malah lebih anu. Sebaliknya Anda terluka diperban ibu lebih senang kan, dari pada diperban bapak, artinya petugasnya lebih anu perempuan.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Adapun pelatihan dapur umum yang memberikan keterampilan memasak yang baik dan benar. Tidak semata-mata hanya memasak, di dalam pelatihan dapur umum juga diberikan teknik khusus agar menghemat waktu yakni, membaginya ke dalam 3 hal yakni persiapan, pengolahan / memasak, dan *packing*. Contoh, ketika memasak nasi dalam jumlah besar, sekali menanak nasi harus 60 kg untuk porsi 150 orang pertama, menjaga nasi agar tidak cepat basi juga penting, caranya adalah mendinginkannya terlebih dahulu agar panas yang dihasilkan nasi mereda sehingga tidak menimbulkan bakteri yang membuat nasi cepat basi, setelah itu nasi dibungkus.

“Buat dapur umum praktik dengan standar pesertanya juga 150 nanak nasinya harus 60 kg untuk 150 itu pertama. Kedua teknik supaya nasi itu gak basi penting, di Saudi 1000 jamaah, nasi panas kalo langsung dibungkus awas bahaya, dinginkan dulu tapi bagaimana? Kita ya punya AC supaya cepet dingin, kalo untuk 100 orang ditiup ya kapan kelarnya. Tapi ada takaran airnya, takaran lainnya dibungkus setelah dingin kan ibu-ibu yang lebih cermat jadi kita berbasis perempuan.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Begitupun dengan kelompok yang lain seperti perangkat desa, guru, dan relawan yang menerima pelatihan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Tidak sendiri mengadakan pelatihan, terkadang BPBD Magelang memfasilitasi pelatihan sedangkan yang menjadi pemateri dari instansi lain seperti Palang Merah Indonesia (PMI),

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Pemerintah setempat, dokter, *Search and Rescue* (SAR) dan lain sebagainya.

Seperti yang terjadi pada pelatihan bulan November 2017 yang dilakukan selama 3 hari. Kegiatan pelatihan dihadiri oleh 3 desa yakni Desa Kalibening Kecamatan Dukun dengan jumlah 25 orang, Desa Adikarto Kecamatan Muntilan berjumlah 15 orang, dan Desa Tanjung Kecamatan Muntilan berjumlah 7 orang. Pada kegiatan tersebut pertama warga diberikan materi atau penjelasan terlebih dahulu, setelah diberikan penjelasan dan materi kemudian warga berlatih sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri. Seperti pada salah satu pelatihan, yakni sistem informasi dan komunikasi tanggap darurat, dimana warga dilatih cara mendata penyintas yang baik dan benar, cara menggunakan alat komunikasi, dan cara berkomunikasi satu sama lain pada saat terjadi bencana yang akan datang.

Materi yang disampaikan selama pelatihan disampaikan oleh MDMC Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor BPBD Kabupaten Magelang dari pukul 08.00 pagi hingga 20.00 malam. Sesuai pengamatan penulis, pada saat kegiatan, warga khususnya ibu-ibu banyak yang mencatat materi, disisi lain bapak-bapak ada yang terlihat mengantuk karena mendengarkan materi. Menurut ibu-ibu yang mencatat, setelah apa yang mereka tulis di catatan, sampai di rumah mereka lupa dengan materi yang disampaikan oleh pemateri. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuli salah satu warga Desa Tanjung. *“Walah Mbak kalo ndak di catet, nanti sampe rumah ya lupa lagi”* (Wawancara Yuli, 17 November 2017). Warga lain yang mencatat juga beranggapan sama dengan beliau.



Gambar 3.1 Pelatihan sistem informasi dan komunikasi tanggap darurat

(Sumber : Dokumen pribadi 16 November 2017)

D. Simulasi (Gladi Posko)

Gladi posko merupakan suatu kegiatan latihan yang melibatkan satu atau multi pihak atau lembaga untuk menguji kapasitas dan fungsi lembaga/instansi yang terlibat berdasarkan skenario latihan⁷³. Seperti pada kegiatan simulasi gladi posko yang dilakukan pada 17 November 2017. Kegiatan gladi posko dilakukan di dalam ruangan yakni di tempat evakuasi akhir (TEA) Desa Tanjung Kecamatan Muntilan. Kegiatan gladi posko berkaitan dengan simulasi bencana erupsi Gunung Merapi berlangsung dari pukul 09.00 hingga pukul 17.00.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh warga Desa Kalibening Kecamatan Dukun berjumlah 10 orang, Desa Tanjung Kecamatan Muntilan berjumlah 10 orang dan Desa Adikarto Kecamatan Muntilan berjumlah 10 orang. Dipilihnya 10 orang dari setiap desa karena mereka menjadi wakil desa yang akan membantu pada saat terjadinya bencana yang sudah terbagi ke dalam 10 sektor, yakni sektor manajemen posko, sektor kesehatan, sektor evakuasi dan transportasi, sektor logistik, sektor dapur umum, sektor barak, sektor keamanan, sektor komunikasi, sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Anggota dari 10 orang tiap desa merupakan ibu-ibu PKK, perangkat desa, dan OPRB.

Tidak hanya itu, kegiatan gladi posko juga dihadiri oleh instansi pemerintahan yang terdiri dari 10 sektor pemangku kepentingan BPBD yang akan bekerjasama membantu jalannya proses kebencanaan. 10 sektor yang hadir adalah Dinas Pekerja Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perekonomian, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta dihadiri oleh Polres Magelang. Seperti yang dikatakan oleh gunawan mengenai gladi posko:

“Gladi posko itu praktek di ruangan, pembagian tugas kamu nanti longistik, kamu dapur umum, kamu komunikasi, kamu keamanan.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Simulasi ini didesain layaknya yang terjadi pada saat bencana berdasarkan skenario yang telah dibuat. Kegiatan pertama gladi posko adalah membahas tentang penyusunan prosedur tetap (protap) masing-masing desa. Protap yang telah diberikan kepada masing-masing desa diolah kembali dan dianalisis kekurangan dari protap tersebut. Isi dari protap tersebut berupa draft yang perlu dilakukan oleh masing-masing desa pada saat kenaikan

⁷³. Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan bencana. “Pedoman Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana”. hal 58.

status Gunung Merapi yang terdiri dari normal, waspada, siaga, dan awas. Misalkan protap kondisi normal Desa Kalibening sebagai desa terdampak yang berada di kawasan rawan bencana 3 :

1. Menyusun dokumen rencana kontijensi erupsi Gunung Merapi tingkat desa.
2. Menetapkan petunjuk prosedur tetap (Protap) sebagai pedoman perangkat desa.
3. Mensosialisasikan aturan atau petunjuk guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di desa.
4. Mensosialisasikan sistem peringatan dini.
5. Menentukan lokasi titik kumpul.
6. Menentukan jalur evakuasi yang akan dipergunakan.
7. Menentukan kebutuhan dan ketersediaan armada (transportasi).
8. Melakukan pendataan warga terutama kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, balita dan difabel.
9. Menentukan kebutuhan dan ketersediaan alat komunikasi.
10. Selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten tentang peningkatan aktivitas Gunung Merapi.
11. Melakukan pembagian tugas dan koordinasi masing-masing sektor siaga bencana desa.
12. Melakukan pendataan hewan ternak.
13. Melakukan koordinasi dengan desa penyangga untuk program *sister village*.
14. Negosiasi persiapan tempat evakuasi akhir ke desa penyangga (Tanjung dan Adikarto)
15. Rapat koordinasi dan komunikasi dengan desa penyangga.
16. Mengoptimalkan SID
17. Penyelenggaraan gladi posko dan gladi lapang
18. Memerlukan koordinator evakuasi perdusun

Salah satu warga Kalibening yakni Suwarno mengatakan bahwa, protap yang diberikan akan disosialisasikan kepada anggota OPRB desa saja yang selanjutnya akan dilakukan sesuai protap yang telah diberikan oleh BPBD tanggal 17 november 2017 pada saat gladi posko. Hal itu dikarenakan OPRB desa merupakan wakil desa yang akan membantu pada saat terjadinya bencana erupsi gunung merapi. Sama halnya dengan Desa Kalibening, Desa Adikarto dan Desa Tanjung sebagai desa penyangga juga membuat protap, namun ada perbedaan pada nomor 15 dan 16 pada protap desa penyanggah.

Yakni nomer 15 adalah mengadakan apel kesiapsiagaan relawan desa. Sedangkan Nomor 16 adalah silaturahmi dengan pihak calon pengungsi dari KRB III dan desa penyangga. Selain kedua nomor tersebut prosedur selebihnya sama dengan Desa Kalibening. Salah satu warga Desa Adikarto yakni Bapak Alam mengatakan bahwa protap yang telah dibuat nantinya akan disosialisasikan kepada warga Desa Adiakarto agar mereka juga memahami prosedur yang telah dibuat.

“Nanti protap yang udah disusun rapi itu di sosialisasikan ke warga, jadi nanti tiap kepala dusun mensosialisasikan protap yang nanti kita buat ke dusunnya masing-masing”. (Wawancara Alam, 17 November 2017)

Setelah melakukan penyusunan protap selanjutnya peserta melakukan simulasi yang dilakukan di Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Desa Tanjung. Simulasi tersebut dilakukan menggunakan skenario yang telah disiapkan, skenario tersebut berisi kenaikan status Gunung Merapi dari normal, waspada, siaga hingga awas dan cara menyikapinya. Pada awal kenaikan status gunung merapi dari normal menuju waspada, terlihat warga dapat mengikuti skenario yang telah dibuat, warga terlihat santai mengikuti skenario. Namun ketika kenaikan status naik menjadi siaga, warga mulai sibuk melakukan tugasnya masing-masing yang terbagi ke dalam 10 sektor.

Warga semakin terlihat sibuk mengurus sektornya masing-masing ketika kenaikan status sudah mencapai awas yang diumpamakan pengungsi sudah datang. Pada sektor posko sibuk mencatat identitas para pengungsi, kemudian sektor kesehatan yang sibuk menerima pasien, sektor logistik yang banyak menerima bantuan berupa pangan dan sandang, begitupun dengan sektor lainnya. Pada saat warga sibuk dengan tugasnya masing-masing, warga diberikan permasalahan berupa kasus yang diberikan kepada setiap sektor dan warga diuji untuk menyelesaikan permasalahan tersebut hingga batas waktu yang ditentukan.

Ketika kasus yang diberikan semakin banyak, warga terlihat kebingungan, sehingga menimbulkan keributan kecil. Misalkan saja, sektor posko yang pada saat itu terdapat banyak warga yang memenuhi meja tersebut karena kebingungan dalam mendata pengungsi yang masuk, padahal seharusnya meja tersebut hanya dapat dijaga oleh 3 orang dari 3 desa. Selain sektor posko, sektor komunikasi yang terlihat kosong mejanya dan lupa mencatat setiap informasi kenaikan status sehingga ketika ada yang bertanya kenaikan status sektor komunikasi bingung dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Kemudian sektor logistik yang mendapat banyak permintaan dari sektor lain, disamping itu kebutuhan yang diminta tidak ada di sektor logistik, dan tindakan yang

diambil adalah menunggu seseorang atau instansi memberikan bantuan, seharusnya sektor logistik bisa memintanya kepada komandan pos lapangan. Akibat dari satu kesalahan tersebut kebutuhan sektor lain menjadi terhambat dan masalah pun ada yang tidak terpecahkan. Seperti sektor kesehatan yang membutuhkan obat-obatan namun obat tersebut tidak ada, padahal pasien harus segera mungkin diberikan pertolongan pertama.

Tujuan diberikan kasus adalah untuk melatih masyarakat berpikir cepat dalam menyelesaikan suatu masalah, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Gladi posko juga dapat menguji sampai dimana kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana ketika masalah satu persatu datang. tidak hanya itu, gladi posko juga dapat menguji personil di level manajerial dan menguji tanggung jawab setiap sektor.



Gambar 3.2 Spanduk simulasi gladi posko dan gladi lapang
(Sumber : Dokumen pribadi 17 November 2017)

E. Simulasi (Gladi Lapangan)

Gladi lapangan merupakan metode latihan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaku dengan mempergunakan gerakan menguji keterampilan operasional dan fungsional institusi dalam situasi yang menggambarkan realita kedaruratan dampak bencana di daerah latihan yang sesungguhnya.⁷⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa gladi lapangan merupakan simulasi yang dilakukan di luar ruangan bertujuan untuk menyempurnakan keterampilan dan pengetahuan dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi. Seperti yang dijelaskan oleh Gunawan mengenai gladi lapangan.

⁷⁴ . Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan bencana. "Pedoman Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana". hal 64

“Gladi lapangnya terus dipraktikan di lapangan misalkan kalo merapi meletus 30 menit kemudian naik menjadi siaga, harus dipraktikan siapa berperan apa siapa melakukan apa dengan pembagian tugas itu.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Sama halnya dengan gladi posko, gladi lapangan ini didesain sedemikian rupa seperti pada saat bencana erupsi Merapi tiba. Berdasarkan skenario yang telah dibuat, setiap sektor desa mempersiapkan tugasnya masing-masing seperti yang telah dilakukan pada saat simulasi gladi posko. Seperti yang dilakukan BPBD pada tanggal 18 November 2017 mengadakan simulasi gladi lapang terhadap Desa Kalibening Kecamatan Dukun, Desa Adikarto dan Desa Tanjung Kecamatan Muntilan.

Simulasi tersebut dilakukan mulai pukul 09.00 hingga pukul 14.00, berlokasi di Desa Adikarto dan Desa Tanjung. Kegiatan simulasi gladi lapang mempraktikkan cara mengevakuasi warga yang baik dan benar, yakni dengan mendahulukan kelompok rentan. Peserta yang mengikuti kegiatan terdiri dari warga Desa Kalibening sejumlah 250 orang, terbagi dalam 175 orang ditempatkan di Desa Adikarto dan 175 orang sisanya ditempatkan di desa tanjung.

Proses simulasi diawali dengan proses mengevakuasi warga Desa Kalibening menuju Desa Adikarto dan Desa Tanjung. Skenario Tahap pertama yakni informasi dari BPPTKG mengenai kenaikan status Gunung Merapi dari normal menjadi waspada, informasi yang diterima oleh BPBD yang kemudian disampaikan kepada pos lapangan dan Kepala Desa Kalibening, Desa Adikarto, dan Desa Tanjung. Informasi yang telah didapatkan oleh OPRB setiap desa diharuskan untuk disosialisasikan kepada warga terkait kenaikan status Gunung Merapi. Selain memberi tahu informasi OPRB masing-masing desa mengecek kembali kesiapan peralatan, sarana dan prasarana.

Skenario tahap kedua yakni informasi kenaikan status yang diterbitkan oleh BPPTKG dari waspada menjadi siaga. BPBD menerima surat putusan kenaikan status Gunung Merapi lalu menerbitkan surat kenaikan status Gunung Merapi dan memberikannya kepada pos lapangan dan Kepala Desa Kalibening, Adikarto dan Tanjung. Setelah informasi diterima oleh kepala desa, selanjutnya informasi tersebut diharuskan diumumkan di masjid agar warga lainnya mengetahui kenaikan status Merapi. Setelah itu OPRB Desa Kalibening melakukan koordinasi persiapan evakuasi sesuai dengan protap masing masing desa termasuk alat transportasi yang akan digunakan.

Skenario tahap ketiga yakni informasi kenaikan status Gunung Merapi yang diterbitkan oleh BPPTKG dari siaga menjadi awas. BPBD menerima surat dari Bpptkg dan

menerbitkannya, kemudian memberikannya pada pos lapangan dan Kepala Desa Adikarto, Tanjung dan Adikarto. Setelah itu OPRB masing-masing desa mengumumkan surat putusan dari BPBD melalui pengeras suara di masjid desa. Selanjutnya OPRB Desa Kalibening mengumpulkan warga di titik kumpul yang telah disepakati.

Setelah warga berkumpul OPRB melakukan pendataan warga sebelum dinaikkan ke dalam kendaraan evakuasi. Sepanjang proses evakuasi warga, OPRB Desa Kalibening harus selalu berkoordinasi dengan warga Desa Adikarto dan Desa Tanjung. Kendaraan evakuasi mulai berjalan pada pukul 09.50. OPRB Desa Kalibening menjalankan protap evakuasi dan rambu-rabu yang telah disepakati. Warga Desa Kalibening sampai di TEA Desa Adikarto dan TEA Desa Tanjung pada pukul 10.50. Sesampainya di lokasi desa saudara, OPRB Desa Adikarto dan Desa Tanjung melakukan pendataan penyintas warga Desa Kalibening.



Gambar 3.3 Proses evakuasi dari Desa Kalibening menuju Desa Tanjung dan Desa Adikarto

(Sumber : Dokumen pribadi, 18 November 2017)

Seluruh OPRB desa memberikan pelayanan pada penyintas di TEA Desa Adikarto dan Desa Tanjung. Semua sektor dalam pos penanganan darurat kebencanaan menjalankan tugasnya masing-masing. Terlihat dengan sektor kesehatan yang menanyakan penyintas mengenai keluhan kesehatan selama perjalanan berlangsung. Kemudian sektor posko yang mendata dan mengecek para penyintas yang sudah datang dan sebagainya. Tahap keempat

pada pukul 12.30 Bpptkg menerbitkan surat mengenai penurunan status Gunung Merapi dari awas menuju normal. Setelah surat tersebut diterima oleh BPBD, kemudian BPBD menerbitkan surat status normal dan penyintas dapat kembali kerumah masing-masing. Alat yang dipakai selama proses simulasi adalah dengan menggunakan HT yang sudah dihubungkan kepada satu sama lain.

Namun selama proses simulasi dilakukan, terdapat ketidaksesuaian dengan rencana atau skenario yang telah dibuat. Ketidaksesuaian itu adalah Kepala Desa Kalibening selama proses kenaikan status tidak menerima surat putusan kenaikan status Gunung Merapi dari BPBD. Oleh karena itu banyak warga Desa Kalibening yang menanyakan tentang kenaikan status yang kurang jelas. Anggota OPRB tidak mengumumkan kenaikan status gunung merapi lewat pengeras suara masjid atau mushola. Truk yang mengangkut warga Desa Kalibening tidak mengikuti jalur menuju Desa Adikarto yang sudah disiapkan.



Gambar 3.4 Suasana Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Desa Adikarto pada saat gladi lapang
(Sumber : Dokumen pribadi, 18 November 2017)

3.4. Evaluasi Program Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi BPBD Magelang

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan pendapat atau penilaian dari Sinam M Sutarmono selaku ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) mengenai program BPBD Magelang. Menurut Sinam, terdapat tiga kelemahan dari sister village. Pertama salah satu dari pasangan desa akan menjadi beban bagi pasangan desa satunya karena penyintas akan bertahan di tempat yang aman dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Peralnya bencana besar seperti gunung Merapi tidak dapat ditangani dalam kurun waktu singkat namun memerlukan jangka waktu yang panjang hingga warga dapat kembali ke

desa masing-masing. Proses jangka waktu yang panjang tersebut akan membuat desa penyanggah merasakan beban atau ketidaknyamanan karena harus menampung penyintas.

“Nah bagaimana relasi antar desa ini terjadi antara desa A dan desa B, kalau sister village yang diperuntukan untuk desa A yang menampung desa B dalam kondisi bencana mungkin seminggu masih nyaman untuk menerima tamu tapi lama-lama dia merasa seperti beban nah itu kemudian untuk menolong desa B, apa yang akan desa A dapatkan selama menolong.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Kedua, *sister village* ini masih menjadi *by project* yang artinya *sister village* masih digunakan sebagai lingkup internalisasi kebencanaan belum meluas ke ranah ekonomi, sosial dan budaya, serta belum menggambarkan bahwa “kita adalah saudara”. Ketiga, *sister village* menjadi sebuah *brand* BPBD Magelang. Artinya, kata *sister village* masih menjadi *brand* sebuah proyek pemerintah dimana selain kata yang diserap dalam bahasa asing *sister village* juga menjadi padanan kata yang elit, belum dijiwai di kalangan masyarakat Jawa yang mengakibatkan sulit dalam memahami arti kata *sister village* itu sendiri, khususnya bagi kelompok rentan.

“Kedua saat ini kelemahannya masih by proyek, jadi masih didesain oleh pemerintah, tapi kemudian internalisasi bahwa kamu adalah sahabatku itu masih perlu ditingkatkan itu belum sampai situ levelnya masih perbincangan elitlah tapi bagaimana kemudian kedekatan hubungan sosial antara desa A dan desa B ini belum kelihatan. Ketiga ini kelihatan dari sisi bahasa saja kan itu belum menjadi bagian dari inisiasi warga kalimatnya masih diserap dari bahasa asing ya gapapa sih tapi kan kemudian ini harus diinternalisasi warga harus tau, harus meyakini dan kemudian akan menggunakan itu saya kira kelemahan nya disitu.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Solusi dari kelemahan tersebut, pemerintah kabupaten atau desa harus mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desa rawan bencana agar ketika penyintas berada di desa saudaranya dalam jangka waktu yang lama masing-masing desa dapat berbagi ilmu agar tidak bosan. Misalkan ilmu tersebut dapat berupa kesenian yang dimiliki masing-masing desa untuk dijadikan hiburan dan lainnya.

“Nah sister village harus dikembangkan lebih luas mekanisme misalnya potensi masing-masing harus diidentifikasi untuk bisa mensupply jadi memberi dan menerima. Misalnya di daerah atas ini punya kesenian-kesenian tentu kemudian desa yang di bawah kalo sedang memerlukan hiburan bisa didukung dengan kesenian yang ada di desa atas. Atau misalkan di sini produsen sayur kedepannya sister village harus dikembangkan dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, tidak sebatas pada situasi bencana.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Kedua *sister village* dapat dikembangkan lagi dengan luas untuk lebih menginternalisasi arti kata “persaudaraan” dengan cara tidak hanya mempertemukan desa

saudara dalam kegiatan kebencanaan seperti simulasi, pelatihan dan sosialisasi saja, namun kegiatan lain dapat menjadi solusi misalkan seperti “arisan desa saudara”, *out bond*, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan untuk memperkuat rasa persaudaraan yang menjadikan mereka lebih dekat lebih mengenal satu sama lain dalam berbagai kegiatan tidak hanya dalam konteks kebencanaan saja. *Brand sister village* sendiri dapat disederhanakan misalkan “seduluran deso”, dimana kata tersebut dapat sangat mudah dimengerti dan diingat oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk kelompok rentan.

“Yang saya ketahui tidak semua warga memahami bahkan kata sister vilage itu juga suatu kelemahan harus dicari padanan kata yang lebih Jawani yang lebih Jawa, misalkan “seduluran deso”. Kata “sister village” itu dalam tanda kutip masih semacam brand projek kalo warga kan masih seduluran deso” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Selain itu pendapat mengenai desa tangguh bencana tidak jauh berbeda dengan program *sister village* menurut Sinam, program destana sangat menarik karena masyarakat di kawasan rawan bencana diberikan pengetahuan baru mengenai wajib latih, diselenggarakan oleh pemerintah maupun kelompok atau instansi tertentu untuk memberikan wajib latih. Hal itu dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat terutama pada pengurangan resiko bencana, serta membangun inisiatif pada masyarakat.

Kelemahan dari program desa tangguh bencana pada umumnya sama dengan *sister village* yang masih dalam level elit. Penggunaan program yang monoton seperti sosialisasi, pelatihan, simulasi perlu dikembangkan lagi karena hingga saat ini masih ada masyarakat yang menyepelkan program pemerintah khususnya bagi masyarakat yang terdapat di kawasan rawan bencana yang daerahnya tergolong aman dari bencana. Hal yang dilakukan pemerintah adalah menggunakan uang agar masyarakat datang ke program tersebut untuk mempersingkat waktu.

Solusi dari permasalahan tersebut untuk menangani masyarakat yang acuh terhadap program pemerintah disebabkan karena adanya kesalahan pada program tersebut. Misalkan sosialisasi tidak harus membentuk acara baru, namun sosialisasi dapat disisipkan ke dalam kegiatan warga seperti mengunjungi posyandu, sosialisasi di rapat RT atau rapat RW, sosialisasi di arisan dasa wisma, dan kumpulan-kumpulan warga lainnya. Hal ini juga dapat menekan biaya program Destana yang seharusnya diberikan ke warga, uang transport bisa dialokasikan pada hal lain seperti membuat leaflet, poster dan lain sebagainya.

“Mungkin sosialisasinya salah. Jadi yang yang dimaksud soslialisasi adalah bikin acara di kantor desa padahal kalo media sosialisasi kan kita bisa datang ke posyandu rapat RT yasinan ke rapat apa, tidak harus membuat acar baru justru

lebih baik kita menggunakan acara-acara yang ada di masyarakat pengajian nah itu dimanfaatkan atau belum. Kalau mengandalkan bikin acara baru itu urusannya kegiatan tapi menurut saya lebih penting bukan kegitannya tapi mereka cepet tau. Pertama irit Cuma kelemahannya kalo mengikuti acara warga biasanya malam kegitannya waktunya kan mengikuti warga.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Selain program BPBD Magelang Sinam juga memberikan penilaiannya mengenai model komunikasi keadaan normal dan keadaan darurat yang telah penulis susun, berikut adalah penilaian model komunikasi keadaan normal. Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat peran mitigasi bencana dalam menghadapi bencana sudah cukup baik. Namun ketika pada saat bencana tidak sepenuhnya kegiatan yang telah dilakukan dapat berjalan dengan baik, mengingat dalam satu pasangan desa bersaudara hanya mendapatkan keseluruhan program mitigasi bencana satu tahun sekali. Jadi butuh waktu yang lama menunggu giliran desa lainnya untuk mengulang kegiatan yang sama. Dalam kurun waktu yang lama dapat membuat ingatan seseorang menjadi lupa apa yang seharusnya dilakukan, atau mereka merasa tidak yakin apa yang seharusnya dilakukan pada saat bencana erupsi Merapi itu tiba.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai inti sari dari hasil temuan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Penulis memiliki tiga rumusan masalah yakni, mencari bagaimana strategi mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD, bagaimana BPBD mengkomunikasikan strategi mitigasi bencana kepada masyarakat dan stakeholder terkait, serta pola komunikasi apa yang dilakukan oleh BPBD selama mengkomunikasikan strategi penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi. Untuk itu pada bab ini penulis hanya membahas model komunikasi bencana pada masa normal dan pada masa tanggap darurat, selain itu penulis juga membahas pola komunikasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang selama mereka mengkomunikasikan strategi penanggulangan bencana secara mendalam.

Aliran informasi tidak mengalir secara harfiah. Pada nyatanya informasi mengalir secara dinamis (berubah-ubah). Ada penggerak yang memproses sebuah pesan untuk disampaikan dan diinterpretasikan menjadi sebuah informasi yang utuh. Dalam aliran komunikasi kemudian lahirlah pola komunikasi yang merupakan jaringan aliran komunikasi yang menggunakan saluran untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain melibatkan sumber pesan dan penerima membentuk suatu struktur atau pola. Penulis menggunakan pola komunikasi seperti yang ada di buku Joseph. A Devito. Terdapat lima pola komunikasi yaitu pola komunikasi lingkaran (*circle*), pola komunikasi huruf “Y”, pola komunikasi roda (*wheel*), pola komunikasi rantai (*chain*), dan pola komunikasi bebas (*all channel*).⁷⁵ Dengan ini penulis membagi pola komunikasi menjadi dua bagian yaitu:

4.1. Model Komunikasi Bencana Erupsi Merapi Pada Masa Normal

Model komunikasi bencana keadaan normal adalah alur komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah selama keadaan normal. Keadaan normal yang di maksud adalah status Gunung Merapi dari kondisi normal hingga waspada. Pada kondisi normal BPBD cenderung memanfaatkan situasi tersebut untuk meningkatkan kapasitas masyarakat seperti apel siaga, sosialisasi, pelatihan dan simulasi. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

⁷⁵ Joseph A Devito. Komunikasi Antar Manusia Kuliah Dasar. *Terj*, Agus Maulana. (Vol.5 Jakarta: *Professional books* 1997) hal.345

Khusus untuk informasi mengenai aktifitas Gunung Merapi, BPBD mendapatkan laporan dari BPPTKG Yogyakarta, karena BPBD tidak sembarang menerima informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kegunungapian dan Geologi atau yang biasa disebut sebagai BPPTKG merupakan unit pelaksanaan teknis (UPT) setingkat eselon III yang berada dibawah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

BPPTKG bertugas untuk melakukan penelitian, penyelidikan, pengembangan metode teknologi dan instrumentasi, pengelolaansarana dan prasarana laboratorium kebencanaan geologi serta mitigasi Gunung Merapi.⁷⁶ Biasanya Bpptkg mengirim informasi kepada BPBD Magelang setiap 2 minggu sekali untuk memantau lebih lanjut mengenai aktifitas Gunung Merapi. Seperti yang dikatakan Gunawan

“BPPTKG Yogyakarta dia yang menetapkan dari normal ke waspada dan siaga ke awas.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Isi dari surat yang dikirim oleh BPPTKG adalah mengenai hasil pengamatan kegempaan dan curah hujan yang dapat menandakan status merapi. Selain itu di dalam surat BPPTKG merekomendasikan kegiatan masyarakat seperti pendakian wisata hanya sampai pada batas yang ditentukan. Adapun contoh pesan aktifitas Gunung Merapi dari BPPTKG yang dikimkan melalui media sosial WhastApp secara personal kepada Didik selaku Kasi Kedaruratan BPBD Magelang pada tanggal 27 Oktober – 2 November 2017.

LAPORAN AKTIVITAS GUNUNG MERAPI

Tanggal 27 Oktober - 2 November 2017

I. HASIL PENGAMATAN

Visual

Cuaca cerah terjadi pada pagi dan malam hari, siang dan sore hari berkabut. Asap berwarna putih, ketebalan sedang dengan tekanan gas lemah, tinggi maksimum 80 m condong ke Barat, teramati dari Pos Pengamatan Kaliurang pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 08:15 WIB. Saat ini kondisi morfologi G. Merapi belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan (lampiran 1a).

Kegempaan

Dalam minggu ini kegempaan G. Merapi tercatat 1 kali gempa multiphase (MP), 11 kali gempa guguran (RF), dan 12 kali gempa tektonik (TT). Aktivitas kegempaan minggu ini masih berada dalam kategori normal. Lampiran 1b menunjukkan grafik kegempaan di G. Merapi.

Deformasi

Data tiltmeter yang diperoleh dari Stasiun Selokopo Atas masih fluktuatif dalam batas toleransi alat, untuk sumbu U–S sebesar -19.16 μ rad. Pengukuran EDM menghasilkan nilai jarak tunjam rata-rata untuk RK2 (sektor selatan) sebesar 6506,94 m. Data pemantauan baseline GPS Stasiun Selo–Pasarubar menunjukkan jarak sebesar 4259.20 m.

⁷⁶ <http://merapi.bgl.esdm.go.id/pub/page.php?id=3> Tugas dan Fungsi BPPTKG Yogyakarta. (Di akses Senin 26 Februari 2018)

Deformasi G. Merapi yang dipantau secara instrumental dengan menggunakan tiltmeter, EDM dan GPS tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Lampiran 1c menunjukkan grafik deformasi di G. Merapi.

Hujan dan Lahar

Pada minggu ini terjadi hujan di Pos Pengamatan Gunung Merapi dengan intensitas curah hujan tertinggi sebesar 38 mm/jam selama 55 menit di Pos Ngepos pada tanggal 28 Oktober 2017. Lampiran 1d menunjukkan grafik curah hujan di G. Merapi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental maka aktivitas G. Merapi dinyatakan dalam tingkat aktivitas **“NORMAL”**.

Saran

Dengan tingkat aktivitas G. Merapi **“NORMAL”** kepada para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana G. Merapi direkomendasikan sebagai berikut:

- Kegiatan pendakian G. Merapi direkomendasikan hanya sampai di Pasarbubar, kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Kondisi morfologi puncak G. Merapi saat ini rawan terjadi longsor, sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan para pendaki.
- Jika terjadi perubahan aktivitas G. Merapi yang signifikan maka tingkat aktivitas G. Merapi akan segera ditinjau kembali.
- Mengingat saat ini mulai memasuki musim hujan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya lahar.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 November 2017
a.n. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi,
Kepala BPPTKG

I Gusti Made Agung Nandaka
NIP. 19641227 199303 1 005

II. LAMPIRAN

- a) b)
- c) d)

Lampiran 1. Pengamatan visual melalui kamera Deles, foto diambil pada tanggal 1 November 2017 (a). Grafik data pemantauan G. Merapi menggunakan metode seismik (b). Grafik data pemantauan G. Merapi menggunakan metode deformasi tiltmeter Stasiun Selokopo Atas, EDM Reflektor Kaliurang 2, dan baseline GPS Selo–Pasarbubar (c). Grafik curah hujan di Pos Pengamatan Gunung Merapi (d).

Sumber data:

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)
Jl. Cendana No 15 Yogyakarta 55166
Telp. (0274) 514192, 514180 Fax. (0274) 563630
Surel : bpptkg@esdm.go.id
Daring : www.merapi.bgl.esdm.go.id
Twitter : @BPPTKG
FB : Bpptkg Channel, Info Bpptkg
IG : BPPTKG
Youtube : BPPTKG Channel
Radio Frek : 165 075 Mhz

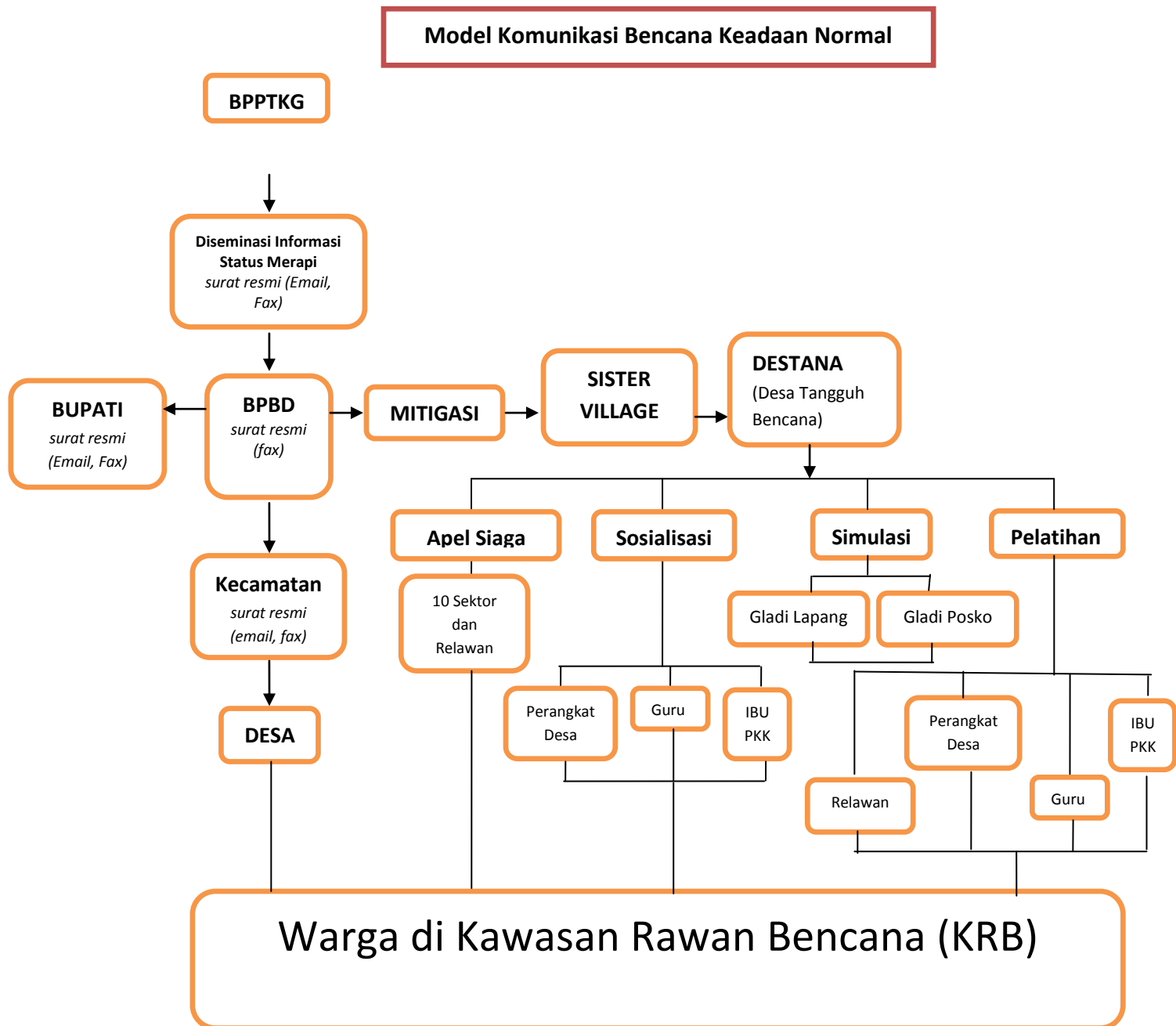
Dalam keadaan normal, informasi mengenai aktifitas Gunung Merapi disampaikan oleh BPPTKG kepada BPBD Magelang melalui surat. Tidak hanya surat, BPPTKG juga mengirim informasi mengenai aktifitas Gunung Merapi melalui media sosial *E-mail* dan *WhatsApp* secara personal kepada Ketua Bidang Mitigasi Bencana BPBD Magelang agar informasi lebih cepat diterima oleh BPBD dan dapat dicek kembali. Setelah informasi dapat dipertanggung jawabkan informasi tersebut disampaikan kepada kepala daerah yakni Bupati Magelang melalui surat. Selain disampaikan kepada Bupati, informasi tersebut juga di kirim kepada kecamatan, terakhir kepada desa. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Bidang Mitigasi Bencana BPBD Magelang yakni Bapak Gunawan:

“Kita kan dapat rutin setiap 2 minggu sekali hasil kita ditembusin hasil pengukuran kegempaan, curah hujannya disimpulkan Merapi dalam status normal. Kegiatan pendakian direkomendasi hanya sampai di pasar bubar.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Selama dalam keadaan normal, BPBD Magelang memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperdalam mitigasi bencana yang nantinya akan sangat berkaitan dengan rencana kontijensi pada keadaan darurat. Disamping memperdalam konsep atau rancangan, BPBD juga menyampaikan informasi kenaikan status ke tingkat kecamatan dan desa. Informasi tersebut disampaikan melalui surat resmi atau *E-mail* untuk disampaikan lagi pada warga desa. Ketika status Merapi masih dikatakan normal dan waspada, BPBD masih memberikan peringatan dini berupa himbauan, namun ketika status Merapi dikatakan siaga baru lah BPBD melakukan tindakan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gunawan:

“Kalo normal dan waspada yang sifatnya peringatan dini itu kita belum action hanya memberikan himbauan-himbawan.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Himbauan tersebut disisipkan melalui program kerja mitigasi bencana BPBD yakni pada saat sosialisasi berbasis perempuan, sosialisasi berbasis perangkat desa, dan sosialisasi berbasis guru. Selain itu, informasi mengenai aktifitas Gunung Merapi disampaikan juga melalui pelatihan berbasis perempuan, berbasis perangkat desa, berbasis guru dan berbasis relawan, serta melalui program simulasi baik gladi posko maupun gladi lapang. Berikut ini adalah gambaran model komunikasi bencana pada saat keadaan normal yang telah disusun oleh penulis berdasarkan hasil wawancara kepada BPBD Kabupaten Magelang Jawa Tengah.



Bagan 3.2 Model Komunikasi Bencana Keadaan Normal

Selain itu kelemahan dari model komunikasi bencana keadaan normal adalah penggunaan fax dalam menyampaikan informasi dinilai kurang efektif. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi penggunaan media di kalangan masyarakat yang lebih dominan.

Kendala dalam menggunakan *fax* adalah berita yang diterima sudah lampau, karena ciri-ciri informasi yang baik adalah memiliki nilai kebaruan dan keakuratan.

Mengirim informasi lewat *e-mail* pun terkadang dibuka dan terkadang tidak. Selain itu penyampaian informasi secara langsung berupa himbauan merupakan pilihan yang cukup efektif, namun adanya keterbatasan masa menjadi kendala utama. Umumnya penyampaian informasi berupa himbauan akan efektif bila audiens yang hadir dibawah 50 orang, namun apabila yang hadir melebihi 50 orang itu sudah tidak efektif akan banyak noise yang terjadi. Informasi yang disampaikan pun tidak mengandung unsur kebaruan mengingat BPPTKG mengirim informasi mengenai status Merapi setiap dua minggu sekali.

Solusi dari kelemahan mengenai model komunikasi bencana keadaan normal adalah memilih media pengiriman pesan yang lebih cepat. Dengan memanfaatkan internet. Salah satunya membuat grup *whatsapp* yang terdiri dari orang-orang penting seperti kepala semua OPRB, kepala desa semua KRB atau yang lainnya. Grup *whatsapp* memudahkan dalam penyampaian informasi secara cepat dan akurat kepada anggota yang berada di dalam grup tersebut. Dengan membuat grup di media sosial unsur nilai berita yang akurat dan kebaruan dapat terjaga. Pemerintah juga perlu mengidentifikasi media apa yang dominan dipakai oleh masyarakat.

“Kalau di Boyolali beberapa informasi kebencanaan itu sistem komunikasinya kita itu ada group, jadi kalo ada apa-apa ini cepat yang di grup sini itu ada sekitar 200 orang itu semua orang ini Pak Sinunu Kepala BPBD Pak Yoyok ini Kepala Pusdalops, harusnya dalam kondisi apapun informasi sepanjang bukan, tapi etikanya memang harus dijaga harusnya dibuat secepat mungkin jadi informasi itu cepat tapi punya tingkat akurasi yang tinggi. Nah informasinya dari mana, kalau misalnya di desa ini informasinya mendapat nah grup whatsapp itu bisa cepat. Karena kemudian ini butuh pengambilan keputusan yang cepat nah kalo pilihan mediumnya masih sesuatu yang fax misalnya maka media itu harus dipastikan dipakai banyak orang.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

4.1.1. Pola Komunikasi Stuktur Rantai (*chain*) dan Pola Komunikasi Struktur Roda (*wheel*) Pada Masa Normal

Ketika situasi dalam keadaan normal, peran BPBD tentu sangat penting. Meningkatkan kapasitas, adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu masyarakat supaya mampu menghadapi bencana secara mandiri minimal menolong diri sendiri. Dengan cara memperkuat mitigasi bencana. Mempersiapkan segalanya termasuk mempersiapkan strategi (lihat Bab 3). Berdasarkan hasil yang di

temukan, penulis membuat model alur komunikasi bencana pada masa normal yang diperoleh dari hasil wawancara. Di dalam model tersebut terdapat diseminasi informasi status Gunung Merapi.

BPPTKG mengirim informasi tentang status Merapi setiap dua minggu sekali melalui surat resmi, *fax*, media sosial yakni *e-mail* ke BPBDMagelang@gmail.com yang dioperasikan oleh Pusdalops, dan whatsapp secara personal kepada kepala maupun ketua seksi dimasing-masing bidang. Setelah sampai dan diterima oleh BPBD, kemudian BPBD meneruskan informasi status Gunung Merapi kepada Bupati melalui surat resmi dan *e-mail* karena, Bupati adalah penanggung jawab tingkat kabupaten. Jadi segala informasi yang menyangkut tentang Kabupaten Magelang, Bupati harus mengetahuinya. Selain kepada Bupati, BPBD juga mengirim status Gunung Merapi kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melalui surat resmi, *e-mail*, dan *fax*.

Penulis menemukan, bahwa terdapat alur komunikasi secara struktural atau secara formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengirim pesan. Dimana informasi yang diterima oleh BPBD, akan dikirim secara berurutan kepada Bupati, kepada kecamatan dan kepada desa rawan bencana, umumnya melalui surat resmi. Penggunaan surat resmi menandakan bahwa informasi yang disampaikan secara beruntun memperlihatkan alur komunikasi “siapa berbicara kepada siapa”.⁷⁷ Artinya, ada tingkat hirarki yang mengendalikan struktur komunikasi dengan menggunakan sarana tertentu, seperti menunjukan otoritas dan hubungan-hubungan kerja, penetapan kantor dan fungsi komunikasi khusus. Hal itu ditegaskan oleh Pace & Faules (2005) yang mengatakan bahwa, “penyampaian pesan secara berurutan merupakan bentuk komunikasi yang utama yang pasti terjadi dalam sebuah organisasi”.

Penulis menemukan bahwa BPBD memiliki posisi sentral pada saat keadaan normal. Dimana BPBD Kabupaten Magelang berhak meneruskan atau tidak meneruskan informasi yang diterima dari BPPTKG Yogyakarta. Hal itu sama dengan pola komunikasi rantai (*chain*). Devito (1997) mengatakan bahwa, orang yang berada di posisi tengah memiliki peran penting yang lebih besar sebagai pemimpin, dari pada mereka yang berada di posisi lain.⁷⁸ Meskipun secara hirarki Bupati menduduki peran lebih tinggi di tingkat pemerintah daerah dibandingkan tingkat SKPD lain. Akan tetapi informasi mengenai status

⁷⁷ R Wayne Pace & Don F Faules, Komunikasi Organisasi Strategi meningkatkan Kinerja Perusahaan, *terj.* Deddy Mulyana. (Bandung: Penerbitan Remaja Rosdakarya, 2005) hal.147

⁷⁸ Joseph A Devito . *Op.Cit.*, Hal 345

Gunung Merapi diterima lebih dahulu oleh BPBD selaku organisasi pemerintah yang menangani penanggulangan bencana secara langsung.

Pola komunikasi rantai (*chain*), memang memiliki kemiripan dengan pola lingkaran. Namun, perbedaannya pola lingkaran (*circle*) tidak memiliki ujung yang terputus, alur komunikasi pola lingkaran (*circle*) saling menyambung antara satu dengan yang lain. Sehingga orang yang menerima pesan terakhir akan meneruskan kembali pada orang yang mengirim pesan sebagai proses timbal balik. Sedangkan pola rantai (*chain*), memiliki ujung yang terputus pada alur komunikasi, kecuali orang yang paling ujung dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Sehingga pesan atau informasi yang disampaikan akan berhenti pada orang yang berada di akhir alur komunikasi atau berhenti pada orang yang dituju tanpa meneruskan kembali pesan atau informasi tersebut kepada orang lain atau kepada pengirim pesan. Kecuali orang yang berada ditujuan akhir penerima informasi berkomunikasi dengan satu orang pengirim sebelumnya.

Seperti yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang harus mengirim informasi mengenai status Gunung Merapi hingga ke tingkat pemerintah desa atau bahkan hingga ke warga desa kawasan rawan bencana. Penggunaan pola komunikasi rantai (*chain*) memakai medium surat resmi secara formal, menyebabkan informasi yang dikirim berlangsung pada waktu yang tidak berurutan. Jadi, informasi tersebut akan tiba di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda juga. Penggunaan surat yang menjadi mediun akan mengurangi tingkat kebaruan, artinya informasi yang dikirim secara berurutan menjadi lampau.



Gambar 4.1. Pola Komunikasi Rantai (*Chain*)

Selain alur komunikasi struktural atau formal, penulis juga menemukan alur komunikasi non struktural atau informal, dalam model komunikasi pada masa normal. BPBD Kabupaten Magelang mengirim informasi secara struktural atau berurutan kepada Bupati dan pemerintah desa, di sisi lain BPBD juga mengirim informasi mengenai status Gunung Merapi kepada warga desa secara langsung atau tatap muka. Tidak hanya menyampaikan informasi mengenai status Gunung Merapi saja, namun BPBD juga

memiliki program mitigasi bencana yang dilakukan setiap tahunnya kepada desa yang terletak di kawasan rawan bencana.

Dengan menggunakan konsep *sister village* yang menjadi program unggulan resiko penanggulangan bencana dimana BPBD Kabupaten Magelang, berhasil memasang desa sebanyak 20 pasang desa yang dibuat dalam bentuk kesepakatan berupa MoU antara pasangan desa. Serta, mendukung program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang bersifat wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2012, tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Dalam program destana, terdapat empat kegiatan yakni apel siaga, pelatihan, sosialisasi dan simulasi. BPBD Kabupaten Magelang menginterpretasikan program *sister village* kedalam program destana, sekaligus menyebarkan informasi tentang status Gunung Merapi, berupa himbauan kepada perangkat desa, guru, wanita (Ibu-ibu PKK), dan relawan, secara tatap muka dalam bentuk kegiatan destana. Dipilihnya himbauan karena status Gunung Merapi masih dinyatakan normal oleh BPPTKG.

Sehingga, BPBD Kabupaten Magelang memiliki banyak waktu berkomunikasi langsung dengan warga secara tatap muka untuk menyampaikan informasi tersebut. Tidak hanya himbauan, namun BPBD Kabupaten Magelang juga menggunakan media lainnya seperti whatsapp, telepon, dan sms untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan destana. Sehingga, warga desa dapat berkomunikasi langsung dengan BPBD Kabupaten Magelang melalui perantara kegiatan destana dan media sosial, tanpa harus terganggu dengan struktur birokrasi.

Berdasarkan data tersebut penulis menemukan bahwa alur komunikasi yang dilakukan BPBD Magelang selain menggunakan pola komunikasi rantai (*chain*), mereka juga menggunakan pola komunikasi roda (*wheel*). Devito (1997) menjelaskan bahwa, struktur roda (*wheel*) memiliki pemimpin yang jelas, yaitu yang posisinya dipusat.⁷⁹ Dalam kata lain struktur roda (*wheel*) memiliki pemimpin, dimana pemimpin tersebut yang menduduki posisi sentral. Namun anggota lain juga dapat berkomunikasi dengan posisi sentral (pemimpin). Dalam hal ini pemilihan tatap muka dalam sebuah kegiatan destana menjadi pilihan yang tepat, karena BPBD Kabupaten Magelang yang menempati posisi sentral dapat menjelaskan informasi mengenai status Merapi secara langsung. Karena dalam satu kegiatan mereka dapat berkomunikasi secara langsung tanpa terhalang oleh birokrasi baik itu sesama warga desa maupun dari pemerintah desa ke BPBD.

⁷⁹ *Ibid.*,

Selain itu Devito (1997) menjelaskan posisi sentral tersebut merupakan satu-satunya yang dapat menerima dan mengirim pesan dari semua anggota.⁸⁰ Oleh karena itu jika seorang anggota ingin berkomunikasi dengan anggota lain, maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya.⁸¹ Pernyataan tersebut selaras dengan posisi BPBD yang menempati posisi sentral diantara kegiatan sosialisasi, pelatihan, apel siaga, dan simulasi. BPBD dapat menerima pesan dari wanita, guru, relawan dan perangkat desa disetiap kegiatan tersebut. Misalkan pesan berupa keluhan atau masukan terhadap kegiatan tersebut. Warga yang mengikuti kegiatan, dapat berkomunikasi langsung dengan BPBD, begitupun sebaliknya BPBD juga dapat berkomunikasi langsung dengan warga.



Gambar 4.2. Pola Komunikasi Struktur Roda (*wheel*)

Menurut penulis, pemilihan media untuk meneruskan informasi yang dikirim masing-masing pola yang berbeda adalah berawal dari sebuah “tujuan”. Pemilihan media surat, *fax* dan *e-mail* pada pola komunikasi rantai (*chain*) dan hanya dikirim kepada sesama instansi pemerintah, memiliki tujuan. Tujuan tersebut adalah pesan yang disampaikan bersifat umum, tidak memerlukan balasan atau timbal balik, serta informasinya mengabarkan untuk tindakan yang akan datang seperti yang terdapat dalam saran pada informasi mengenai status Gunung Merapi yang di berikan BPPTKG.

Misalkan “Kegiatan pendakian hanya sampai pasarbubar, kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Kondisi morfologi puncak G. Merapi saat ini rawan terjadi longsor, sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan para pendaki. Dan Mengingat saat ini mulai memasuki musim hujan,

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*, Hal, 382

masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya lahar.” Seperti yang dikemukakan oleh Pace & Faules (2005) bahwa pengiriman informasi berupa tulisan (surat) menjadi lebih efektif bila informasinya umum, tidak memerlukan kontak pribadi, serta informasinya berbentuk tindakan yang akan datang.⁸²

Begitupun dengan pemilihan media tatap muka atau himbuan dalam pola komunikasi struktur roda (*wheel*) pada kegiatan destana yang menginformasikan mengenai *sister village* dan informasi status Gunung Merapi memiliki tujuan. Tujuan dipilihnya tatap muka adalah untuk mendorong respon warga desa lebih aktif bertanya dan berdiskusi atau bahkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah pada saat diberikan informasi khusus baik berupa *sister village* maupun berupa informasi status Gunung Merapi.

Hal itu ditegaskan oleh pernyataan Pace & Faules (2005) mengatakan bahwa, salah satu kekayaan medium terdapat pada pertama, ketersediaan umpan balik seketika. Kedua kemampuan untuk menyampaikan isyarat berganda, bahasa, dan nada suara. Ketiga penggunaan bahasa ilmiah untuk menyamakan hal-hal pelik. Dan keempat fokus pribadi yang memungkinkan disertakannya perasaan dan emosi pribadi pada situasi penerima.⁸³ Jadi pertemuan tatap muka dipandang sebagai medium yang paling kaya karena antara pengirim dan penerima dapat berinteraksi langsung, dapat secara aktif bertukar pendapat menyediakan umpan balik. Sedangkan pemilihan media surat atau laporan termasuk ke dalam kategori miskin, karena pengirim dan penerima tidak dapat secara bebas berinteraksi memberikan umpan balik.

Dapat disimpulkan bahwa, model komunikasi normal yang telah disusun oleh penulis berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber terdapat dua pola komunikasi yakni pola komunikasi struktur rantai (*chain*) dan struktur roda (*wheel*). Pola komunikasi rantai (*chain*) menggunakan arus komunikasi ke bawah, dari BPBD yang menjadi posisi sentral mengirim pesan ke bawah yakni pemerintah desa menggunakan media surat resmi, *fax* dan *e-mail*. Menurut Devito (1997) Arus komunikasi ke bawah merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hirarki yang lebih tinggi ke tingkat hirarki yang lebih rendah.

Sedangkan pola komunikasi struktur roda (*wheel*), menggunakan arus komunikasi ke atas. Menurut Devito (1997) arus komunikasi ke atas merupakan tingkat hirarki yang dikirim dari yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Arus tersebut dilakukan pada saat kegiatan destana yang mempertemukan pemerintah daerah dan warga desa kawasan

⁸² R Wayne Pace & Don F Faules. *Op.Cit.* Hal 188

⁸³ *Ibid.*,

rawan bencana, berupa timbal balik salah satunya berupa pertanyaan, saran, atau bahkan ketidakpuasan yang dirasakan oleh warga desa.

4.2. Model Komunikasi Bencana Erupsi Merapi Pada Masa Tanggap Darurat

Model komunikasi bencana erupsi Gunung Merapi keadaan darurat merupakan model atau sistem komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah selama keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud adalah status gunung Merapi dari siaga menjadi awas. Dalam kondisi tanggap darurat, alur komunikasi dan koordinasinya pun berbeda dengan kondisi normal. Informasi mengenai kenaikan status dari kondisi normal hingga kondisi darurat diberikan oleh Bpptkg Yogyakarta. Pada saat kondisi darurat informasi mengenai aktifitas Gunung Merapi dirilis oleh Bpptkg setiap jam agar pemerintah lebih siap dalam menghadapi bencana. Hal itu dilakukan agar setiap pemerintah daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan.

Dalam keadaan darurat, isi informasi yang masuk biasanya berupa laporan aktifitas Gunung Merapi yang mengalami kenaikan status dari waspada ke siaga dan siaga ke awas. Informasi yang diterima oleh BPBD Magelang, selanjutnya akan dicek kembali keakuratannya. Setelah informasi dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya maka, langkah pertama yang di ambil adalah menyiapkan tim penanggulangan bencana yakni Tim Reaksi Cepat BPBD Magelang dan Tim SAR BPBD Magelang. Selain menyiapkan tim, BPBD Magelang juga menyiapkan perencanaannya yakni rencana kontijensi berupa *sister village*.

Informasi laporan aktifitas Gunung Merapi yang mengalami kenaikan status dari waspada ke siaga dan siaga ke awas dikirim melalui surat, *e-mail* BPBD Magelang yang dipegang oleh Pusdalops, yang bekerja selama 24 jam menerima segala jenis laporan yang masuk baik itu dari pemerintah, instansi, maupun masyarakat. Setelah laporan diterima, Pusdalops segera memberitahukan kepada Kasi Kedaruratan untuk di cek kembali dan segera memberitahukan kepada Kepala BPBD Magelang. Selain melalui *e-mail*, Bpptkg juga memberikan informasi melalui media sosial *whatsApp* kepada Kasi Kedaruratan.

“Jadi medianya kecanggihan teknologi tidak hanya bentuk surat diantar pake whatsApp cepet pake e-mail cepet. Kalo sistiem kami ada pusdalop fungsinya untuk menampung laporan apapun bekerja 24 jam piket 24 jam. Informasi itu kalau misalkan isinya dalam unsur kedaruratan itu yang pertama diberi tahu saya baru ke kepala.” (Wawancara Didik, 4 November 2017)

Informasi mengenai aktifitas Gunung Merapi yang mengalami perubahan status, terus disebarkan hingga tingkat masyarakat. Biasanya BPBD Magelang menyampaikan

informasi mengenai kenaikan status kepada masyarakat melalui radio, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Adapun radio yang dipakai ketika terjadi bencana yakni radio penanggulangan bencana menghubungkan antara masyarakat dan BPBD Magelang. Selain itu informasi dikirim melalui sms atau telepon yang dioperasikan oleh Pusdalop BPBD Magelang kepada pemerintah kecamatan dan desa. Kemudian Pemerintah Desa menyampaikan kembali informasi kepada warga desa melalui *handy talky*, dan speaker masjid atau pun speaker balai desa

Setelah BPBD Magelang menerima informasi dari BPPTKG dan menyiapkan tim penanggulangan bencana, maka langkah selanjutnya adalah memberitahukan kepada Bupati Magelang, karena di dalam undang-undang penanggulangan bencana yang bertanggung jawab ketika terjadi bencana di tingkat kabupaten adalah Bupati. Artinya, Bupati adalah orang yang pertama kali menerima pesan laporan aktifitas Gunung Merapi yang mengalami kenaikan status dari waspada ke siaga dan siaga ke awas dari BPBD Magelang.

“Jadi di UU Penanggulangan Bencana itu kan ada yang bertanggung jawab menanggulangi bencana di tingkat kabupaten itu adalah Bupati atau walikota, provinsi adalah gubernur.” (Wawancara Didik, 4 November 2017)

Jadi, apapun langkah yang akan diambil, kepala daerah harus mengetahuinya. Ketika keadaan darurat terjadi pada siang hari maka informasi mengenai status Merapi kepada Bupati biasanya melewati *e-mail*, surat atau pun mendatangi langsung kantor Bupati yang tidak jauh dari kantor BPBD. Namun ketika informasi keadaan darurat terjadi pada malam hari, maka informasi tersebut disampaikan melalui telepon. Ketika perencanaan sudah siap, BPBD mengusulkan pada Bupati kriteria komando yang akan memimpin selama terjadi bencana. Setelah BPBD mengusulkan, kemudian dengan wewenang dari Bupati, maka dipilihlah komandan pos induk. Komandan pos induk yang dipilih oleh Bupati biasanya adalah Dandim atau yang berkaitan dengan sistem kemiliteran. Dipilihnya Dandim karena memiliki sistem koordinasi yang tidak diragukan lagi tentang kedisiplinannya.

“Sehingga kita dibekali itu tadi pos komando tetap Bupati yang memilih kita usulkan pak Bupati kita memerlukan unsur komando yang seperti ini kita sudah punya rancangannya walaupun tidak lepas dari BPBD. Oh ini butuhnya gini pak pekerjaan yang akan dilakukan seperti ini membutuhkan personil sekian membutuhkan komandannya, pak Bupati setuju yang ditunjuk siapa.” (Wawancara Didik, 4 November 2017)

Tugas dari komandan pos induk sendiri adalah untuk mengawasi jalannya proses penanggulangan bencana. Militer memiliki banyak personil sehingga akan lebih mudah dalam proses koordinasi, termasuk mengkoordinasi 10 sektor pemerintah yakni Dinas Perekonomian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerja Umum, BPBD Magelang, Dinas Informasi dan Komunikasi, Polres Magelang, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan. Untuk bencana erupsi Merapi mendatang, BPBD telah menyiapkan titik pusat pengendali pos induk yakni terletak di Kabupaten Magelang. Setelah dipilihnya pos induk, maka dipilihlah komandan pos lapangan yang bertugas mengawasi satu kecamatan di KRB 1 seperti pada kegiatan simulasi gladi posko yang diselenggarakan pada 17 November 2017. Tidak begitu saja lepas tangan, BPBD Magelang tetap mengawasi dan saling berkoordinasi dengan 10 sektor pemerintah dan relawan.

Pertama, Sektor Posko yang dikoordinir langsung oleh BPBD Kabupaten Magelang, karena BPBD memiliki 3 fungsi utama dalam menjalankan tugasnya yakni koordinasi, komando dan pelaksana. Fungsi tersebut dapat dijalankan dengan situasi berbeda seperti ketika terjadi bencana, Kepala BPBD yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang mengkoordinasi 10 sektor lainnya. Bertempat di Pusdalops untuk memantau perkembangan proses kebencanaan. Sedangkan fungsi pelaksana, ketika terjadi bencana, Komandan Pos Induk yang dipilih oleh Bupati misalkan Dandim, BPBD akan menerima perintah dari Komandan Pos Induk. Dilain hal BPBD tidak tinggal diam, dalam situasi bencana BPBD akan terus memantau keadaan setiap posko pengungsian dibantu oleh SKPD dan TNI.

“Sektor posko jadi fungsinya mengkoordinasikan mengkomando dan melaksanakan. Kita ada 3 fungsi fungsi komando, fungsi koordinasi dan fungsi pelaksana. Itu pak Sekda nah ini fungsi pelaksana. Poskonya dimana? Pusdalops. Jadi disini kalo ada kejadian boleh dari TNI, POLRI, dari SKPD. Induknya ini Pusdalops artinya pak Sekda yang mengkomando dari sini.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Kedua Sektor Barak, dikoordinasikan oleh Dinas Pekerja Umum (DPU) Kabupaten Magelang bertanggung jawab atas gedung untuk pengungsian seperti Tempat Evakuasi Akhir (TEA). Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa DPU sangat berkaitan dengan mitigasi bencana struktural dengan membuat tempat evakuasi untuk warga terdampak, berupa gedung maupun shelter. Tidak hanya pembangunan berupa gedung, mengaspal jalan juga menjadi tanggung jawab dari Dinas Pekerja Umum.

“Kedua sektor barak itu koordinatornya DPU yang punya tanggung jawab fisik gedung, Dinas Pekerja Umum jadi itu yang mengaspal jalan, gedung pengungsian itu kordinatornya DPU.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Ketiga Sektor Komunikasi, dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magelang, bertanggung jawab atas segala informasi mengenai kebencanaan untuk dikonsumsi oleh audiens. Biasanya informasi tentang kebencanaan disiarkan melalui media massa televisi lokal maupun radio lokal. Selain media massa informasi mengenai kebencanaan disebarluaskan melalui media sosial. Hal itu dilakukan agar terhindar dari berita menyimpang atau *hoax* yang dapat menambah kepanikan warga terdampak.

"Informasi dan komunikasi itu dinas infokom itu untuk komunikasi semua orari, radio, juga RAPI radio swasta, termasuk juga ya kita ada link pusdalops dengan sana tapi kordinatornya Dinas Infokom." (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Keempat Sektor Keamanan, dikoordinasikan oleh Polres Magelang. Tidak bekerja sendiri, Polres Kabupaten Magelang memiliki anggota yakni Kodim, Satpol PP, dan Hansip Desa Kabupaten Magelang. Dalam hal keamanan tidak heran bila semua dikerahkan demi menjaga ketertiban, melindungi negara dan melindungi warga negara dari ancaman bencana alam. Hal itu dilakukan agar warga tidak kesulitan dalam meminta pertolongan apapun.

"Sektor keamanan itu kordinatornya Polres Magelang, anggotanya malah Kodim, Satpol PP, Hansip Desa." (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Kelima Sektor Ekonomi, dikoordinasikan oleh Dinas Perekonomian Kabupaten Magelang. Pada saat terjadinya bencana Dinas Perekonomian bertanggung jawab mengurus hewan ternak yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Tidak hanya hewan ternak, lahan perkebunan seperti kebun salak pondoh, dan lahan pertanian seperti sawah-sawah milik warga juga diurus oleh Dinas Perekonomian. Persoalan mengenai hewan ternak yang mati, perkebunan dan pertanian yang gagal panen rusak akibat hujan abu vulkanik, juga menjadi penting ditangani oleh Dinas Perekonomian.

"Sektor Ekonomi ternaknya mati kena Merapi, ayamnya sapinya atau tanamannya kebun salak hancur kena Merapi semua terkait ekonomi masyarakat, ikannya tertimbun debu mati semua ikan ternak tanaman, itu semua dikoordinir oleh bagian perekonomian." (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Keenam Sektor Logistik, dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magelang. Sektor logistik yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial bertanggung jawab atas semua bahan pangan pada saat terjadinya bencana, seperti beras, makanan siap saji, minuman dengan berbagai merk dan ukuran. Dipilihnya Dinas Sosial karena mereka mempunyai jaringan dengan perusahaan makanan dan minuman, baik itu makan siap saji maupun

makanan olahan. Tidak hanya makanan siap saji Dinas Sosial juga bekerjasama dengan dengan Bulog dimana tugas pokoknya adalah sebagai pengendali harga dan mengelola persediaan beras, gandum, terigu, gula, keledai, dan bahan makanan lainnya. Dalam kondisi bencana akan sangat mudah ketika bahan makanan yang dibutuhkan didatangkan segera tanpa ada birokrasi. Selain itu, dalam keadaan normal bahan makanan siap saji seperti minuman sari kacang hijau dipakai untuk konsumsi pada saat pelatihan dan simulasi berlabel BNPB.

“Sektor logistik, Kita punya gudang logistik juga itu ada didepan, tapi ini sekupnya bencana puting beliung, longsor, kalau bencana Merapi koordinatornya Dinsos, karena mereka punya link dengan bulog. Misalkan stok beras habis, ini lagi bencana, keluarkan 1 ton beras. Yang bisa koordinasikan logistik, tapi kan tidak hanya beras saja makanan siap saji seperti indomie, sarden kemudian minyak kemasan, minuman dalam kemasan, bahkan ada logo BNPB nya itu sari kacang hijau, sari kacang merah, itu untuk konsumsi ada labelnya BNPB. Konsumsi berlebih itu kan ada masa kadaluarsanya, kita pakai untuk kegiatan pelatihan, di gladi, di simulasi, sah dan boleh dalam rangka kesiapsiagaan.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Ketujuh Sektor Dapur Umum, dikoordinasikan oleh BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Magelang. Jika logistik khusus terhadap bahan makanan, maka tanggung jawab dapur umum adalah mengenai alat-alat memasak, seperti wajan besar, magicom besar, gas berukuran besar dan lainnya. Untuk mengurasi kerepotan saat bencana erupsi merapi, peralatan memasak dan bahan makanan dipisah agar bahan kimia yang terkandung dalam peralatan memasak tidak tercampur dengan bahan makanan. Oleh karena itu yang bertanggung jawab mengurus dapur umum adalah BPBD dan Dinas Sosial karena lebih efektif bila kedua lembaga pemerintah daerah tersebut saling bersinergi untuk menyiapkan konsumsi bagi para pengungsi dan petugasnya yang jumlahnya ribuan jiwa, tanpa birokrasi dan mempersingkat waktu.

“Sektor Dapur Umum ini BPBD dan Dinsos. Dapur umum dan logistik berbeda karena, kita punya truk dapur umum itu satu truk orange itu isinya magicom raksasa sekali masak untuk 100 pengungsi. Jadi dapur umum itu alatnya, sedangkan berasnya bahan bakunya dari logistik. Jadi dipisah logistik dan dapur umum. Ya termasuk gula teh, susu bayi itu logistik. Lah nanti kecampur gas malah bahaya. Misalkan wajannya bolong harus di las, ini sudah ditunggu kan kasian. Jadi logistik itu diserahkan ke dinsos. Dapur umum ini ya kalo kotor dicuci, kalo gasnya hilang pentilnya apa saja di dapur umum itu kebutuhannya banyak sekali tandon air. Artinya kalo didobel dengan pengadaan bahan-bahan lainnya repot. Makanya ada istilah pengadaan peralatan dan pengadaan bahan. Alat dan bahan makanan disatukan saya yakin kacau. Bencana yang dilayani ratusan bahkan ribuan jiwa, ratusan mulut, sini sudah kenyang sana belum jadi ya harus dicukupi.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Kedepalan Sektor Kesehatan, dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. bertanggung jawab atas kesehatan pengungsi seperti mendapat pelayanan khusus berupa surat rujukan untuk korban bencana dan mendapat pengobatan gratis. Tugas sektor kesehatan yaitu memberi pertolongan kesehatan terhadap korban bencana erupsi Merapi dan menangani lebih lanjut setelah mendapat pertolongan pertama dari relawan atau pun puskesmas terdekat. Tidak bekerja sendiri Dinas Kesehatan juga menggandeng puskesmas, bidan desa, dan rumah sakit rujukan untuk membantu para korban bencana apapun, baik itu banjir, longsor gempa bumi maupun erupsi merapi.

“Sektor kesehatan dikordinir Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang anggotanya puskesmas, bidan desa dan rumah sakit rujukan jadi ada korban yang sakit karena bencana itu geratis tidak dipungut biaya. Kemarin kejadian banjir bandang bidan desa di Desa Samurejo sana suami dua anak dan istrinya dan satu pembantunya tewas. Bidannya kan ibaratnya kan depresi ringan perawatan sampe anu ya gratis. Kena longsor patah kaki kita koordinasi Dinkes ada korban bencana untuk dirujuk ke rumah sakit bebas biaya sampai sembuh sampe kontrol lagi juga. Ada bencana BPBD lapor ke Dinkes makanya ada sektor Dinas Kesehatan.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Kesembilan Sektor Pendidikan, dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Peran Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak yang terkena bencana erupsi Merapi seperti mendirikan selter sekolah sementara, dengan kurikulum yang darurat. Tidak hanya itu Dinas Pendidikan juga dibantu oleh UPT dan Departemen Agama Kabupaten Magelang.

“Sektor Pendidikan itu dikordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten itu anggotanya juga UPT-UPT Dinas Kecamatan masih juga di objek bencana. sekolahna kena longsor ruang kelasnya rusak atau kena gempa retak harus didirikan sekolah sementara ada erupsi Merapi dibuat selter sekolahna darurat tanggung jawab dinas pendidikan. Karna tidak bisa lepas BPBD untuk anak-anak sekolah dominannya anggotanya dari Departemen Agama kalo dinas dominannya sekolah umumnya, kalo sekolah-sekolah agama kan tetapi satu kesatuan dalam, disitu ada MI dan MA nya” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Kesepuluh Sektor Evakuasi, dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Peran Dinas Perhubungan dalam kondisi bencana yakni bertanggung jawab atas kendaraan yang diperlukan selama proses evakuasi. Jadi kendaraan yang diperlukan untuk mengangkut warga atau hewan ternak seperti truk dan kendaraan lainnya dipenuhi oleh Dinas Perhubungan, mengingat saat bencana membutuhkan armada sangat banyak untuk mengevakuasi warga, dan penanganannya pun harus cepat dan benar.

“Seksi evakuasi ini butuhnya 20 truk. Sekarang di desa ini baru ada 4 truk kurang 16, Kodim oh iya punya 4 truk, BPBD punya 2 truk, TNI, Polres punya berapa truk kan begitu, artinya 16 kekuranganya terpenuhi. Jadi evakuasi itu dikordinir oleh

Dishub yang punya kendaraan. Jadi intinya yang mau diungsikan berapa butuh armada berapa sekarang ada berapa kurangnya berapa.” (Wawancara Gunawan, 26 Oktober 2017)

Selain itu tugas BPBD pada saat bencana juga berhak memberikan informasi terkait kenaikan status Gunung Merapi kepada warga khususnya di KRB 3. Pada saat terjadi bencana BPBD menggunakan media radio komunikasi dan HT yang terhubung satu sama lain. Ketika Bupati mengkomando agar segera menghubungi kepala desa, maka dengan sigap posdalops memberikan informasi melalui telpon atau sms nomor pribadi kepala desa. Namun ketika kepala desa sedang tidak membawa HP atau sinyal sedang terganggu yang diakibatkan adanya bencana, maka BPBD menghubungi pihak lain yakni ketua OPRB untuk menginformasikan kepada warga.

“Kalo kepala desa tidak di tempat telpon tadi tidak hanya ke satu kepala desa saja bisa jadi dihubungi tidak di tempat hp tidak dibawa atau sinyal tidak ada. Itu pasti ada yg namanya ketua OPRB organisasi pengurangan resiko bencana, nah itu alurnya dari kepala desa ke ketua OPRB.” (Wawancara Didik, 4 November 2017)

Dari kepala desa dengan protap desanya masing-masing segera menyiapkan warga untuk segera dievakuasi. Informasi yang di sampaikan BPBD, oleh kepala desa segera disampaikan kepada ketua OPRB melalui telpon pribadi atau HT. Dari ketua OPRB akan memberitahukan kepada anggotanya untuk segera memberikan informasi tentang kenaikan status kepada warga untuk segera mengungsi ke tempat desa saudara yang sudah ditentukan. Informasi mengenai kenaikan status disampaikan melalui pengeras suara tempat ibadah seperti masjid desa atau mushola.

Selain melalui pengeras suara, OPRB juga memberikan informasi mengenai kenaikan status Gunung Merapi melalui pintu ke pintu atau dari mulut ke mulut untuk segera mengemas barang-barang dan berkumpul di titik yang sudah ditentukan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh masing-masing desa. Setelah semua warga berkumpul di titik yang sudah di tentukan, kemudian warga segera mengosongkan desa untuk berpindah sementara di tempat evakuasi akhir di desa saudaranya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suwarno selaku anggota OPRB Desa Kalibening Kecamatan Dukun.

“Kalau ada berita dari BPBD suruh evakuasi itu yang pertama dapat kabar pak kades lewat telpon, whatsapp atau surat, dari pak kades ke oprb. biasanya kita umumkan lewat speaker masjid.” (Wawancara Suwarno, 17 November 2017)

Setelah warga sampai di desa saudara, pertama kali yang dilakukan oleh BPBD adalah pemenuhan 3 kebutuhan dasar, yakni sandang, pangan, dan papan. Untuk kebutuhan dasar papan, BPBD menyiapkan konsep desa bersaudara. Ketika penyintas sudah sampai

desa saudaranya, penyintas akan ditempatkan di tempat evakuasi akhir di desa penyangga, namun kapasitas TEA hanya dapat menampung sebanyak 500 jiwa, sementara satu desa terdampak jumlah penduduknya banyak yang melebihi kapasitas TEA. Sehingga di dalam konsep desa saudara warga desa penyangga yang memiliki rumah besar dan bersedia ditempati sementara oleh desa terdampak itu lah yang menjadi kebutuhan papan para penyintas.

Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan secara tertulis melalui MoU, maka ketika bencana erupsi Gunung Merapi sewaktu-waktu meletus, warga terdampak tidak perlu khawatir mengenai tempat tinggal karena mereka akan tinggal di TEA atau rumah warga desa penyangga. Salah satu warga desa penyangga yakni Desa Adikarto menyampaikan bahwa pada tahun 2015, pada saat kesepakatan MoU dilaksanakan. Warga Desa Adikarto setiap pemilik rumah yang memiliki kriteria seperti rumah besar, penghuni rumah yang tidak terlalu banyak, ditanyakan untuk ke sedianya ditempati oleh keluarga terdampak. Tidak hanya semata-mata menginap, namun sebagai imbalan karena sudah diperbolehkan menginap, warga terdampak dapat membantu pekerjaan tuan rumah, entah itu berkebun atau bertani.

Kebutuhan dasar pangan, warga desa sebelumnya sudah dibekali pelatihan dapur umum pada saat keadaan normal. Ilmu dari pelatihan tersebut diterapkan pada saat keadaan darurat, artinya desa terdampak dan desa penyangga bekerjasama memasak makanan untuk desanya, mulai dari beras yang dibutuhkan, lauk apa yang akan disajikan, sayur apa yang tidak mudah basi, hal itu akan di diskusikan bersama antar kedua desa. Mengingat bencana erupsi Merapi tidak bisa diperkirakan selesai dalam hitungan hari. Lebih baiknya jika 3 hari pertama desa terdampak dapat memenuhi kebutuhan pribadi, seperti susu bayi jika ada yang memiliki bayi, makanan bayi dan lain sebagainya. Seperti salah satu desa penyangga yang sudah menyiapkan dana desa khusus bencana erupsi Merapi seperti tabungan ternak, dan tabungan siaga Merapi.

Kebutuhan dasar sandang, ketika warga desa melakukan pelatihan tanggap darurat yang diberikan oleh pemerintah daerah, mereka diajarkan untuk membawa tas siaga bencana. Ketika status gunung merapi mencapai level waspada, warga diminta untuk segera menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana didalamnya berisi kebutuhan pribadi seperti pakaian, alat mandi, obat-obatan pribadi atau bahkan *make up*. Sama halnya dengan kebutuhan pangan, untuk kebutuhan sandang lebih baik jika 3 hari pertama penyintas dapat memenuhi kebutuhan pribadinya. Bahkan disarankan untuk barang kesayangannya pun diharuskan dibawa agar masyarakat tidak berpikir untuk kembali ke

desa. Tas siaga bencana yang sudah disiapkan ditaruh di belakang pintu utama rumah, sehingga ketika sewaktu-waktu proses evakuasi tiba, warga sudah siap dengan barangnya.

Setelah pemenuhan 3 kebutuhan dasar, hal yang selanjutnya dilakukan oleh BPBD adalah mengadakan konferensi pers. Isi dari konferensi pers adalah mengenai kronologi kejadian bencana, dampak terjadinya bencana, serta hal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Data awal tersebut didapatkan dari hasil pengolahan BPBD dan para jajarannya. Dalam konferensi pers yang menyampaikan data awal tersebut adalah Bupati Kabupaten Magelang. Berikut ini adalah gambaran model komunikasi bencana pada saat keadaan darurat yang telah disusun oleh penulis berdasarkan hasil wawancara kepada BPBD Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Bagan 3.3 Model Komunikasi Tanggap Darurat

Berdasarkan pengalaman erupsi Gunung Merapi tahun 2010 kendala yang dialami saat ini adalah hewan ternak, yaitu minimnya lahan untuk evakuasi hewan ternak, serta pakan ternak yang tidak semua desa penyanggah memiliki lahan untuk mencari pakan ternak. Hal itu menjadi kendala yang saat ini masih dipikirkan oleh pemerintah daerah. Selain hewan ternak, penempatan logistik menjadi kendala, karena ketika desa membutuhkan bahan pokok, jalur untuk pengambilannya masih menjadi pertimbangan. Apakah harus melewati kecamatan atau langsung ke kabupaten untuk meminta bahan pokok, namun solusi sementara untuk kendala tersebut adalah penyimpanan logistik harus berada di tempat yang benar-benar aman.

“karena desa saudara itu pasangannya ada 42 desa dari yang 19 tadi pasangannya ada 42 desa nah 40 desa itu terbagi dalam 10 kecamatan repot juga kalau logistiknya hanya berpusat disini atau di bulok, semetara kondisi di Magelang kalau hujan abu erupsi Merapi rata-rata angin itu adalah kesini nah itu pasti transformasi warga kalau kita menempuh perjalanan lebih dari 30 km itu kan bahaya sehingga alangkah baiknya kalo gudang-gudang itu ada di daerah yang aman itu yang masih jadi PR kami juga idealnya memang seperti itu.” (Wawancara Didik, 4 November 2017)

Kendala selanjutnya adalah informasi pada saat terjadi bencana, banyaknya pemberitaan yang beragam. Terlebih lagi jika pemberitaan mengenai keadaan bencana tidak benar (hoax) membuat penyintas semakin panik tentang keadaan di desanya. Solusi untuk kendala tersebut adalah warga di tempat evakuasi akhir bila ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai keadaan Merapi di haruskan bertanya kepada orang yang terpercaya seperti BPBD, unit pemerintah daerah, dan relawan yang berada di lokasi bencana agar warga terhindar dari kepanikan karena adanya informasi yang salah.

Data di atas menyebutkan bila saat bencana terjadi yang memimpin untuk mengatur jalannya bencana adalah komandan pos induk dari pihak kemiliteran. Menurut penulis, dalam hal ini cara pemimpin pihak kemiliteran sudah tidak diragukan lagi dalam hal kedisiplinan dan tanggas. Namun, hal itu akan mendapat kesenjangan karena tidak semua orang termasuk pemerintah menerapkan cara kepemimpinan yang sama seperti tingkat kemiliteran. Oleh karena itu pemerintah harus berhati-hati dalam memilih seseorang untuk menjadikan komandan pos induk untuk melakukan penanganan bencana. Pendapat yang sama diungkapkan oleh ketua JRKI yakni Sinam mengenai kelemahan model komunikasi keadaan darurat.

Menurutnya kelemahan model komunikasi keadaan darurat adalah pola yang telah dibuat oleh pemerintah pada kenyataan saat terjadi bencana tidak akan 100% terlaksana. Artinya, jika bencana besar maka banyak yang memiliki sistem komando kebencanaannya masing-masing sehingga pola yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan satu pintu. Pemilihan Dandim sebagai media center meskipun kelompok militer memiliki kemampuan yang baik di dalam kedisiplinan, namun hal itu tidak berlaku pada penanganan informasi pada saat bencana. Penempatan media center akan lebih tepat bila yang menjadi media center adalah Dinas Infokom untuk menangani semua informasi yang simpang siur, dan untuk menjawab semua pertanyaan dari publik.

“Begini ya ini akan rancu dengan komunikasi bencana lainnya jadi kan semua akan punya sistem, lihat bencana juga ya kalo bencana besar orang akan kesitu, beberapa tidak terkonsolidasi pengalaman sampai sekarang kemudian semuanya main sendiri-sendiri tidak satu pintu. Nah itu pentingnya media center yang saya tidak yakin bakal satu pintu.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Adapun masalah komunikasi yang akan terjadi pada pola tersebut adalah akan banyaknya informasi yang simpang siur, bila peran media senter tidak memiliki tim khusus untuk menangani informasi yang keluar masuk. Cara untuk menghindari itu semua adalah dengan memilih admin media sosial baik itu twitter, facebook, instagram, dan lain sebagainya untuk menjawab semua pertanyaan atau informasi yang masuk dan keluar. Termasuk medium lainnya seperti radio darurat, HT, segala bentuk alat komunikasi, baik itu kepada pihak internal untuk memudahkan koordinasi dengan masyarakat dan media baru yakni media sosial untuk pihak eksternal harus dipakai untuk menghindari terjadi berita *hoax*. Disini peran sektor komunikasi yang di sokong oleh Dinas Kominfo memiliki peran penting untuk mengelola informasi.

“Nah saya kira semua operator media centernya harus banyak menjawab semua media yang dibutuhkan jadi ada yang jadi admin Twitter admin Facebook admin media sosial, karena begini peran media center itu harus meluruskan banyak hal. Bencana kedua setelah bencana adalah bencana informasi, misalnya begini saya yakin jam 6 akan ada gempa bumi besar itu nyebar viral melalui whatsapp ya kalau sekarang dan itu harus dijawab cepat maka semua medium harus dipakai untuk bisa menjawab cepat siapapun sampai sekarang tidak ada alat pendeteksi gempa. Jadi media center ini kemudian dilengkapi ada radio darurat, HT, pokoknya semua yang dipakai masyarakat itu pakek semua medianya.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Adapun solusi untuk menangani hal tersebut adalah membentuk humas yang berperan khusus untuk mengumpulkan segala jenis informasi mengenai kebutuhan setiap sektor. Artinya ketika setiap sektor berperan mengumpulkan data, di sisi lain peran humas harus bersiap mengelola informasi dengan akurat agar segala jenis kebutuhan yang

diperlukan oleh penyintas segera diterima. Karena untuk mengambil keputusan yang cepat harus disokong oleh data atau informasi yang cepat dan akurat juga. Misalkan dalam keadaan darurat, sektor Kominfo membuat radio darurat yang terus siaran selama keadaan darurat dan lain sebagainya.

“Ini sebenarnya penting kemudian disetiap kluster itu harus ada pengelola informasi kayak PR atau humasnya lah dia bisa menginformasikan itu dan bisa mengelola disini misalnya di logistik stok itu ada apa saja mereka butuh tim informasi mengelola informasi di masing-masing kluster.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Selain itu, untuk melibatkan warga agar ikut berpartisipasi dengan kegiatan pemerintah dengan cara membangun kesadaran warga. Untuk membangun kesadaran warga pemerintah perlu mengidentifikasi persamaan kepentingan, yaitu terbebas dari bencana. Setelah kepentingan tersebut selaras dengan pemerintah, cara penyampaiannya pun harus diperhatikan dengan cara menyampaikan informasi atau kepentingan di dalam acara warga seperti kumpulan-kumpulan warga. Agar informasi yang disampaikan berhasil diterima warga, pemerintah perlu menggunakan pola diskusi untuk mengidentifikasi potensi yang lebih jauh di daerahnya, karena warga merupakan buku-buku hidup yang menyimpan informasi penting untuk digali, maka dari itu penggunaan pola diskusi cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebencanaan.

“Pertama adalah kalau melibatkan itu kan membangun ini dulu ya kesadaran warga dulu ya, komunikasi itu jadi orang punya kepentingan, jadi pastikan di punya kepentingan, selama dia gak punya kepentingan disuguhi apapun ya gak akan mau, jadi pastikan dia punya kepentingan, kepentingannya apa terbebas dari bencana. Pola yang bisa digunakan ya tadi pertemuan-pertemuan warga ditingkatkan untuk mengajak. Sifatnya adalah dialogis warga itu banyak pengetahuan ya mari kita dialog diskusi dengan warga memutuskan mendefinisikan mengenali potensi lebih jauh di daerahnya dengan pola diskusi.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Kedua memetakan medium informasi yang paling banyak dan paling sering digunakan oleh warga. Memetakan medium informasi berguna untuk mempermudah pemerintah menyebarkan informasi mengenai kebencanaan. Baik itu melalui media massa atau pun melalui media baru, informasi yang telah diproduksi dapat disebarkan melalui berbagai medium yang telah dipetakan dengan cara pengemasan informasi yang berbeda namun substansinya sama.

“Kedua adalah memetakan medium-medium informasi yang paling banyak digunakan oleh warga. Misalkan kita ngomongin WA, begini warga yang punya Hp android cuma beberapa oh gak efektif berarti, kan konteks disini dan disini akan beda lagi. Jadi alat komunikasi apa lagi yang akan digunakan oleh warga yang

digunakan untuk penyebaran atau pun berkomunikasi.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Ketiga cara penyampaian informasi yang berulang-ulang. Metode penyampaian informasi yang berulang-ulang perlu ditingkatkan pemerintah, tidak hanya sekali dalam satu tahun, tetapi sebulan sekali berupa leaflet, kalender bergambar, dan lain sebagainya. Karena manusia mudah lupa, untuk itu penyampaian informasi berulang-ulang merupakan cara yang efektif mengingat bencana erupsi Gunung Merapi tidak dapat diprediksi kapan terjadi.

“Ada sesuatu yang harus berulang-ulang itu jadi substans cara penyampaian informasi yang terus-menerus tidak hanya sekali. Oh kalo Merapi meletus jalur evakuasinya ini itu disampaikan terus-menerus entah sebulan sekali entah melalui leaflet entah melalui apa semua warga dia bisa baca sewaktu-waktu. Selama ini itu belum.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

Keempat menggunakan orang kepercayaan warga atau juru kunci di daerah tersebut untuk menarik warga agar terlibat dalam komunikasi bencana. Karena masyarakat akan lebih mudah percaya terhadap informasi bila yang menyampaikan informasi tersebut adalah orang penting yang memiliki kuasa, misalkan seperti juru kunci, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Informasi yang disampaikan juga akan lebih cepat mengingat seseorang yang memiliki kuasa, memiliki kepercayaan penuh yang diberikan oleh warga.

“Kedepan untuk himbauan itu sudah harus dicari warga-warga champion warga-warga hebat dia bisa memberi informasi pada temannya sendiri itu akan lebih cepat.” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018)

4.2.1. Pola Komunikasi “Y” Pada Masa Tanggap Darurat

Selain model komunikasi bencana pada saat normal, penulis juga membuat model komunikasi bencana pada saat darurat yang didapat dari hasil wawancara kepada narasumber. Pada saat keadaan darurat atau pada saat terjadinya bencana, pemerintah daerah menggunakan pola komunikasi yang berbeda pada saat keadaan masih normal. Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis menemukan bahwa terdapat pola komunikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah pada saat terjadi bencana erupsi Gunung Merapi mendatang, yakni pola komunikasi struktur “Y”.

Pada saat darurat BPBD Kabupaten Magelang menggunakan rencana kontijensi yakni *sister village*. Rencana kontijensi tersebut digunakan pada saat Gunung Merapi memasuki kenaikan status menjadi “siaga”. Jadi, apa yang telah pemerintah daerah berikan pada saat normal dalam kegiatan mitigasi bencana, kemudian diterapkan oleh warga desa

yang masing-masing desa memiliki prosedur tetap. Mulai dari siapa saja yang harus di evakuasi terlebih dahulu hingga jalur evakuasi yang telah dibuat sedemikian rupa.

Proses kenaikan status Gunung Merapi didapatkan dari BPPTKG Yogyakarta. BPPTKG memberikan himbawan mengenai kenaikan status Gunung Merapi melalui *whatsapp*, *handy talky*, *e-mail*, SMS dan surat resmi. Ketika status Gunung Merapi sudah mencapai level “siaga”, laporan tersebut akan dikirim setiap jam atau setiap kejadian. Setelah diterima oleh BPBD Kabupaten Magelang, kemudian laporan tersebut diperiksa kembali oleh BPBD. Jika laporan bisa dipertanggungjawabkan maka, BPBD akan memberikan laporan tersebut kepada Bupati.

Disisi lain BPBD juga menyiapkan rencana kontijensi yakni *sister village*, kriteria komandan pos induk, menghubungi relawan, serta menghubungi pemerintah desa untuk bersiap diri mengevakuasi warganya. Setelah semua perencanaan siap kemudian BPBD mengusulkan kriteria komandan pos induk. Atas wewenang dari Bupati, beliau dapat memilih siapa yang pantas menduduki pemimpin pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi.

Berdasarkan data diatas pola komunikasi “Y” relevan dengan model komunikasi bencana pada saat tanggap darurat. Devito (1997) mengatakan bahwa struktur “Y” lebih tersentralisasi dibanding dengan pola komunikasi lainnya, pada struktur “Y” juga terdapat pemimpin yang jelas.⁸⁴ Pernyataan Devito menjelaskan adanya seorang pemimpin yang jelas pada sistem koordinasi tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi mendatang. Pemimpin tersebut menempati posisi tengah atau posisi sentral pada alur informasi. Tubbs & Moss (1996) juga berpendapat hal yang sama, yakni jaringan terpusat seperti Roda (*wheel*), rantai (*chain*) dan struktur “Y” orang yang menempati posisi pusat dan dengan demikian mampu menyalurkan komunikasi dianggap sebagai pemimpin.⁸⁵

Bila dikaitkan pada model komunikasi bencana pada masa tanggap darurat, peran seorang pemimpin yang berada pada posisi sentral atau pemimpin utama, diduduki oleh BPPTKG. Menurut penulis, BPPTKG merupakan sumber keakuratan informasi Gunung Merapi. Tidak hanya menginformasikan tentang kenaikan status saja, namun BPPTKG juga menginformasikan rekomendasi langkah yang akan diambil selanjutnya. Misalkan informasi berupa kapan warga harus mengungsi, wilayah mana saja yang akan terkena

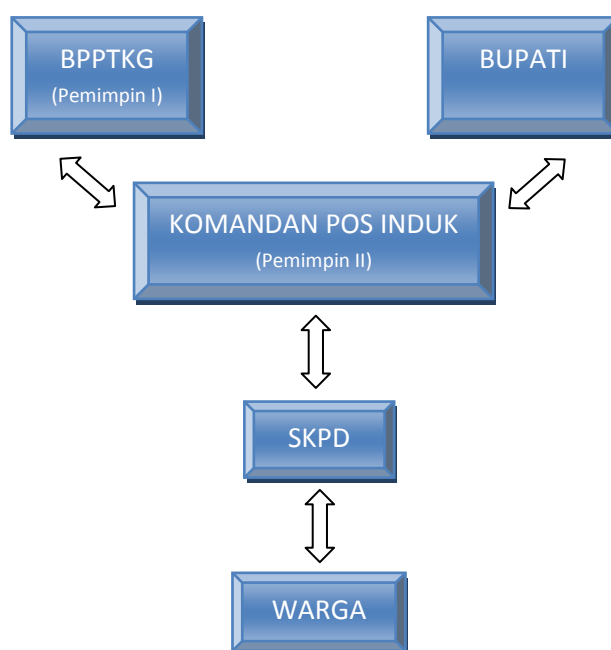
⁸⁴ Joseph A Devito. *Op. Cit.*, hal.345

⁸⁵ Steward L Tubbs & Sylvia Moss, Human Communication Konteks-Konteks Komunikasi. *Terj.* Deddy Mulyana dan Gembirasari. (Vol.2 Bandung: Remaja Rosdakarya 1996) Hal. 94

erupsi merapi, dan lain sebagainya. Dari rekomendasi tersebutlah pemerintah daerah dapat mengambil tindakan.

Selain itu Devito (1997) menjelaskan bahwa pola komunikasi struktur “Y” terdapat satu anggota lain yang berperan sebagai pemimpin kedua, anggota ini dapat mengirim dan menerima pesan dari kedua orang lainnya.⁸⁶ Pernyataan Devito menjelaskan bahwa ada satu orang yang menjadi *back up* setelah pemimpin utama. Pemimpin kedua yang dimaksud dalam sistem komando dan koordinasi di model komunikasi bencana pada saat tanggap darurat adalah komandan pos induk.

Penulis menemukan keselarasan pernyataan Devito dengan temuan penelitian, bahwa komandan pos induk menjadi pemimpin kedua, karena tugas dari komandan pos induk pada saat tanggap darurat adalah untuk mengkoordinasi sepuluh sektor pemerintah. Sepuluh sektor tersebut adalah Dinas Perekonomian, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerja Umum, BPBD dan Polres Kabupaten Magelang. Komandan pos induk yang telah dipilih oleh Bupati berdasarkan usulan kriteria yang diperlukan oleh BPBD, menjadi pemimpin di lapangan pada saat tanggap darurat. Artinya komandan pos induk memiliki kuasa dan berhak memerintah SKPD untuk membantu proses penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.



⁸⁶ Joseph A Devito. *Op. Cit.*, hal.383

Gambar 4.3. Pola Komunikasi Struktur “Y”

Selain itu pada pola komunikasi struktur “Y” penulis juga menemukan bahwa, ketika BPBD memberikan informasi mengenai status Gunung Merapi yang mengalami kenaikan. BPBD menggunakan semua medium yang ada baik itu telepon, whatsapp, *handy talky*, radio darurat yang menghubungkan desa dengan BPBD, radio komunitas yang terletak di desa dan dapat didengar satu sama lain meskipun mereka berbeda tempat, radio swasta dan televisi. Karena pesan yang akan disampaikan bersifat penting maka semua medium di pakai untuk menggapai masyarakat.

Alur komunikasi pada model komunikasi bencana pada saat darurat menggunakan alur komunikasi secara struktural yakni dari atas ke bawah, dan non struktural dari bawah ke atas atau yang biasa disebut sebagai arus komunikasi vertikal. Namun, BPBD Magelang lebih dominan menggunakan alur komunikasi struktural pada saat tanggap darurat. Karena pola komunikasi struktur “Y” menggunakan sistem kepemimpinan yang terpusat, warga tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan komandan pos induk sebagai pemimpin di lapangan pada saat tanggap darurat. Warga harus melewati beberapa proses birokrasi untuk memberikan informasi kebutuhan pangan dan sandang, serta menerima bantuan berupa sandang dan pangan. Sedangkan alur komunikasi non struktural yakni dari bawah ke atas, warga dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan pemerintah daerah pada lokasi yang sama di tempat evakuasi akhir.

Dalam keadaan darurat pemimpin dalam suatu organisasi harus dapat memecahkan masalah dengan cepat, serta pengambilan tindakan yang tepat. Oleh karena itu arus komunikasi ke bawah saja tidak cukup untuk memantau kinerja anggotanya, maka harus diimbangi dengan arus komunikasi ke atas untuk memberikan timbal balik kepada bawahannya. Menurut Pace & Faules (2005) komunikasi ke atas dapat berupa suatu permohonan atau komentar yang diarahkan kepada individu yang otoritasnya lebih tinggi, lebih besar atau lebih luas.⁸⁷

Berdasarkan pengalaman 2010 menjadi bukti adanya ketidaksielarasan yang nyata antara warga desa dan pemerintah daerah. Penulis menenumakan bahwa model komunikasi pada saat darurat merupakan model yang masih bersifat perencanaan atau normatif yang masih dibuat oleh pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah belum mengetahui seberapa siap desa menjalankan model komunikasi masa tanggap darurat. Selain itu, *sister*

⁸⁷ R Wayne Pace & Don F Faules, Komunikasi Organisasi Strategi meningkatkan Kinerja Perusahaan, *terj.* Deddy Mulyana. (Bandung: Penerbitan Remaja Rosdakarya, 2005) hal.188

village juga masih berupa perencanaan belum terealisasi secara nyata pada saat terjadi bencana erupsi Gunung Merapi. Karena *sister village* baru direalisasikan pada tahun 2011 setelah bencana erupsi Gunung Merapi 2010. Hingga saat ini masih banyak desa KRB yang belum tersentuh program ini. Penulis menilai bahwa perencanaan yang telah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah daerah tidak akan berhasil 100%.

Ditambah lagi adanya unsur komando yang dipimpin oleh tingkat militer. Memang tidak diragukan lagi perihal kedisiplinan dan prajurit yang dimiliki oleh tingkat kemiliteran. Namun disisi lain dipilihnya tingkat kemiliteran sebagai komandan pos induk tidak akan berjalan sesuai rencana. Artinya, komunikasi dari atas ke bawah, dan bawah ke atas menjadi tidak sinkron dan tidakselaras, karena pemerintah daerah dan tingkat kemiliteran menjalankan rencananya sendiri-sendiri. Tidak berjalan satu pintu dan tidak semua orang termasuk pemerintah daerah atau relawan mengerti dan memahami cara koordinasi kemiliteran. Kepemimpinan di dalam organisasi kemiliteran bersifat lurus, satu arah, satu tujuan, teratur, otoriter, dan cenderung memecahkan masalah secara perseorangan yang selanjutnya solusi tersebut diturunkan kepada bawahannya.

Hal itu dipertegas oleh pernyataan dalam buku Tubs & Moss (1996) pemecahan masalah dikatakan “berhasil” bila organisasi berusaha menganalisis masalah sebelum mencari pemecahannya yang dapat dilaksanakan, sedangkan organisasi yang “tidak berhasil” segera menangani masalah sebelum berusaha menganalisis dan memahaminya.⁸⁸ Artinya, ketika suatu masalah atau konflik terjadi pada saat tanggap darurat pemecahan masalah akan lebih baik jika didiskusikan bersama dalam waktu yang darurat, bukan berarti harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi. Karena gagasan yang dihasilkan dengan berdiskusi akan lebih banyak dan semua berasal dari cara pandang yang berbeda, jadi akan lebih mudah memecahkan suatu masalah.

Seperti ketika bencana terjadi, penyintas yang berada di lokasi desa saudaranya pasti membutuhkan sesuatu, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kebutuhan tersebut berupa data yang diolah menjadi informasi milik warga desa, informasi tersebut harus disampaikan kepada pemimpin agar semua kebutuhan warga terpenuhi dengan baik. Itu hanya kebutuhan warga selama mengungsi saja, belum lagi dengan konflik yang akan terjadi setelah bencana, yakni *hoax*. Banyaknya media yang memberikan informasi sehingga informasi menjadi padat dan simpang siur.

⁸⁸ *Ibid.*, Hal. 98-102

Menurut Sinam, bencana kedua setelah bencana adalah bencana informasi. Untuk menghindari bencana informasi diperlukan peran pemimpin yang dapat memutuskan langkah selanjutnya secara tepat dan terbuka terhadap informasi yang masuk. Serta, penanganan yang tepat seperti memimiliki tim khusus untuk menangani segala macam informasi yang masuk dan keluar. Tim khusus itu berupa admin setiap media, baik itu media massa yakni telepon dan radio, yang sering digunakan oleh warga, maupun media baru yakni Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya.

Untuk mendukung proses komunikasi berjalan dengan baik pemerintah daerah, dan relawan memerlukan metode lisan diikuti tulisan. Karena menurut Pace & Faules metode penyampaian lisan diikuti tulisan sangat efektif bila pesan yang akan disampaikan memerlukan tindakan segera. Jadi, ketika tanggap darurat setelah mendapatkan informasi mengenai aktifitas Gunung merapi, sebaiknya BPBD segera menginformasikan kepada SKPD lain, relawan, maupun pemerintah desa, secara lisan. Setelah informasi tersebut disampaikan melalui medium radio darurat dan *handy talky* sebaiknya diikuti oleh surat atau medium tulisan. Tulisan tidak hanya menggunakan media surat resmi saja, namun juga bisa menggunakan SMS atau whatsapp. Karena menurut penulis, bila pemerintah daerah hanya menggunakan satu medium, yakni menggunakan lisan saja tanpa diikuti dengan tulisan maka informasi tersebut akan memiliki kekeliruan atau noise.

Begitupun dengan komunikasi arus ke atas dari warga desa penyintas, yang mengirim informasi terkait kebutuhan yang diperlukan selama tinggal di desa saudara kepada pemerintah daerah. Penyintas pasti akan mengirim data kebutuhan yang diperlukan baik itu sandang maupun pangan dalam bentuk informasi. Bila informasi tersebut hanya dilakukan melalui lisan, misalkan menggunakan radio darurat dan *handy talky* saja, pasti akan mendapatkan banyak kekeliruan baik dalam menuliskan jumlah, nama kebutuhan pokok dan sebagainya. Untuk itu, informasi ke atas juga perlu diikuti dengan tulisan, baik itu melalui SMS atau whatsapp agar semua data dan informasi yang diperoleh memiliki kesamaan, tidak ada yang kurangan dan tidak ada yang kelebihan.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menilai bahwa apa yang telah penulis teliti memiliki unsur kebaruan dan berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, dimana penulis telah memaparkan strategi atau langkah-langkah dari BPBD Magelang dalam menanggulangi bencana Erupsi Gunung Merapi. Tidak hanya pada tahap memaparkan saja, penulis juga meneliti lebih dalam mengenai topik pra bencana hingga tingkat pola komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Magelang. Menurut penulis penelitian ini unik karena sebenarnya dalam sebuah strategi yang dilakukan oleh setiap

organisasi memiliki pola komunikasi yang berbeda-beda. Artinya, organisasi pemerintahan yang sama pun memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada target sasaran. Untuk itu meskipun ada yang meneliti dengan topik yang sama, pasti akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dari hasil pola komunikasi yang ditemukan pembaca dapat menilai langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi pemerintahan apakah akan berjalan dengan sesuai tujuan atautkah akan terjadi kekacauan mengingat bencana Erupsi Merapi adalah bencana yang besar.

Sementara itu, penulis membandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan topik yang sama yaitu pada tahap pra bencana. sepuluh dari dua belas penelitian terdahulu hanya sampai pada tahap menjelaskan dan mengungkapkan kegiatan / strategi / upaya yang dilakukan baik dilihat dari sudut pandang lembaga pemerintahan, tempat wisata, ataupun dari masyarakat itu sendiri yang dilanjutkan pada tahap hasil yang mengungkapkan keberhasilan atau tidaknya strategi tersebut. Sebagai perbandingan, penelitian Krisna Megantari tahun 2013, dengan judul “Pengelolaan Komunikasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Sleman”. Meneliti dengan topik yang sama yaitu dalam bidang komunikasi dengan objek pemerintah, penelitian tersebut berfokus pada sistem informasi desa sebagai medium penyampaian pesan yang diterima oleh masyarakat pada saat penanggulangan bencana. Namun penelitian tersebut menyatakan sistem informasi publik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah tersebut kurang efektif karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya, selain itu dari segi kesiapsiagaan mengenai penyusunan rencana kontijensi masih kurang rapih dalam pengkoordinasiannya”.⁸⁹

⁸⁹ Krisna Megantari, “Pengelolaan Komunikasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Sleman”, (Thesis, Fakultas Ilmu Budaya dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013), Hal 6.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada pembahasan sebelumnya mengenai studi bencana di Gunung Merapi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi penanggulangan bencana dari pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Magelang memiliki dua model komunikasi yakni model komunikasi pada masa normal dan model komunikasi pada masa tanggap darurat. Ketika pada masa normal, model komunikasi terdapat dua alur yaitu alur komunikasi secara struktural dan alur komunikasi secara non struktural. Alur komunikasi secara struktural, yaitu informasi mengenai status aktivitas Gunung Merapi dari BPPTKG Yogyakarta disampaikan secara formal dan berurutan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang kepada masyarakat melalui jalur birokrasi. Sedangkan alur komunikasi non struktural, yaitu informasi mengenai aktivitas Gunung Merapi dari BPPTKG Yogyakarta disampaikan secara tidak formal dan tidak berurutan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang, kepada masyarakat tidak menggunakan jalur birokrasi.

Pada masa tanggap darurat alur komunikasi lebih disampaikan secara struktural dan non struktural. Alur komunikasi struktural menggunakan sistem birokrasi. Meskipun pemerintah daerah menggunakan semua jenis medium untuk berkomunikasi dengan warga, namun dalam mendistribusikan kebutuhan pokok baik primer maupun sekunder, warga tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemimpin di lapangan yakni komandan pos induk. Warga harus melewati beberapa tahap untuk menyampaikan informasi dan bahkan beberapa informasi dari warga tidak sampai kepada pemimpin. Sedangkan alur komunikasi non struktural tidak menggunakan sistem birokrasi. Warga dapat berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah atau relawan yang berada pada satu lokasi tempat evakuasi akhir untuk menyampaikan segala jenis informasi. Adapun hasil rumusan masalah yang telah penulis temukan selama penelitian sebagai berikut :

1. Program BPBD Kabupaten Magelang yang sudah berjalan adalah *Sister Village* (desa bersaudara) dan Desa Tangguh Bencana (Destana). Hingga saat ini, program *Sister Village* masih berupa perencanaan masih digunakan sebagai lingkup internalisasi kebencanaan belum meluas ke ranah ekonomi, sosial, dan budaya yang seharusnya lebih menginternalisasi arti kata “persaudaraan”. Selain itu, *Sister*

Village masih berupa *brand project* menjadi padanan kata yang elit belum menjiwai kalangan masyarakat Jawa. Sedangkan program destana seperti sosialisasi, apel siaga, simulasi dan pelatihan masih menjadi program monoton. Terlihat dengan banyaknya masyarakat yang masih menyepelekan program pemerintah khususnya bagi masyarakat di yang berada di daerah tergolong aman.

Selain itu untuk sosialisasi khusus warga yang terletak di daerah aman menjadi antusias dan aktif, sebaiknya pemerintah tidak harus membuat acara baru, namun mengikuti acara yang sudah ada seperti rutinitas yang sering warga lakukan yakni, kumpulan RT, kumpulan ibu PKK, kumpulan arisan dasa wisma dan lain sebagainya. Cara penyampaian pemerintah daerah yang hanya dilakukan satu tahun sekali juga perlu ditingkatkan, karena informasi yang diberikan secara berulang-ulang dapat membuat ingatan seseorang menjadi tidak mudah lupa.

2. Sumber informasi yang didapatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Magelang berasal dari Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, selaku lembaga pemerintah yang meneliti dan mengembangkan analisis Gunung Merapi. Selain itu sumber informasi masyarakat Kabupaten Magelang didapatkan dari BPBD Kabupaten Magelang.
3. Isi pesan yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Magelang pada masa normal berupa aktifitas kenaikan status Gunung Merapi berupa hasil analisis Gunung Merapi yang dikirim setiap dua minggu sekali. Masa normal yang dimaksud adalah kenaikan status Gunung Merapi dari Normal ke Waspada, dan dari Waspada ke Siaga. Sedangkan isi pesan yang disampaikan pada masa tanggap darurat berupa rekomendasi BPPTKG untuk pemerintah daerah mengenai tindakan lanjut. Masa darurat yang dimaksud adalah kenaikan status Gunung Merapi dari Siaga ke Awas, dan dari Awas ke Normal.
4. Medium yang digunakan untuk mempublikasikan informasi terkait aktifitas Gunung Merapi pada masa normal, BPBD Kabupaten Magelang menggunakan media surat resmi, whatsapp, *fax*, dan *e-mail*. Selain itu, BPBD juga mempublikasikan informasi tersebut melalui tatap muka atau himbuan pada saat kegiatan sosialisasi, apel siaga, pelatihan dan simulasi. Sedangkan, media yang digunakan untuk mempublikasikan informasi pada masa tanggap darurat, BPBD Kabupaten Magelang menggunakan semua medium yang ada seperti whatsapp, *handy talky*, *e-mail*, SMS berantai, radio darurat, speaker masjid, radio komunitas

dan televisi. Medium utama yang di gunakan BPBD pada saat tanggap darurat adalah penggunaan whatsapp, *handy talky* dan radio darurat.

5. Pengirim dan Penerima pada model komunikasi masa normal adalah informasi yang dikirim oleh BPPTKG Yogyakarta diterima oleh BPBD Kabupaten Magelang, diteruskan ke pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan, pengirim dan penerima pada model komunikasi tanggap darurat adalah informasi yang dikirim oleh BPPTKG Yogyakarta diterima oleh BPBD Kabupaten Magelang, diteruskan ke pemerintah kabupaten, komandan pos induk, sepuluh sektor pemerintah daerah, komandan pos lapang, pemerintah desa, OPRB, dan masyarakat.
6. Model komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi pada masa normal. Adanya gabungan pola komunikasi antara pola komunikasi struktur rantai (*chain*), dan pola komunikasi struktur roda (*wheel*). Pola komunikasi struktur rantai (*chain*) selaras dengan hasil temuan karena dalam keadaan normal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang dominan menggunakan alur komunikasi secara struktural dan ke bawah untuk mengirim informasi kepada Bupati, kecamatan, dan desa secara formal atau secara terstruktur menggunakan birokrasi tanpa ada balasan dari penerima.

Sedangkan pola komunikasi struktur roda (*wheel*), selaras dengan hasil temuan karena BPBD Kabupaten Magelang pada saat normal menggunakan arus komunikasi ke atas. Digambarkan dalam bentuk kegiatan tatap muka seperti sosialisasi, simulasi, pelatihan dan apel siaga tanpa terhalang oleh birokrasi dan dapat berinteraksi langsung dengan warga. Selain itu dalam model komunikasi pada masa normal pemerintah masih menggunakan medium surat resmi dan whatsapp personal kepada *stakeholder*, padahal pemerintah dapat mengirim informasi dengan membuat grup whatsapp yang terdiri dari semua stakeholder untuk mempersingkat waktu, menjaga unsur kebaruan dan menjaga keakuratan informasi.

7. Model Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana Erupsi Gunung Merapi pada masa tanggap darurat menggunakan pola komunikasi struktur “Y”. Dipilihnya Pola komunikasi struktur “Y” karena pola tersebut memiliki dua pemimpin. Pemimpin utama yakni BPPTKG menjadi posisi sentral, sebagai pusat informasi aktivitas

Gunung Merapi. Sedangkan pemimpin kedua yakni komandan pos induk sebagai pemimpin lapangan di Kabupaten Magelang.

Pola komunikasi struktur “Y” menggunakan alur komunikasi secara struktural dan non struktural. Alur komunikasi struktural menggunakan alur ke bawah yakni mengirim informasi ke warga mengenai segala jenis informasi. Sedangkan alur komunikasi non struktural menggunakan alur ke atas, yakni pemerintah daerah menggunakan semua medium untuk berkomunikasi dengan masyarakat terutama menggunakan radio darurat dan *Handy Talky*. Sehingga masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah maupun relawan yang berada pada satu lokasi tempat evakuasi akhir. Namun masyarakat tidak dapat berkomunikasi langsung dengan komandan pos induk. Di sisi lain pemerintah harus teliti dan hati-hati dalam memilih Komandan Pos Induk yang akan memimpin selama tanggap darurat.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penulis sadar bahwa penelitian ini masih belum sempurna, sehingga masih banyak kekurangan didalam penelitian ini. Adapun keterbatasan penelitian adalah penulis membatasi pengambilan data hanya pada instansi BPBD Kabupaten Magelang di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Bidang Tanggap Darurat. Adapun warga desa yang penulis wawancarai adalah Desa Kalibening Kecamatan Dukun, Desa Adikarto Kecamatan Muntilan, dan Desa Tanjung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Selain warga, penulis juga wawancarai Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI).

Untuk penelitian selanjutnya mengenai pola komunikasi, penulis harap dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih spesifik dan meluas. Serta diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti pasangan desa *Sister Village* lebih mendalam ke tingkat rumah tangga untuk menyempurnakan penelitian mengenai pola komunikasi BPBD Kabupaten Magelang.

5.3. Saran

1. Bagi instansi penanggulangan bencana yakni BPBD Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a) Agar mulai memikirkan sarana dan prasarana yang terdapat di salah satu pasangan desa *Sister Village* yakni desa penyangga sehingga pada saat bencana tiba pemerintah tidak kerepotan dalam menyiapkan segalanya.

- b) Meningkatkan kapasitas dengan tidak hanya memberikan program yang monoton sebaiknya melibatkan warga pada kegiatan seperti *out bond* dan lainnya antara pasangan desa, agar *Sister Village* tidak hanya dipandang sebagai program pemerintah yang elit namun juga dapat menjiwai arti kata “persaudaraan”.
 - c) Sebaiknya BPBD Kabupaten Magelang lebih intens dan terus menerus dalam melakukan program mitigasi bencana kepada masyarakat Kabupaten Magelang tidak hanya dilakukan dalam satu tahun sekali.
 - d) Saat tanggap darurat ketika suatu saat bencana erupsi Gunung Merapi terjadi untuk lebih gencar mendahulukan keterbukaan informasi dan komunikasi antar instansi, antar relawan, maupun antar masyarakat, agar dapat mengendalikan informasi simpang siur.
2. Bagi warga desa *Sister Village* agar mulai meleak informasi mengenai kebencanaan terlebih lagi bila desa tersebut berada dekat dengan Gunung Merapi. Serta mendukung, menghargai dan aktif berpartisipasi dalam membantu program pemerintah daerah.
3. Bagi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tentang studi pola komunikasi bencana sehingga dapat mendorong penulis berikutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Anies. (2017). *Negara Sejuta Bencana: Identifikasi, Analisis, & Solusi Mengatasi Bencana dengan Manajemen Kebencanaan*. Maguwoharjo: Ar-ruz Media.
- Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial)*. Vol. 3. Jakarta: Prenada Media Group.
- Devito, Joseph A. (1997). *Human Communication*, terj. Agus Maulan MSM. Jakarta: Professional Books.
- Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan bencana 2012. “*Pedoman Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana*”.
- Dwiyanto Agus. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haddow, George D. dan Kim S. Haddow, (2009) *Disaster Communications Changing Media World*. United States of America: Elseiver Inc.
- Harry Eko Susanto. (2011). *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Vol. 2. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Sudibyo Joko. “*Erupsi Gunung Merapi 2010 : sister village Sebuah Konsep Penanganan Bencana Terintegrasi.*” Bandung: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
- Kriyantono, Rachmat. (2015). *Public Relations, Issue & Crisis Management. Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Krisis & Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kusumasari Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintahan Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muhammad, Arni. (2009). *Komunikasi Organisasi*. Ed.1, Cet.11. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazaruddin, Muzayn, *et.al.* (2011). *Jurnalisme Warga, Radio Republik dan Pemberitaan Bencana*. Rev.ed. Yogyakarta: Komunikasi UII.

- Niswanta., *Erupsi Gunung Api Merapi 2010 Pemantauan, Penanggulangan dan Peran Masyarakat. "Manajemen Komunikasi Waktu Penunjang Keberhasilan Mitigasi Bencana G.Merapi"*. (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)
- Nugroho, Adi. (2008). *Upaya Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta: Yayasan SHEEP Indonesia (YSI).
- Nurhadi, Zikri Fachrul. (2015). *Teori-Teori Komunikasi. Teori Komunikasi Dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pace R Wayne., Don F Faules. (2005). *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, terj. Deddy Mulyana*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudiarno, Ade Reno, et.al. *Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat di Desa*. Jakarta Selatan: OXFAM.
- Susanto, Eko Harry. (2011). *Komunikasi Bencana. Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Tubbs Stewart L., Sylfia Moss. (1996). *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi, terj. Deddy Mulyana*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widyanto Mart. "*Erupsi Gunung Merapi 2010 : sister village / desa bersaudara penanggulangan bencana lewat persaudaraan desa.*" Bandung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Jurnal

- Basolo, Victoria, et., al. "The Effects of Confidence in Government and Information on Perceived and Actual Preparedness for Disasters," *Journal Environment and Behavior*, Volume. 41. (2009). p. 338-364
- Braman, Lisette Martine Braman, et.,al. "Climate forecasts in disaster management: Red Cross flood operations in West Africa, 2008," *Journal Compilation*, Volume. 37. (2013). p. 144-164.
- Iriyanti, Indyah Hayu. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume. 3. (Mei-Agustus, 2015).
- Lestari, Puji, et., al. "Komunikasi Lingkungan untuk Mitigasi Bencana Erupsi Gunung

- Sinabung,” *Jurnal ASPIKOM*, Volume. 3. (Juli, 2016). Hal. 56-64.
- Peerbolte, Stacy L. & Matthew Lloyd Collins. “Disaster management and the critical thinking skills of local emergency managers: correlations with age, gender, education, and years in occupation”. *Journal Compilation*, Volume. 37. (2013), p. 48-60.
- Pramoto, Indyo. “Klasifikasi Gunung Aktif di Indonesia : Studi Kasus dari Beberapa Letusan Gunung Berapi dalam Sejarah”. *Jurnal Geologi Indonesia*, Volume. 1. (Desember 2006).
- Roskusumah, Titan. “Komunikasi Mitigasi Bencana Oleh Badan Geologi KESDM Di Gunung Api Merapi Prov. D. I. Yogyakarta”, *Jurnal Kajian Komunikasi*. Volume. 1. (Juni, 2013). Hal. 59-68.
- Sadeka, Sumaya, et., al. “Social Capital and Disaster Preparedness: Conceptual Framework and Linkage,” *Journal of The Social Science Researches*, Volume. 3. (2015).
- Setiadi, Tedi. “Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Tanah Longsor, Mitigasi dan Manajemen Bencana di Kabupaten Banjarnegara,” *Jurnal KESMAS*, Volume. 7. (Maret, 2013). Hal. 1-54.
- Skripsi dan Tesis**
- Anggiani, Raysa Relegia. (2016). “*Evaluasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi di Kawasan Wisata Lava Tour Merapi Kabupaten Sleman.*” Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fatmasari, Intan. (2015). “*Strategi Perencanaan Partisipasi Masyarakat Untuk Mitigasi Bencana Tsunami di Pesisir Pacitan Jawa Timur (Kasus Kelurahan Ploso dan Kelurahan Sidoharjo).*” Tesis, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fendri Usmayati. (2012) “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo dalam Mitigasi Bencana Tahun 2010.*” Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Hidayat, Mochtar. (2013). “*Mitigasi Bencana Berdasarkan Kepercayaan Lokal (Studi Kasus*

Kepercayaan Lokal Dusun Stabelan dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi tahun 2010).” Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Megantari, Krisna. (2013). *“Pengelolaan Komunikasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Sleman.”* Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet.

Hamim, Tohari. *“Siklus Erupsi Gunung Merapi Bisa Berubah.”*

<http://jogja.tribunnews.com/2016/10/26/siklus-erupsi-gunung-merapi-bisa-berubah>

(Akses, 30 Mei 2017).

“Visi dan Misi ”

http://bpbd.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=95 (Akses, 30 Mei 2017).

“Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”.

<https://bnpb.go.id/rencana-strategis.html#lg=1&slide=0> (Akses, 09 Januari 2018).

“Tugas dan Fungsi BPPTKG Yogyakarta.”

<http://merapi.bgl.esdm.go.id/pub/page.php?idf=3> (Akses, 26 Februari 2018)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

Program Studi Psikologi (S1), Program Studi Ilmu Komunikasi (S1), Program Pendidikan Bahasa Inggris (S1),
Program Studi Hubungan Internasional (S1), Program Magister Profesi Psikologi (S2)

Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2017
Nomor : 786 / Dek / 70/Div.Um.RT / X / 2017
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data untuk Skripsi
Kepada Yth.
Kepala BPBD Kabupaten Magelang
Jl. Soekarno-Hatta No. 7A Kota Mungkid, Magelang

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi/tugas akhir.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta dan Lembaga maupun individu. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian/pengambilan data mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia tersebut dibawah ini :

Nama : **SUNNORA MEILISA KAHARJONO**
Nomor Mahasiswa : **14321069**
Judul Skripsi : *Analisis Manajemen Komunikasi Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang dalam Kampanye Tanggap Bencana Erupsi Merapi*

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dekan,


Dr. rer. nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog

Dosen Pembimbing,


Muzayin Nazaruddin, S.Psi., MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

Program Studi Psikologi (S1), Program Studi Ilmu Komunikasi (S1), Program Pendidikan Bahasa Inggris (S1),
Program Studi Hubungan Internasional (S1), Program Magister Profesi Psikologi (S2)

Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2017
Nomor : 786 / Dek / 70/Div.Um.RT / / 2017
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data untuk Skripsi
Kepada Yth.
Gubernur DIY
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Jalan Jendral Sudirman No.5 Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi/tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta dan Lembaga maupun individu. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian/pengambilan data mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia tersebut dibawah ini :

Nama : **SUNNORA MEILISA KAHARJONO**
Nomor Mahasiswa : **14321069**
Judul Skripsi : *Analisis Manajemen Komunikasi Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang dalam Kampanye Tanggap Bencana Erupsi Merapi*

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dekan,


Dr. rer. nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog

Dosen Pembimbing,


Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

Program Studi Psikologi (S1), Program Studi Ilmu Komunikasi (S1), Program Pendidikan Bahasa Inggris (S1),
Program Studi Hubungan Internasional (S1), Program Magister Profesi Psikologi (S2)

Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2017
Nomor : 786 / Dek / 70/Div.Um.RT / X / 2017
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data untuk Skripsi

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Jln. Mgr. Soegiyopranoto No.1 Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb


Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi/tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta dan Lembaga maupun individu. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian/pengambilan data mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia tersebut dibawah ini :

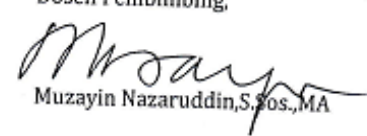
Nama : **SUNNORA MEILISA KAHARJONO**
Nomor Mahasiswa : **14321069**
Judul Skripsi : *Analisis Manajemen Komunikasi Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang dalam Kampanye Tanggap Bencana Erupsi Merapi*

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Dekan,


Dr. Fer. nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog

Dosen Pembimbing,


Muzayin Nazaruddin, S.Psi., MA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 Oktober 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8647/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas
Islam Indonesia
Nomor : 786/Dek/70/Div.Um.RT/X/2017
Tanggal : 11 Oktober 2017
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data untuk Skripsi

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "ANALISIS MANAJEMEN KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA BPBD KABUPATEN MAGELANG DALAM KAMPANYE TANGGAP BENCANA ERUPSI MERAPI" kepada:

Nama : SUNNORA MEILISA KAHARJONO
NIM : 14321069
No.HP/Identitas : 081809095928/3273127005960002
Prodi/Jurusan : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia

Lokasi Penelitian : Kabupaten Magelang
Waktu Penelitian : 13 Oktober 2017 s.d 31 Desember 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/3718/04.2/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/8647/Kesbangpol/2017 Tanggal : 13 Oktober 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : SUNNORA MELISA KAHARJONO
2. Alamat : JL. Deme NO.115/117 RT.05 RW.03 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Bantununggal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Riset dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : ANALISIS MANAJEMEN KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA BPBD KABUPATEN MAGELANG DALAM KAMPANYE TANGGAP BENCANA ERUPSI MERAPI
- b. Tempat / Lokasi : Magelang
- c. Bidang Penelitian : Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya
- d. Waktu Penelitian : 15 Oktober 2017 sampai 31 Desember 2017
- e. Penanggung Jawab : Muzayn Nazaruddin, S.Sos., MA
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 13 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Oktober 2017

Nomor : 070/10047/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Magelang
U.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Magelang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/3718/04.2/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 atas nama SUNNORA MEILISA KAHARJONO dengan judul proposal ANALISIS MANAJEMEN KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA BPBD KABUPATEN MAGELANG DALAM KAMPANYE TANGGAP BENCANA ERUPSI MERAPI, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pimpinan Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
5. Sdri. SUNNORA MEILISA KAHARJONO.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616
KOTA MUNGKID 56511

Nomor : 070 / 698 / 47 / 2017

Kota Mungkid, 16 Oktober 2017

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi.

Kepada :
Yth, Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Magelang.

Di -
KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari DPMPSTSP Prov. Jateng
Nomor : 070/3718/04.2/2017
Tanggal : 13 Oktober 2017
Tentang : Rekomendasi Penelitian
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : SUNNORA MEILISA KAHARJONO
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat : Jl. Deme No. 115/ 117 RT. 05.RW.03
Kelurahan Cibangkong Kecamatan
Bantununggal Kota Bandung Provinsi Jawa
Barat
 - d. Penanggung Jawab : Muzayn Nazarudin, S. Sos, MA
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 - f. Waktu : 15 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017
 - g. Lembaga : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
 - h. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :

**ANALISIS MANAJEMEN KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA BPBD
KABUPATEN MAGELANG DALAM KAMPANYE TANGGAP BENCANA
ERUPSI MERAPI**

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG
Kasi Ketahanan, Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi



Tembusan,

1. Bp. Bupati Magelang (sebagai laporan).

2. Kepala Badan (Dinas / Kantor / Instansi) Yth



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 16 Oktober 2017

Nomor : 070/412/16/2017
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. **SUNNORA MEILISA KAHARJONO**
Jl. Deme No. 115/117 Rt. 005 Rw. 003 Kel.
Cibangkong Kec. Batununggal Kota
Bandung Provinsi Jawa Barat
di

KOTA BANDUNG

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang
Nomor : 070/698/47/2017 Tanggal 16 Oktober 2017, Perihal Rekomendasi Izin
Penelitian.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Penelitian di
Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **SUNNORA MEILISA KAHARJONO**
Pekerjaan : Mahasiswi, Ull Yogyakarta
Alamat : Jl. Deme No. 115/117 Rt. 005 Rw. 003 Kel. Cibangkong Kec.
Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab : Muzayn Nazarudin, S.Sos, MA
Lokasi : BPBD Kab. Magelang
Waktu : 15 Oktober 2017 s.d 31 Desember 2017
Peserta :
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
**ANALISIS MANAJEMEN KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA
BPBD KABUPATEN MAGELANG DALAM KAMPANYE
TANGGAP BENCANA ERUPSI MERAPI**

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian agar Saudara Mengikuti Ketentuan- ketentuan
sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak
mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG

Ub.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait

LAMPIRAN 2



Pelatihan sistem informasi dan komunikasi tanggap darurat
(Sumber : Dokumen pribadi 16 November 2017)



Spanduk simulasi gladi posko dan gladi lapang
(Sumber : Dokumen pribadi 17 November 2017)



Proses evakuasi dari Desa Kalibening menuju Desa Tanjung dan Desa Adikarto
(Sumber : Dokumen pribadi, 18 November 2017)



Suasana Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Desa Adikarto pada saat gladi lapang
(Sumber : Dokumen pribadi, 18 November 2017)

LAMPIRAN 3

Transkrip wawancara Sinam M Sutarno 16 Februari 2018

Sunnora	Apa pendapat bapak mengenai program sister village dan apa kelemahan dari program tersebut?
Sinam	<p>Saya juga belum tau ini kelahirannya terjadi dimana, Cuma sister village itu adalah sebuah ktikik atau perbaikan dari sistem pengungsian yang berbasis barak, tenda atau apa dalam satu lokasi. Nah itu kan 2010 terjadi pengungsian besar-besaran di lereng merapi magelang, boyolali, klaten,sleman. Nah kemudian di barak, karena darurat banyak yang tidak siap, misalnya yang paling sering dibutuhkan yang pertama adalah air, yang kedua ini adalah MCK ini kan menjadi problem yang sering muncul problem berikutnya adalah tempat tidur misalnya atau kemudian sistem koordinasinya juga rumit banget banyak orang dalam satu lokasi itu yang menjadi sistem koordinasinya menjadi tidak baik.</p> <p>Kemudian munculah sister village. Ini kan pembelajaran dari beberapa warga yang dia tidak mengungsi ke pengungsian berbasis barak atau tempat publik lainnya, tapi dia lebih memilih kerumah warga kerumah sodaranya secara psikologis lebih baik yang tinggal di rumah warga dan yang tinggal di pengungsian secara psikologis lebih baik, secara psikologis lebih baik karena dia merasa tidak mengungsi tapi menginap dalam situasi settingnya juga rumah biasa rumah sodara tidak berhadapan dengan banyak orang yang bernasib sama. Itu kemudian menarik untuk di kembangkan, nah program sister village sebenarnya harapannya kedepan desa-desa di rawan bencana itu punya teman di desa aman, mereka bisa bersahabat, jadi ketika terjadi bencana mereka akan pindah dengan waktu yang cepat dan mreka berinteraksi sewajarnya dengan warga-warga yang ada disitu sampai bencananya selesai.jadi sister village itu keadaan situasi darurat itu tidak terasa seperti keadaan darurat yang mencekam, jadi sister village adalah kritik dari sistem pengungsian berbasis barak.</p>
Sunnora	Kelemahannya sendiri apa?
Sinam	Nah kelemahannya sendiri adalah pasti kemudian mekanisme koordinasi ini mudah diucapkan namun sulit dijalankan nah bagaimana relasi antar desa ini terjadi antara desa A dan desa B, kalau sister village yang di peruntukan untuk desa A yang menampung desa B dalam kondisi bencana mungkin seminggu

Sunnora	<p>masih nyaman untuk menerima tamu tapi lama-lama dia merasa seperti beban nah itu kemudian untuk menolong desa B, apa yang akan desa A dapatkan selama menolong.</p> <p>Nah kemudian sister village kedepan itu tidak hanya dalam konteks bencana tapi dalam konteks bersahabatnya lebih dalam. Oke misalkan desa A petani semua, desa B yang di kota ini bisa belajar dari desa A tentang alat-alat pertanian. Out bond atau di daerah yang aman mereka bisa. Nah sister village harus dkembangkan lebih luas mekanisme misalnya potensi masing-masing harus di identifikasi untuk bisa mensupply jadi memberi dan menerima. Misalnya didaerah atas ini punya kesenian-kesenian tentu kemudian desa yang dibawah kalo sedang memerlukan hiburan bisa didukung dengan kesenian yang ada di desa atas. Atau misalkan disini produsen sayur kedepannya sister village harus dikembangkan dalamkegiatan ekonomi, sosial, budaya, tidak sebatas pada situasi bencana. jadi saat ini kelemahannya masih by projek, jadi masih di desain oleh pemerintah, tapi kemudian internalisasi bahwa kamu adalah sahabatku itu masih perlu ditingkatkan itu belum sampai situ levelnya masih perbincangan elitlah tapi bagaimana kemudian kedekatan hubungan sosial antara desa A dan desa B ini belum keliatan. Cara memperkuatnya ya tadi memperkuat dengan relasi-relasi non kebencanaan. Karena sister village itu jangan salah persepsi bahwa desa A siap menampung desa B itu kalo begini kan ya apa seminggu masih kuat kalo lama mungkin akan menjadi beban tentu kemudin orang yang memberi akan mendapatkan mafaat entah manfaat itu apa entah sosial atau budaya, tapi prinsipnya kemudian persaudaraan itu memberi dan menerima. Kelemahannya sampai sekarang masih perbincangan elite antara pemerintah desa tapi belum di internalisasi dalam atau belum dijiwai di masyarakat desanya mungjin kalau ditanya ke warga desa, desa sodaramu mana? di acak tau gak. Kalo saya sih pengen dari 100 warga berapa yang tau. Yang saya ketahui tidak semua warga memahami bahkan kata “sister vilage” itu juga suatu kelemahan harus di cari padanan kata yang lebih jawani yang lebih jawa misalkan (seduluran deso) kata sister village itu dalam tanda kutip masih semacam brand projek kalo warga kan masih seduluran deso. Ini keliatan dari sisi bahasa saja kan itu belum menjadi bagian dari inisiais warga kalimatnya masih diserap dari bahasa asing ya gapapa sih tapi kan kemudian ini harus diinternalisasi warga harus tau, harus meyakini dan kemudian akan menggunakna itu saya kira kelemahan nya disitu. Ya elit-elit di desa yaa atau mungkin bersifat program, belum menjadi jiwa warga desanya.</p> <p>Nah untuk mendukung sister vilage tadi pendaatnya tentang destana?</p> <p>Saya juga beberapa fasilitasi destana, saya kira itu destana dalam relawan tim</p>
---------	--

Sinam	<p>siaga desa, oprb, tni kalo disini ada klaster itu saya kira cukup menarik sebagai sebuah ikhtiar bahwa perangkat yang ada disesa ini diberikan pengetahuan baru tentang wajib latih tentang manajemen posko ini menarik kalo di merapi mungkin dalam konteks relawan itu beberapa ada yang sudah dapet tapi kesiapsiagaan itu kan belum cukup kuat hadirnya destana juga didukung uu desa nomor 6 tahun 2012 desa itu jawabannya memang isi kebencanaan sekarang mungkin bisa diperiksa di apbd desa sudah menggarkan itu, tapi bagi saya desa sudah berpikir tentang kebencanaan desa saya pencapaian dari destana bahwa kemudian orang desa juga tidak melulu membangun tapi ada perspektif tentang pengurangan resiko bencana ada beberapa program tentang pelatihan tidak hanya dari bpbd tapi desa juga inisiatif kemudian lahirah kelompok relawan yang ada di desa cukup terasa misalkan longsor kemudian dengan cepat teman-teman bergerak. Ini dalam konteks yang kecil gitu sudah lebih cepat, dan saat terjadi bencana di banjar teman-teman relawan ini juga cepat karna sudah diatih oleh destana ada yg membantu evakuasi ada yang membantu di dapur ada yang membantu komunitas ada yg membantu mengelola infi berbasis internet bhkn juga ada Rsa empati solidaritas juga kuat dan sekarang ada salurannya entah diwujudkan dalam uang barang, atau tenaga sekalipun</p> <p>Terus menurut bapak kelemahan dari destana sendiri itu apa?</p>
Sunnora	
Sinam	<p>Itu tadi saya kira mirip dengan ssiter village masih dalam level elite, orang-orang tertetu seperti di desa, namun orang-orang umum seperti di desa juga perlu ditingkatkan. Misalkan bisa di cek kalo tiba-tiba merapi meletus mau lari kemana. Ketika kalo merapi meletus kalian mau kemana? Indikatornya menurut saya tegas kalo dia sudah tangguh saya akan ke desa B saya akan bawa ini, tegas. Kalo ditanya dengan dadakan itu jawabnya tidak lebih dari 2 menit dia bisa menjawab dengan pasti. Nah sekarang mungkin kelemahannya belum sampai pada masyarakat yang lebih luas.</p> <p>Itu menurut saya sosialisasi pelatihan simulasi itu kepada siapa sih. Mungkin sosialisasinya salah. Jadi yang yang dimaksud sosialisasi adalah bikin acara di kantor desa padahal kalo media sosialisasi kan kita bisa datang ke posyandu rapat rt yasinan ke rapat apa, tidak harus membuat acara baru justru lebih baik kita menggunakna acar-acara yang ada di masyarakat pengajian nah itu dimanfaatkan atau belum. Kalo mengandalkan bikin acara baru itu urusannya kegiatan tapi menurut saya lebih penting bukan kegiatannya tapi mereka cepet tau. Pertama irit Cuma kelemahannya kalo mengikuti acara warga biasanya malam kegiatannya waktunya kan mengikuti warga, kenapa malas karena disaat</p>

<p>Sunnora</p> <p>Sinam</p>	<p>mereka bekerja, karena selama ini kan warga dibawa ke bale desa ke apa artinya kita yang masuk ke ruang warga beberapa di magelang juga gatau apakah sudah begitu tapi selama ini pemahaman desa sudah begitu. Kepla desa sosialisasi dapet makan dapat transportasi. Padahal uang transportasi itu bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Sosliasisanya bisa juga dibikin dalam film yang Cuma 5 menit atau 10 menit. 1 orang kemarin dapet 150k. Nah itu yang kemudian menurut saya manajemen sosialisasi simulasi perlu diperbaiki lagi.</p> <p>Kedepan untuk himbawan itu sudah harus dicari warga champion warga hebat dia bisa memberi informasi pada temannya sendiri itu akan lebih cepat</p> <p>Model komunikasi bencana keadaan normal, bagaimana pendapatnya?</p> <p>Jadi ini kalau informasi itu, ini informasinya berbasis fax ya belum pake wa. Ini kan sesungguhnya pilihan fax juga gak efektif. Skrg yang pake fax siapa? Pasti pemerintah, dan apakah di desa juga ada fax? Belum tentu semua punya, dan pilihan kenapa fax sekarang itu kalo di boyolali beberapa informasi kebencanaan itu sistem komunikasinya kita itu ada group, jadi kalo ada apa-apa ini cepat yang di grup sini itu ada sekitar 200 orang itu semua orang ini pak sinunu kepala bpbd pak yoyok ini kepala pusdalops,harusnya dalam kondisi apapun informasi sepanjang bukan, tapi etikanya memang harus dijaga harusnya dibuat secepat mungkin jadi informasi itu cepat tapi punya tingkat akurasi yang tinggi. Nah informasinya dari mana. kalau misalnya di desa ini infromasinya mendapat nah grup wa itu bisa cepat. Karena kemudian ini butuh pengambilan keputusan yang cepat nah kalo pilihan mediumnya masih sesuatu yang fax misalnya maka media itu harus dipastikan dipake banyak orang, sekarang internet jauh lebih cepat dari pada fax misalnya bahkan pilihan email dalam internet itu harus di pilah lagi kita ngirim email itu belum tentu dibaca jadi kebiasaan orang menerima informasi ini dari mana sih, kalo sekarang menurut saya yang paling cepat di bawa itu WA. Wa itu kelemahan nya agak susah memastikan antara hoax dan bukan, makanya butuh literasi penggunaan media sosial misalkan kalo menginformasikan itu harus pasti kapan diinformasikan, siapa pengirimnya, dan ada kontak personnya, nah yang begitu sebenarnya ada proses literasinya kalo saya lihat disini dalam situasi normal pun fax menjadi sesuatu yang agak jangga di era sekarang mungkin kalo email agak menarik yang paling cepat sebenarnya adalah wa. Jadi ini model komunikais di kalo merapi itu ada namanya jalin merapi ini mas nurholik orang bppptkg dia ngirim ini (info status merapi) dia ngirim ini lewat jpg kirim</p>
-----------------------------	--

Sunnora	<p>kesini disebarikan ke teman merapi dan ini lebih efektif. Pilihan medianya harus dipastikan media itu dipake oleh semua orang nah ini kalau misalnya ke desa.</p> <p>Termasuk kemudian pertemuan tatap muka langsung itu menjadi pertemuan yang efektif, tapi kendala pertemuan langsung itu kan terbatas, terbatas waktu terbatas orang, karena kalo kita ngomong pertemuan langsung 100 org juga sudah tidak efektif kalo diskusi itu maksimal 50 org. Saya kita ini perlu tambahan di modifikasi kalo di jrki ada 3 jaringan namanya 3 on, (on air, on line, online) on air itu siaran, online itu internet, on line itu off air, tiga2nya itu harus berjalan tidak boleh dipilih salah satu jadi prinsip berkomunikasi adalah kita tidak boleh percaya pada 1 media karena kemudian setiap orang punya minat berbeda tentang media. Saya punya temen sampe sekarang gak mau bikin fb, ada karakter yang berbeda setiap media saya lebih enjoy pake facebook dan instagram twitter ya kadang-kadang nah itu tentu kemudian pengelola informasi dan komunikasi harus menjawab semua kebutuhan di media itu, bahkan twitter sekarang lebih turun sekarang lebih ke instagram nah kemudian pemilihan itu surat resmi bisa ditampilkan sepanjang bukan sesuatu yang bersifat rahasia.</p> <p>Bagaimana dengan model komunikasi bencana keadaan darurat??</p>
Sinam	<p>Ini sebenarnya penting kemudian di setiap klaster itu harus ada pengelola informasi kayak PR atau humasnya lah dia bisa menginformasikan itu dan bisa memenej disini misalnya di logistik stok itu ada apa saja mereka butuh tim informasi mengelola informasi di masing-masing klaster.</p> <p>Nah memang kayak siapapun begitu dalam situasi bencana pun apa harus menggunakan segala macam media apapun termasuk bupati dia pantau terus kegiatan jadi informasi yang cepat itu juga akan memengaruhi informasi. Informasi yang disampaikan cepat kemudian proses pengambilan keputusannya pun cepat juga harus akurat juga nah kemudian informasi yang akurat juga haru didukung oleh tim informasi di setiap klaster misalkan dalam infokom ini dalam situasi tanggap darurat yang kita kembangkan bikin radio darurat dia akan bersiaran selama tanggap darurat menginformasikan bahkan ada saudaranya ilang dia bisa infokan , atau bisa juga saling menghibur. Nah media radio darurat ini menarik untuk jrki sudah pakai di merapi kelud sinabung juga cukup efektif itu pun memang dalam kaferage perlu ada, kalo menurut saya sih perlu ada penambahan 1 radio darurat. Radio komunitas juga penting kayak ini pak holik memberikan informasi ini kemudian temen2 komunitasradio menyiarkan informasi ini.</p>

Sunnora	<p>Untuk masalah komunikasi keadaan darurat itu apa??</p>
Sinam	<p>Nah saya kira semua operator media centernya harus banyak menjawab semua media yang dibutuhkan jadi ada yang jadi admin twitter admin facebook admin media sosial, karena begini peran media center itu harus meluruskan banyak hal, bencana kedua setelah bencana adalah bencana informasi misalnya begini saya yakin jam 6 akan ada gempa bumi besar itu nyebar viral melalui wa ya kalau sekarang dan itu harus dijawab cepat maka semua medium harus dipake untuk bisa menjawab cepat siapapun sampai sekarang tidak ada alat pendeteksi gempa. Jadi media center ini kemudian di lengkapi ada radio darurat, HT, pokoknya semua yang dipake masyarakat itu pake semua medianya.</p>
Sunnora	<p>Apakah efektif menggunakan pola seperti ini pada saat darurat??</p>
Sinam	<p>Begini ya ini akan rancu dengan komunikasi bencana lainnya jadi kan semua akan punya sistem, liat bencana juga ya kalo bencana besar orang akan kesitu, beberapa tidak terkonsolidasi pengalaman sampe sekarang kemudian semuanya main sendiri-sendiri tidak satu pintu nah itu pentingnya media senter yang saya tidak yakin bakal satu pintu. Dandim itu yang kemudian menjadi tidak nyamann posko induk mungkin iya tapi bahwa media, media itu dia harus membuka ya dandim karena dia efektifitasnya terjamin dia punya pasukan lansung tapi juga banyak relawan lain yang tentu belum bener berkoordinasi disitu jadi memang harus bpbdnya kuat didukung dengan media center yang disiapkan dari awal, temen-temen blogger, orari, rapi, kalo menurut saya yang paling tepat ya dinas infokom, seharusnya media center itu dinas infokom karena dia yang menginformasikan semua, sektor infokom ini terus ini infokomnya apa kalo media centernya ada disini posko induk sebagai ini tapi bahwa mengetahui klaster infokom ini ngapain kalo disini saya kalo melihat justru di infokom ya media center disitu.</p> <p>Dandim bisa mengkoordinasikan jajarannya tapi kemudian temen-temen yang lain jobdesknya ada disini (infokom) ya boleh aja di perkuat dandin. Ini kan kesemuanya yang memperkuat dandim ya berat, kemudian ini kan fokus ngomongin tentang keamanan sebagai koordinator mungkin iya tapi yang akan fokus sepesialisasinya ada dini (infokom) menurut saya ya.</p> <p>Bagaimana cara melibatkan warga???</p>

Sunnora	<p data-bbox="379 264 1402 1686"> Pertama adalah kalo melibatkan itu kan membangun ini dulu ya kesadaran warga dulu ya, komunikasi itu jadi orang punya kepentingan jadi pastikan di punya kepentingan, selama dia gak punya kepentingan disuguhi apapun ya gak akan mau, jd pastikan dia punya kepentingan, kepentingannya apa terbebas dari bencana. pola yang bisa digunakan ya tadi pertemuan-pertemuan warga ditingkatkan untuk mengajak. Jadi gini komunikais dengan warga itu adalah memposisikan warga sebagai pihak yang diberi informasi padahal sesungguhnya mereka banyak informasi karena mereka hidup lebih lama, lebih dulu dia tinggal diarah situ juga tidak luput dari bencana-bencsns yang terdahulu yang sudah terjadi mereka adalah buku-buku hidup terus dijejali informasi seolah mereka tidak tahu dan kita tahu maka celaka pasti ditolak, sifatnya adalah dialogis warga tu banyak pengetahuan ya mari kita dialog diskusi dengan warga memutuskan mendefisinkan mengenali potensi lebih jauh di daerahnya dengan pola diskusi. Misalnya merapi itu sudah meletus berapa tahun apa yang terjadi dan mereka bisa belajar dari yang mereka alami kemudian mereka butuh informasi sesuatu dan mereka beruaha kalo di ekologi komunikasi itu sering dijelaskan bahwa informasi yang di butuhkan dan informasi yang dihasilkan jadi butuh info apa dan dia punya info apa, kemudian saya butuh informasi itu infonya ada dimana oh saya butuh info tentang merapi adanya di bppptkg kemudian nanti disini akan mengemas informasi, ini baik sekali apakah informasi tapi apakah ini data akan menjadi informasi belum, ini harus dikemas lagi, nah kalo sekarang kan ada yang membuat informasi dengan “meme” ciri informasi yang baik adalah dapat menggugah kesadaran dan lebih tinggi lagi ada perubahan perilaku dia melakukan sesuatu kemudian lebih tinggi lagi melakukan sesuatu dan mengajak orang lain melakukan sesuatu tentu saja ada proses pengolahan informasi yang ada disini menempatkan warga sebagai sumber informasi kemudian orang yang butuh informasi kemudian ada tim disini infokom untuk mengelola informasi tadi salah mengelola informasi pesan yang akan disampaikan pun bisa salah, mengajak orang mengungsi tapi dengan apa. Kan disini beberapa warga pasti punya kepercayaan tertentu terkait solusi yang kiranya bagi kita susah untuk melogikakan tapi itu iyakini dan kita gak boleh berdebat tentang keyakinan itu misalkan. Yang penting menyelamatkan itu berdebat tentang keyakinan nanti. </p> <p data-bbox="379 1727 1402 1798"> Itu yang menurut saya salah satu mengajaknya dengan mengajak dialog dengan segala medium yang ada prosesnya adalah dialogis dalam berkomunikasi. </p> <p data-bbox="379 1906 1402 2018"> nah kemudian yang kedua adalah memetakan medium-medium informasi yang paling banyak digunakan warga. Misalkan kita ngomongin WA begini warga yang punya Hp android Cuma beberapa oh gak efektif berarti, kan konteks </p>
---------	---

disini dan disini akan beda lagi. jadi alat komunikasi apa lagi yang akan digunakan oleh warga yang digunakan untuk penyebaran atau pun berkomunikasi. Ya ternyata warga lebih banyak menggunakan sms oh erati sms lebih efektif, oh warga sudah tidak pake sms sekarang beralih ke line misalkan kita pake WA tapi warga disitu pake LINE kita gak tau kan. Nah pemetaan informasi dan komunikasi yang ada Tv, Radio atau apa jadi ya infokom ini menurut saya yang bekerja memetakan. Kalo boyolali ada sekian ribu warga ya harus tau berapa warganya yang pake hp yg pake Ht yang paka radio yg melihat tv siapa yang baca koran kemudian produksi informasi itu bisa disebarkan oleh segenap medium dengan pacaging yang berbeda tapi substansinya sama

ada sesuatu yang harus berulang-ulang itu jadi substan cara penyampaian informasi yang terus-menerus gak hanya sekali. Oh kalo merapi meletus jalur evakuasinya ini itu disampaikan terus-menerus entah sebulan sekali entah melalui leaflet entah melalui apa semua warga dia bisa baca sewaktu-waktu. Selama ini itu belum. Saya itu dulu ngapain sih capek tiap naik pesawat selalu dijelaskan emang harus begitu kita itu pelupa nah harus diingatkan begitu, ketika suatu saat terjadi sudah hafal dengan situasi itu nah itu yang menurut saya penting menjadikan warga sebagai bagian dari informasi dan komunikasi kebencanaan yang berulang-ulang karena substansinya mereka harus diingatkan merapai bisa meletus lagi kalo meletus apa tindakannya itu yang saya kita prodak knowledge saya kita belum banyak.mulai dihitung misalkan kaloau dari desa ku ke desa sini butuh lari berapa jam dalam waktu normal kalo dalam situasi krodit itu berapa lama nah apa simulasi itu kan mensimulasikan simulasi masa normal latihannya saat normal tapi saat krodit kan berbeda. Saat normal hanya ada 100 kendaraan yang sama tapi mungkin dalam situasi darurat bisa menjadi 2000 nah proses evakuasi dalam keadaan 2000 itu pasti akna berbeda itu kemudian harus disimulasikan terus.

NAMA	DIALOG
Muzamil	<p>Seko1 sek opo pertanyaane ini lagi gawe laporan sister village. Contoh nih nomer 3 peserta dari desa keminar dan desa ngerajek selaku desa penyangga masing-masing membawa laptop dan diberi arahan oleh 4 fasilitator bagaimana cara memasukan data dari masing-masing sistem informasi desa. Yang ditanyain apa itu?</p>
Sunnora	<p>Isi materi pelatihan/ sosialisasi/ apa yang bapak sampaikan pada masyarakat pada saat mitigasi bencana?</p>
Muzamil	<p>Mitigasi itu kan pengurangan harta, benda, jiwa. Disitu kan melatih masyarakat biar dia bisa mandiri, biar ketika mau bikin rumah fondasi itu tadi tau caranya pasang batu dsb. Itu kan kemandirian. Setelah ketemu kemandirian disitu ketika terjadi bencana diharapkan mereka tau. Oh kalo kayak gini ni mau hujan deras bisa terjadi banjir jadi saya tak pergi, nanti kalo sudah hujan saya kembali lagi. itu juga bagian dari mitigasi bencana juga, nah terus ketika terjadi bencana biar manusianya tidak jadi korban, harta benda tidak jadi korban saya harus ngapain, makanya diberi pembekalan mitigasi bencana tadi. Biar disampaikan sosialisasi, sekarang mitigasi bencana tanah longsor yaudah kita ngomongin khusus tanah longsor bagaimana tandanya, bagaiman penyebabnya, setelah tanda dan penyebab saya harus ngapain itu pokok. Saya prinsip 3 itu saja tidak usah ngomong terlalu banyak sek dijak ngomong ndak sebel. Jadi prinsip 3 saja, 1 tanda-tandanya, 2 penyebabnya, dan 3 cara mengantisipasi. Ketika sudah terjadi misalnya longsor harus bagaimana nah disitulah ketika dia tau longsor dia harus lari, lari yang bener kayak gimana, kan itu juga bentuk mitigasi. Ketika longsohnya ke timur sampean larinya ke timur itu namanya bunuh diri nah itu namanya mitigasi, harusnyamenurut mitigasi larinya jangan ke timur tapi ke utara atau ke selatan. Sehingga luncuran longsor tetap kesana, kita terhidar.</p>
Sunnora	<p>Kalo untuk mitigasi bencana erupsi merapi sendiri gimana pak?</p>
Muzamil	<p>Masing-masing mitigasi bisa masuk dan mitigasi nya juga berbeda ini nya sama untuk mengurangi atau meminimalisir kejadian ataupun kerusakan harta benda, itu sama intinya mitigasi itu, yang penting mitigasi itu diarahkan kemana diarahkan ke tanah longsor tadi saya sudah jelaskan,</p>

	<p>ketika arahnya itu banjir lahar dingin itu juga didukung oleh hujan dulu. Ketika kita bicara erupsi misalnya banjir lahar dingin jelaskan disitu ancamannya air apa yang harus dihindari ya panjenengan jangan jalan di tepi aliran sungai, harus jauh dari bibir sungai, kegiatan juga bahkan aktifitaspun tidak boleh didekatsit. Kan sekarang ada aturannya untuk mendirikan bangunanpun minimal 300m dari bibir sungai itu untuk mendirikan bangunan, itu yang akan membangun kalo yang sudah terlanjur ya gapapa. Sarannya mereka istitilahnya itu loh apaya menjauhkan bencana dari manusia itu 1, yang ke 2 menjauhkan manusia dari bencana, yang ke 3 berdampingan dengan bencana. ketika kita tadi ke masalah aliran ketika rumahnya sudah dekat dengan aliran sungai gak mungkin merek kita pindah karena merea tidak punya tempat untuk relokasi, pemerintah tidak punya dana sebanyak itu ketika 1000 orang harus relokasi itu tidak mungkin, nah dia hidup berdampingan dengan bencana caranya gimana ketika sudah mendung, sudah hujan lebih dari 1 – 2 jam mereka harus bergeser dari rumah itu ke tempat tetangganya, tujuannya kalo ada banjir besar dan rumah terhantam paling tidak nyawa sudah bebas itu salah satu mitgasi. Ilmu titen masalahnya oh ini mau terjadi banjir saya pergi dulu, oh ini ancaman tanah longsor oh saya pergi dulu.</p> <p>Ketika bentuknya awan panas sekarang panjenengan nalar wae, nek awan panas itu kan didahulukan oleh wedus gembel mungkin itu ancamannya bisa debu, bisa kerikil panas dan itu pun jaraknya ada, ketika sudah di KRB 1 mungkin aman salah satunya ya lari tadi, Cuma seperti itu didukung oleh tingkat kemampuan,tingkat keterampilan, tingkat pengetahuan. Dengan adanya sosialisasi mereka di kandani, ben mudeng. Oh ketika terjadi ini saya harus lari berarti kemandiriannya itu ada.</p> <p>Jadi ketika terjadi awan panas ya jelas kita berlindung, jadi tanda harus ngerti, penyebab, terus ketika terjadi kudu gimana intinya 3 hal saja itu bisa dipake di kejadian bencana apa saja.</p> <p>Kembali ke maslaah gempa bumi nek saya biacara lempengan mungkin ngerti nek jelasin ke masyarakat, lempengan ki opo. Jadi bahasa kasarnya ya itu terjadi karena kuasa yang diatas, tapi ketika cara menghindari bagaimana, nomer 1 melindungi kepala bisa masuk kolong bisa masuk meja, pakai helm tidak salah juga, kita lebih mengutamakan lindungi kepala.</p> <p>Salah satu dari sister village juga kesepakatan dulu yaitu MOU, sepakat gak desa sini. Karena yang paling berat itu yang menyanggah bukan yang disanggah</p>
Sunnora	Apa yang bapak lakukan ketika status merapi dikatakan awas.?
Muzamil	Kalo sekarang kan sebelum awas saja harus sudah diungsikan, kalo dulu awas baru lari, skarang gak. Maksudnya untuk meminimalisir juga ketika awas baru

Sunnora	<p>lari ya gak bisa juga. Jadi siaga waspada awas, yang level kedua itu harus sudah diungsikan hanya dipilih kelompok rentan itulah yang didahulukan pas awas kita lari yang rentan sudah sampai tempat aman. Kelompok rentan kan ada lansia, ibu hamil, ada balita itu nanti setelah awas masih ada yang belum lari tapi itu yang kelompok muda-muda seperti mas tri dan mas fajar, kalo aku masuknya kelompok rentan jadi masuknya pas waspada sudah lari. Paling tidak mengerti lah yang diungsikan kelompok rentan dulu yang paling penting satu lagi apa? Difabel. Itu juga termasuk kelompok rentan.</p> <p>Siapa yang pertama kali bapak hubungi ketika status merapi jadi awas?</p>
Muzamil	<p>Kebanyakan kan jalurnya dari bpbd terus ke pak bupati, bupati ke kecamatan, kecamatan ke desa, tapi tidak menutup kemungkinan dipotong juga bisa. Tapi sebanyak yang kita sosialisasi jadi kita dapat informasi ke bpptkg sudah jelas infonya dan bisa dipertanggung jawabkan, kita lapor ke pak bupati, dari bupati ke jajarannya, kecamatan.mungkin lewat kepala bpbd atau pak sekda. Dari sekda ke kecamatan, kecamatan ke dusun.</p>
Sunnora	<p>Pak, media komunikasi apa saja yang bapak pakai ketika sosialisasi?</p>
Muzamil	<p>Kalo kita sosialisasi ya kita paling sering ya pake alat, ohp lcd pake ppt tapi kita menjelaskan ya sejelas-jelasnya namanya juga sama masyarakat kan. Kadang yang namanya ini apasih kita harus menjelaskan itu. Memang di kegiatan itu yang khusus kita ada poster, baliho ajakan himbauan, tapi ketika sosialisasi yang saya alami tidak ada alat yang lain selain. Kecuali yang dituju gak punya lcd laptop ya terpaksa bawa.</p>